

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG
SMA DI KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HENNY PURWANINGSI

NIM. 500894673

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) JENJANG SMA DI KABUPATEN BULUNGAN

Henny Purwaningsi
henny_alfatih@yahoo.co.id

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Sejak pemerintah melaksanakan program BOS, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga melaksanakan program BOSDA untuk jenjang SMA. Sekolah mendapatkan dana BOSDA dari sumber keuangan Kabupaten Bulungan dan dana BOSDA dari keuangan Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu tujuan dari program BOSDA ini adalah untuk menghindari adanya pungutan dan membantu biaya operasional pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan, Tim Manajemen BOSDA Provinsi Kalimantan Utara, Tim Manajemen SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor dengan wawancara secara mendalam dan panduan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Teori Edaward III yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan implementasi program BOSDA jenjang SMA yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap Pelaksana) dan Struktur Birokrasi.

Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOSDA Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan masih ada hambatan dalam hal pengelolaan manajemen BOSDA yaitu dari perencanaan belum maksimal. Untuk pengorganisasian juga masih belum efektif yaitu penempatan sumberdaya untuk mengelola dana BOSDA belum sesuai petunjuk teknis. Dan dari unsur pengendalian juga masih belum maksimal sehingga perlu adanya evaluasi untuk perbaikan program BOSDA ini. Selain itu, masih ada masalah yang dihadapi beberapa fakta internal yaitu (1) Komunikasi yang belum efektif sehingga dibutuhkan adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan frekwensi komunikasi, (2) Sumberdaya yang ada masih belum memenuhi petunjuk teknis yang ada, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator; (3) Sikap pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik namun masih kurang antusias, dimana hal ini terlihat sering terlambat dalam pembuatan laporan, (4) Struktur birokrasi yang ada masih berjalan kurang efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program BOSDA

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF POLICY OF OPERATIONAL SCHOOL AIDPROGRAM AT SENIOR HIGH SCHOOL IN BULUNGAN REGENCY

Henny Purwaningsi
henny_alfatih@yahoo.co.id

*Post Graduate Program
Terbuka University*

Since government conducts operational school aidprogram, the Government of Bulungan regency has also conducted the same program for Senior High School level. The schools recieve fund from the Government of Bulungan regency and the Government of North Kalimantan Province. One of the aims of this program is to avoid illegal charges and to help education finansial.

The aim of the research is to analyze the implementation of the operational school aidprogram and the inhibiting factors in managing theoperational school aidprogramat Senior High School in Bulungan regency. The method of research is a qualitativescriptive. The data wascollected from the Management Team of operational school aidprogramof Bulungan Regency, North Kalimantan Province, Senior High School 1 Tanjung Selor and Senior High School 2 Tanjung Selor through deep and guided interview.

This research used Implementation model from Edward III theory which consists of 4 (four) variables that affecting the successfulness of conducting the operational school aid implementation at Senior High School level which are Communication, Human Resource, Disposition (fund receiver) and Bureaucracy Structure.

The result of the study indicates that the implementation of policy of operational school aidprogram was still not run well because the plan is not well prepared. The organising is not effective in place the human resource to manage the school aid which does not meet technical guidance and the controlling aspect does not work maximally so that it needs an evaluation to improve the program. However, there are some internal facts problem namely, (1) Ineffective Communication so it needs improvement of the intensity of socialization and the frequency of communication; (2) Human resources does not meet the qualify it needs the improvement of knowledge, information and skill; (3) Fund receiver attitude is good enough but not so enthusiastic, it can be seen in reporting the use of the fund which is often late and (4) the available Bureaucracy Structure is not effective.

Key word : The Implementation of the Policy, The operational school aid program

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

TAPM yang berjudul :

**Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan**
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
Menerima sanksi akademik

Tarakan, 2017
Yang Menyatakan,



Henny Purwaningsi
HENNY PURWANINGSI
NIM. 500894673

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan

Penyusun TAPM : Henny Purwaningsi

NIM : 500894673

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

Hari/Tanggal : Sabtu / 22 Juli 2017

Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M
NIDN. 0323116204

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Darmanto, M.ED
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Liestyodono Bawono, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Henny Purwaningsi
NIM : 500894673
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/22 Juli 2017
Waktu : 10.30 Wite – 12.00 Wite

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli :

Nama : Prof. Dr. Ngadisah, MA

Pembimbing I :

Nama : Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M

Pembimbing II :

Nama : Prof. Suciati, M.Sc, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya, Rahmat serta Karunia-Nya kepada penulis, tak lupa penulis panjatkan Salam serta Sholawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang Rahmatan Lil'alamin, sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan", dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, selesainya penulisan tesis ini merupakan berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing, keluarga, teman-teman yang kuliah di Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik. Sehubungan dengan hal tersebut dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan dan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M Dr Pembimbing Pertama dan Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Pembimbing Kedua. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta ketulusan, selama penulis mengikuti perkuliahan dan melakukan bimbingan hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;

3. Dr. Sofjan Arifin, M.Si Kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M , selaku Pembimbing Pertama, yang begitu banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
5. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan (H. Jamaluddin Saleh, S.Pd) atas dukungannya dalam penyelesaian tesis ini;
7. Bapak Amar Mulia, S.Pd, Kabid Pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang telah memberikan informasi terkait Tugas Akhir Penulis;
8. Bapak Dedy Arifani T, sebagai PPTK BOSDA SMA yang memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor dan Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor, serta bendahara, dewan guru, komite sekolah, yang telah bersedia memberikan data melalui wawancara secara mendalam untuk penyelesaian tesis ini.
10. Ayahanda H. Moch. Natsir dan Ibunda Hj. Sri Wuryani, sembah sujud ananda kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan Dukungan dan Do'a serta motivasi untuk belajar dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
11. Suami tercinta Andi Irfan, ST, yang telah memberikan dukungan dan Do'a dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana;

12. Rekan-rekan mahasiswa, Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka yang selalu saling berkomunikasi dan saling memberi motivasi,
13. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang banyak membantu penulis baik materil maupun pikiran sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyempurnaan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Bulungan, terutama melalui program BOSDA. Maka dari itu, saran-saran yang sifatnya konstruktif dan membangun sangat diharapkan guna untuk perbaikan lebih lanjut demi penyempurnaan tesis ini

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana ini, diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Tarakan, 2017

Henny Purwaningsi

RIWAYAT HIDUP

Nama : HENNY PURWANINGSI
NIM : 500894673
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 5 Juni 1978

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SDN 001 Tanjung Selor pada tahun 1991;
2. Lulus SLTP Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 1994;
3. Lulus SMU Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 1997;
4. Lulus Strata Satu (S1), Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian pada tahun 2003.

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2003 s/d 2008 sebagai PTT di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
2. Tahun 2008 s/d 2013 sebagai Staf Pelaksana di Dinas Pendidikan Kab. Bulungan;
3. Tahun 2013 s/d 2014 sebagai Kasi Pemberdayaan dan Komunikasi Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
4. Tahun 2014 s/d 2017 sebagai Kasi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
5. Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.

Alamat Tetap : Jl. Gapensi No. 85 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

No. Telp / HP : 08125389231

Tarakan, 2017



Henny Purwaningsi
NIM. 500894673

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak	i
Abstract	ii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan	21
3. Manajemen	26
4. Program	27
5. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Program	28
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	30
a. Faktor Komunikasi	31
b. Faktor Sumber Daya	32
c. Faktor Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan/ Tingkah Laku)	32
d. Faktor Struktur Birokrasi	33
7. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	34
a. Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	34
b. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	35
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir	39
D. Operasional Konsep	42
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Desain Penelitian	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	49

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan Penelitian.....	49
D. Instrumen Penelitian	50
E. Prosedur Pengumpulan Data	51
F. Metode Analisis Data	52
1. Reduksi Data	52
2. Penyajian Data x	53
3. Verifikasi Data	54
4. Penarikan Kesimpulan	54
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Penelitian	56
1. Objek Penelitian	56
2. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bulungan	59
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.....	61
4. Dasar Pelaksanaan Program BOSDA	63
5. Ketentuan Pelaksanaan Program BOSDA	65
B. Hasil Penelitian	77
1. Gambaran Pelaksanaan Implementasi Program BOSDA Pada SMA di Kabupaten Bulungan	77
2. Tahap Persiapan BOSDA.....	84
3. Tahap Pelaksanaan BOSDA.....	95
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BOSDA	105
5. Model Strategi Implementasi Pelaksanaan Program BOSDA di Kabupaten Bulungan	117
C. Pembahasan.....	121
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	
Lampiran 3. Dokumentasi	

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Desain Kebijakan Publik	13
Gambar 2.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	20
Gambar 2.3. Rangkaian Implementasi Kebijakan Publik	23
Gambar 2.4. Kerangka Berfikir	42
Gambar 3.1. Desain Penelitian	46
Gambar 3.2. Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif Miles & Huberman	55
Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2009 – 2014	59
Gambar 4.2. Model Strategi Implementasi Pengelolaan Program BOSDA	120



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan Tahun 2014	58
Tabel 4.2. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2012-2014	59
Tabel 4.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan dan Jenjang Sekolah Pada Kabupaten Bulungan Tahun 2016.....	60
Tabel 4.4. Jumlah Murid Setiap Kecamatan Persekolah di Kabupaten Bulungan Tahun Ajaran 2016/2017.....	61
Tabel 4.5. Gambaran Tim Personil Bendahara BOSDA.....	88
Tabel 4.6. Alokasi Dana BOSDA Setiap Sekolah Bantuan Keuangan Kabupaten Bulungan dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016	96
Tabel 4.7. Data Jumlah Siswa SMA Persekolah se-Kabupaten Bulungan Tahun 2016	97
Tabel 4.8. Alokasi Penggunaan dana BOSDA Tahun 2016	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu sektor yang menjadi mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah pendidikan. Hal tersebut didasarkan bahwa pendidikan sudah menjadi kebutuhan primer dan merupakan hak semua orang untuk mendapatkannya tanpa terkecuali. Begitu pentingnya, sehingga pendidikan menjadi tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya pada pasal 31 disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 yakni Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan turunnya nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang

kita harapkan, kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 yakni negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) tahun yang bermutu. Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasi sekolah,

Peran BOS tersebut telah memberikan peran yang signifikan terhadap percepatan program wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2013

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyukseskan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menengah di seluruh Indonesia (Kemendikbud, 2013).

Salah satu tujuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Dalam menekan angka putus sekolah dan menindaklanjuti program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat dengan mengalokasi dana pendidikan dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Gratis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana BOSDA untuk pendidikan Dasar dan Menengah dalam membantu pelaksanaan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan Dana BOSDA untuk jenjang SLTA negeri sebanyak 16 sekolah sebesar Rp4.766.000.000, SLTA Swasta Rp607.000.000 sebanyak 6 sekolah. Sedangkan tahun 2016 jenjang SLTA negeri sebesar Rp 4.766.000.000 dan SLTA swasta Rp730.000.000 sebanyak 9 sekolah.

Pemberian dana BOSDA jenjang SMA persiswanya sebesar Rp1.000.000 per tahun, sedangkan SMK Rp1.500.000 per siswa per tahun. Kendati demikian, penggunaan dana ini bukan diberikan langsung untuk siswa, tetapi digunakan untuk operasional sekolah.

Berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOSDA untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan biaya operasional non personalia bukan biaya/untuk investasi dan bukan biaya untuk kesejahteraan guru. Walaupun pada pelaksanaannya, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai menggunakan dana BOSDA. Presentase penggunaan dana BOSDA jenjang SMA adalah belanja pegawai 30%, belanja barang dan jasa 50%, dan belanja modal 20%, sedangkan SMK presentase penggunaannya meliputi belanja pegawai 30%, belanja barang dan jasa 40% , dan belanja Modal 30%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOSDA adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya tersedia. Oleh sebab itu, keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Pentingnya pengelolaan dana BOSDA yaitu dengan pengelolaan yang baik

akan berdampak pada ketercapaian tujuan dari program dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan dana BOSDA yang baik merupakan suatu keberhasilan tersendiri bagi sekolah yang dimulai dari suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Proses tersebut tidak terlepas juga dari kemampuan mengelola atau memenej. Pengelolaan anggaran tidak terlepas dari manajemen dianggap sebagai sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Kendati demikian, walaupun dikelola dengan baik tidak berarti bahwa pengelolaan anggaran dalam organisasi sudah terbebas dari masalah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Daerah Kabupaten Bulungan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bahwa pengelolaan dana BOSDA di sekolah belum berjalan dengan optimal.

Selain itu, BPK juga menemukan jika dana BOSDA tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Banyaknya sekolah yang salah dalam menggunakan dana tersebut akibat tidak fahamnya aturan Juklak dan Juknisnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sekolah dalam mengelola dana tersebut dapat dikatakan masih rendah.

Munculnya pandangan bahwa manajemen sebagai sebuah seni dan diimplementasi menjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola dana tersebut mendasarkan pada keputusan bersama yang melibatkan Tim Manajemen BOSDA Sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana

tersebut wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOSDA yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai SKPD teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOSDA.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan mengawasi pengelolaan dana BOSDA melalui wadah pengaduan masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani oleh komite sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOSDA kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.

Penggunaan anggaran yang kurang transparan berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses informasi sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan. Permasalahan yang selalu dialami bahwa meskipun dana BOSDA telah dikucurkan Pemerintah Daerah kepada Sekolah Dasar atau sederajat maupun Sekolah Menengah Atas atau setingkat, tetap saja setiap tahun ajaran baru atau penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP 3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Sementara itu, permasalahan lain yang juga terjadi adalah proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA.

Dalam penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan sekolah, guru yang bersangkutan tidak segera membuat laporan atas kegiatan tersebut kepada bendahara BOSDA. Kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOSDA dan guru mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana. Keterlambatan laporan dari pelaksana kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap pembuatan SPJ yang harus segera dilaporkan kepada tim manajemen BOSDA Kabupaten. Sedangkan keterlambatan pelaporan penggunaan dana kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten akan berakibat pada keterlambatan penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya. Selain itu juga dengan adanya pemberian bantuan tersebut kualitas pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Bulungan masih kurang merata

Keberhasilan program BOSDA ini harus didukung oleh faktor ketersediaan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung program BOSDA. Permasalahan utama yang dihadapi setelah adanya program BOSDA belum adanya upaya untuk mengkaji bagaimana implementasi program dan kebijakan yang sudah dijalankan sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan komunikasi yang belum efektif antara satuan pendidikan jenjang SMA yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Sumber daya yang terbatas, Sikap Pelaksana kurang antusias dalam mendukung pelaksanaan program dan Struktur Birokrasi yang ada belum efektif dalam menunjang kegiatan program BOSDA. Melihat arti pentingnya pengelolaan dana BOSDA dalam penyelenggaraan pendidikan dan

berbagai permasalahan yang melingkupinya, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan program BOSDA jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakan yang menghambat pengelolaan program BOSDA jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang diuraikan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan Kebijakan Publik pada organisasi publik;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan.
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan, khususnya masalah pengelolaan dana BOSDA jenjang SMA.
 - b. Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana BOSDA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Sering kali masyarakat mendengar istilah kebijakan dan sudah tidak asing lagi ditengah masyarakat yang hidup dalam berpemerintahan. Masyarakat sering mendengar tentang adanya kebijakan yang diluncurkan pemerintah khususnya terkait dengan berbagai kebijakan negara di berbagai bidang.

Dalam hubungannya dengan kebijakan, kita mengenal dengan istilah konsep kebijakan publik yang dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

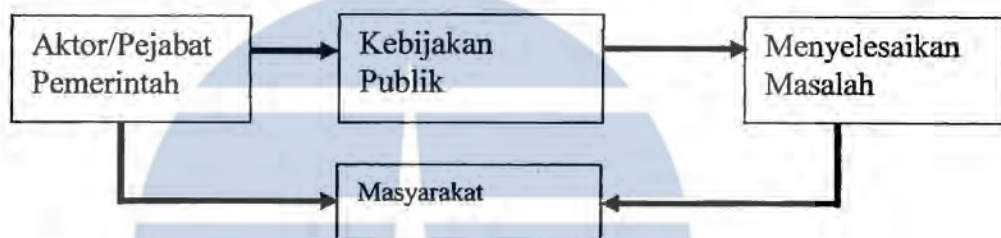
Menurut Winarno (2007) bahwa istilah kebijakan (*policy term*) secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Di balik itu, ada persamaan antara Solihin (2008) dan Winarno (2007) bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program,

keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design.

Sedangkan Federick mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008). Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sementara itu, menurut James E Anderson bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2007). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Menurut Anderson (2006, 6) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama". Menurut Anderson lagi, Kebijakan publik dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat. Secara skematis apa yang dimaksud oleh Anderson kebijakan publik dapat didesain sebagai berikut:



Gambar 2.1. Desain Kebijakan Publik

Richard Rose mengemukakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri (Winarno, 2007). Dari pendapat para ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Memang disadari bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman terkait dengan kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua kata yang mirip namun harus dapat dibedakan antara keduanya, yaitu kebijakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Menurut Islamy (2009) bahwa kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-

pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan. Limitasi studi kebijakan publik ini pada dasarnya sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Berdasarkan hirarkinya, maka kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Berdasarkan limitasi terminologinya, pengertian kebijakan publik atau disebut juga *public policy* banyak sekali. Menurut Woll bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Tangkilisan (2003). Sedangkan menurut Thomas R Dye bahwa kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* artinya apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan Islamy (2009).

Menurut Dunn (2003) bahwa Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya

pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Demikian juga dengan Easton mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat Winarno (2002). Lebih lanjut, Winarno (2002) bahwa menurut Laswell dan Kaplan bahwa kebijakan publik adalah *a projected program of goal, value, and practice* yaitu sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Sementara itu, menurut Pressman dan Widavsky bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan Winarno (2002). Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Robert Eyestone bahwa kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya Agustino (2008). Memang dalam diakui bahwa terdapat anggapan jika limitasi tersebut masih melebar karena yang dimaksud kebijakan publik mencakup banyak hal. Setidaknya dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan,
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Limitasi tersebut memberikan penekanan mengenai perwujudan tindakan dan bukan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu merupakan bagian kebijakan publik karena mempunyai pengaruh sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Para ahli yang mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Hal tersebut juga seperti yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah Tangkilisan (2003).

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hal ini dikemukakan David Easton bahwa kebijakan publik adalah *the autorative allocation of values for the whole society*. Pengertian menitikberatkan pada pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat

sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Pandangan yang dikemukakan tersebut karena dianggap pemerintah termasuk ke dalam *authorities in a political system* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu di mana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Sehubungan dengan berbagai argumentasi tersebut di atas maka pada dasarnya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu dalam mengatasi masalah-masalah publik guna kepentingan publik.

Menurut William Dunn dalam Winarno (2007) tahap-tahap kebijakan publik adalah :

1) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada

pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

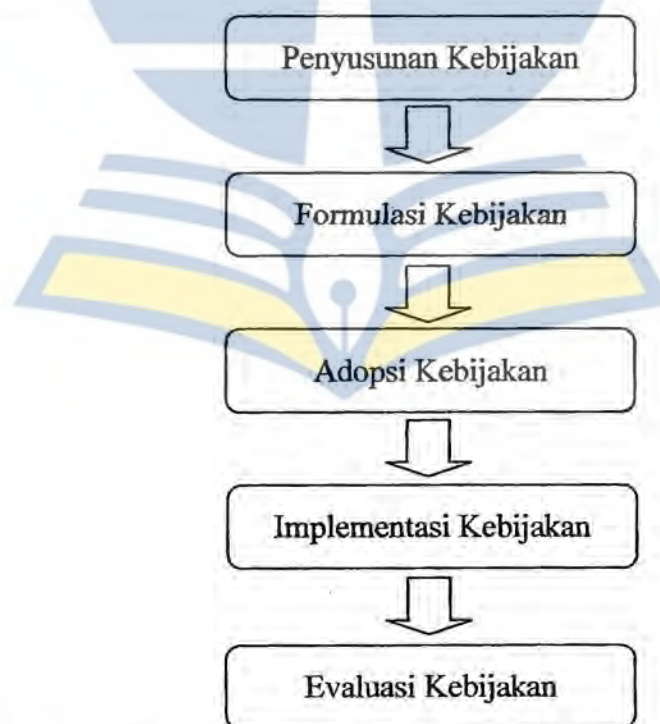
4) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling

bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap-tahap kebijakan seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Sumber: Winarno (2007)

2. Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik yang telah dikeluarkan harus dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan harapan untuk mencapai tujuan. Program kebijakan yang ditetapkan dianggap sebagai alternatif pemecahan masalah sehingga dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Limitasi tentang implementasi menurut Mater dan Horn (1975) bahwa sebagai *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives set forth in prior policy decisions . This includes both one time effort to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions* atau implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan lihat dimaksud dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Selanjut Mater dan Horn (1993) menjelaskan jika implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut suatu saat mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu

Pada dasarnya implementasi kebijakan menurut Nugroho (2008) adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi bawahannya atau staf pegawainya untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Pada kebijakan sederhana hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, namun jika sifatnya makro, maka upaya implementasi melibatkan berbagai institusi dari tingkat bawah ke tingkat yang paling atas.

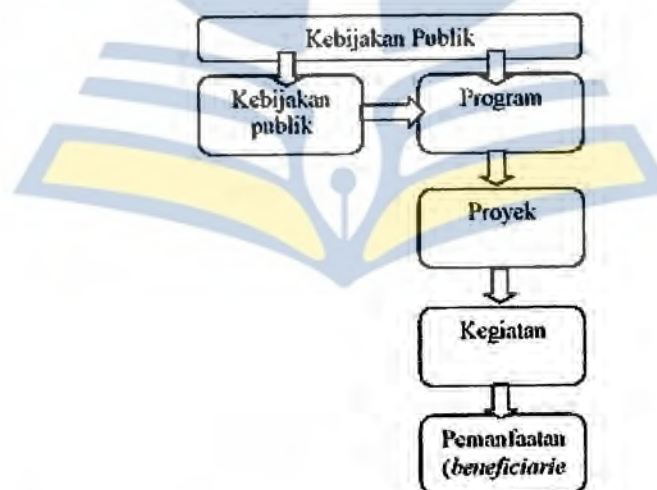
Sedangkan adapun makna dari implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu ketika memahami apa yang semestinya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pemahaman tersebut menekankan implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

Dunn ((2003) mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus di mana implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan

pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Winarno (2007) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Guna mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah. Pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau kedua, memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mengadopsi Subarsono (2008) secara umum menggambarkan rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan, sebagai berikut:



Gambar 2.3. Rangkaian Implementasi Kebijakan Publik

Sementara itu, menurut Nugroho (2008) bahwa rencana ialah 20% keberhasilan, implementasi ialah 60% dan sisanya 20% lagi ialah bagaimana mengendalikan implementasi. Dalam mengimplementasi kebijakan akan menjadi sulit dan berat karena terkadang di lapangan muncul masalah yang tidak dijumpai pada konsep, selain ancaman terhadap konsistensi implementasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, dalam implementasi kebijakan, terdapat pula satu hal penting yaitu diskresi yang dimaknai sebagai ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila suatu kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi di lapangan. Lebih lanjut menurut Nugroho (2008) bahwa terdapat empat untuk mengukur keefektifan dalam implementasi. Pertama, apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua adalah tepat pelaksanaannya, ketiga tepat pelaksananya, keempat adalah tepat lingkungan.

Sementara itu, menurut Subarsono, 2008 bahwa yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program ada tiga variabel, meliputi:

1. Logika kebijakan.

Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan ialah kebijakan yang masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. Isi dari

suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam tataran praktik.

2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan

Maksud dari lingkungan ini ialah kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, fisik atau geografis.

3. Kemampuan implementor

Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kompetensi dan ketrampilan dari para implementor kebijakan. Untuk itu, diperlukan pengembangan kualitas SDM, komitmen, dan jumlah implementor yang memadai.

George C. Edward III (1980:10) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Disposition*
4. *Bureacratic Structure*

Dari model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III di atas jelas bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu *Communication, Resources, Dispositions dan Bureacratic Structure*. Masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi terhadap implementasi. Keterkaitan antara keempat struktur dapat menjadikan keselarasan fungsi dari masing-masing struktur. Yang akan mengakibatkan keberlangsungan implementasi suatu kebijakan.

Seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, (1991), Menurut Mazmanian dan Sabatier mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan Negara.

3. Manajemen

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik perlu adanya manajemen yang baik agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik pula. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan – 1985).

Adapun menurut GR. Terry dalam Winardi (1986), yang menjelaskan fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut terry dalam Winardi menyebutkan fungsi manajemen terdiri :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu mencapai hasil yang diinginkan

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu seperti kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerjasama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan apabila terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diusahakan perbaikan, sehingga hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

4. Program

Menurut Suharsimi Arikunto (2008), program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum.

Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah

bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila "program" ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Selanjutnya Suharsimi (2008) juga menekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang (Suharsimi, 2008)

5. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Program

Menurut M. Irfan Islamy (1997, 102-106) Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, sangat diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan yaitu :

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain;
2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Selain itu, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991:36) menyebutkan tahap implementasi adalah sebagai berikut :

Tahap I: Terdiri atas kegiatan-kegiatan : (a). Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; (b). Menentukan standar pelaksanaan; (c). Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan;

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan : Menentukan jadwal, Melakukan pemantauan, Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Seperti yang dituliskan Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan

baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

Dari pendapat para ahli tersebut implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan. Sehingga apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dan segera dapat dilaksanakan

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Merrile Grindle berpendapat bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai (Agustino, 2012:139).

Dari pendapat Grindle tersebut dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Menurut George C. Edward III dalam Winarno, (2016) mengemukakan pendapat bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah faktor komunikasi, sumberdaya,

disposisi (kecenderungan-kecenderungan/tingkah laku) dan struktur birokrasi.

a. Faktor komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka terdapat efektifitas dalam implementasi kebijakan pendidikan. Diharapkan para aktor kebijakan dapat tepat, akurat, dan konsisten dalam pembuatan keputusan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang di terapkan dalam masyarakat. Menurut Edwards (Winarno, 2016) faktor komunikasi ada tiga hal yang menentukan keberhasilan komunikasi berjalan baik yaitu (1) transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. (2) kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). (3) konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Faktor sumberdaya

Faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu (1) staf, sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah staf. Keberhasilan pelaksanaan implementasi terletak pada staf yang ahli dan kompeten dibidangnya yang mampu melaksanakan kebijakan dengan baik. Adapun kegagalan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan karena kurangnya staf yang handal dan memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya, maka dari itu dibutuhkan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. (2) informasi, dalam implementasi kebijakan. Informasi ini berkaitan dengan menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. (3) wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. (4) fasilitas, dalam hal ini bisa fasilitas dana dan fasilitas fisik (seperti gedung, sarana dan prasarana yang akan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

c. Faktor disposisi (kecenderungan-kecenderungan/Tingkah laku)

Disposisi merupakan sikap para pelaksana atau kecenderungan para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dapat dilihat

dari kemampuan dan kemauan para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Faktor disposisi (kecenderungan/tingkah laku) dalam Winarno (2016) dapat dipengaruhi oleh (1) pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. (2) insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Faktor Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan (Winarno, 2016). Struktur birokrasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Apabila semua faktor ini dapat bersinergi dalam pelaksanaannya maka implementasi kebijakanpun dapat berjalan dengan baik.

Menurut Edwards dalam Winarno (2016), ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standar Operating Prosedurs (SOP) dan Fragmentasi. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar. Fragmentasi organisasi, dimana tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, sering kali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

7. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

a. Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan suatu kebijakan program pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkorelasi dari BOS pusat dan dibentuk untuk mewujudkan pendidikan gratis wajib 12 tahun. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditetapkan pada tahun 2014 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Pelaksana dari program ini adalah Dinas Pendidikan sebagai tim manajemen dari program Bantuan Operasional Sekolah Dearah (BOSDA) dan menetapkan juknis dari program tersebut. APBD yang sebagai dasar pendanaan program Bantuan Operasioanl Sekolah Daerah (BOSDA) disesuaikan dengan

kemampuan keuangan Kabupaten Bulungan. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mempunyai 3 pilar, yaitu (1) sebagai pelayanan dan aksesibilitas pendidikan. (2) meningkatkan kompetensi dan relevansi pendidikan. (3) pengelolaan pendidikan dan *good governance*, dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di kabupaten Bulungan terlihat dampak dari kebijakan tersebut dengan melihat APK dan APM dari masyarakat yang lanjut sekolah.

b. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang kebijakan Pendidikan Gratis dengan program Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) di Kabupaten Bulungan bertujuan agar masyarakat dalam usia pendidikan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dengan program Bantuan Operasioanal Sekolah Daerah (BOSDA) ini masyarakat terbantu dengan keringaan biaya pendidikan sehingga pendidikan 12 tahun dapat terwujud dengan tidak adanya anak usia sekolah putus sekolah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan, yaitu :

1. Penelitian dilakukan oleh Duwi Meilina (2016) yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMAN 1 Kasui Way Kanan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengorganisasian dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah mempunyai sistem yang baik, pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah sesuai SOP yang menjadi target monitoring adalah pertanggungjawaban pemakaian dan kesesuaian administrasi dengan pelaksanaan, dan pelaporan. Hambatan yang di alami dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional sekolah adalah waktu pencairan dana masih ada keterlambatan, kurangnya sumber daya manusia dalam teknisi, kurang disiplinnya pihak sekolah dalam penyeteran data setiap waktunya dan masih belum ada transparasi yang jelas terkait penyusunan SPJ nya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Parwati Asih, Tahun 2014 yang meneliti tentang Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model CIPP (*Context Input Process Product*) *Stufflebeam*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang telah diperoleh ditransformasikan ke dalam T skor jika $T > 50$ adalah positif (+) dan jika $T \leq 50$ adalah negatif (-), dan kemudian ditransformasikan ke dalam kuadran Glickman. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Parwati Asih, adalah : bahwa pengelolaan dana BOS yang ada di SMK Teknologi Nasional Denpasar tergolong efektif. Meskipun efektif namun terdapat kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia pengelola BOS yang ada di SMK Teknologi Nasional Denpasar Kurangnya pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dana BOS menjadi kendala dalam pembuatan laporan, penggunaan dana, dan penyaluran dana

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Parwati Asih, menggunakan model evaluasi CIPP, sedangkan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teori implementasi oleh George C. Edwards III. Penelitian yang dilakukan Ni Wayan Parwati Asih adalah menggunakan metode kuantitatif dan tempat penelitian di SMK Teknologi Nasional Denpasar Bali, sedangkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretif dan etnometodologi dan tempat penelitian adalah pada jenjang SMA yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Selain itu juga penelitian yang dilakukan peneliti dari segi manajemen pengelolaan dana BOSDA kurangnya controlling dari Kepala Sekolah mau Dinas terkait sehingga perlu dilakukan evaluasi pengelolaan dana BOSDA untuk lebih efektif dan efisien.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gede Andreyan Semara Bhawa, tahun 2014 yang meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. Hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan dana yg sudah efektif dan sesuai dengan petunjuk teknis, dan terdapat kendala yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana

BOS, upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS.

4. Penelitian Yang dilakukan oleh St. Rahmawati Arfah, 2012. Dalam penelitiannya tentang pemanfaatan dana BOS di SD Inpress di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh temuan penelitian bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan belum sepenuhnya efektif. Ada beberapa problematika yang dihadapi sekolah terkait dengan pemanfaatan dana BOS, seperti aspek dana yaitu waktu pencairan dana BOS terkadang mengalami keterlambatan, aspek SDM yaitu minimnya tenaga kependidikan di lokasi penelitian, aspek sarana prasarana yaitu jumlah pengadaan sarana dan prasarana belum memadai dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada orang tua siswa serta bentuk pengawasan yang minim.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Selain itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam analisis penelitian yang dilakukan peneliti selain menggunakan teori Edward III juga dikaitkan dengan teori manajemen.

Selain itu dari sisi manajemen perlu ada perbaikan baik itu dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan maupun pengawasan. Sehingga perlu adanya evaluasi dalam melaksanakan kebijakan program sehingga pengelolaannya lebih baik.

C. Kerangka Berpikir

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan pemerataan pendidikan yang dirumuskan dengan menetapkan kebijakan pendidikan gratis dengan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). BOSDA ini diprogramkan untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, mencegah anak putus sekolah dan melakukan pembiayaan operasional sekolah, seperti pembiayaan honor guru, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya.

Kerangka Pikir yang dirumuskan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat para pakar ahli kebijakan publik, yang dapat dipahami bahwa proses keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat berkaitan dengan berbagai hal dimana yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan proses pelaksanaannya harus saling bersinergis. Untuk itu, pemahaman secara mendalam tentang berbagai hal tersebut sangat menentukan tingkat keberhasilan dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pendidikan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada bahwa masih ditemukan belum adanya pemerataan pendidikan, masih ada dilakukan pembayaran yang dibebankan pada masyarakat seperti dalam kegiatan penerimaan siswa baru. Selain itu dalam pemberian BOSDA ini pada satuan pendidikan dimana pelaporannya belum transparan dan sering terlambat sehingga menghambat pembiayaan operasional sekolah dan

penggunaannya yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diimplementasikan dalam proses yang didalamnya terdapat komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi (kecenderungan sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keseluruhan didalam proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini, menggunakan teori George Edward III yang dianggap relevan dengan adanya masalah-masalah yang ditemukan dilapangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam kebijakan program bantuan operasioanl sekolah daerah (BOSDA) jenjang SMA di Kabupaten Bulungan, yaitu :

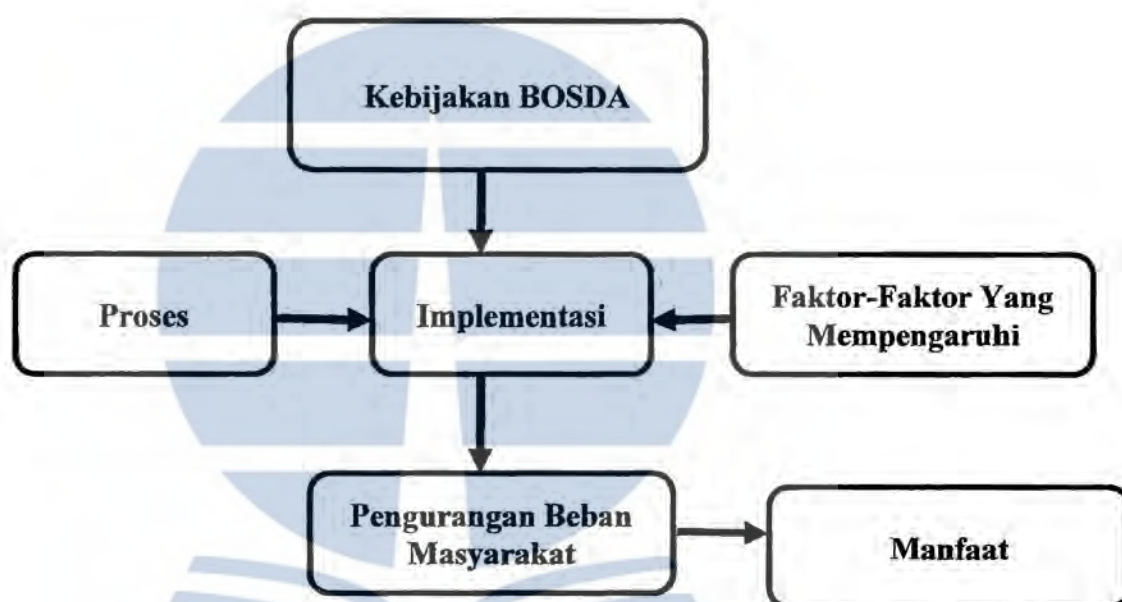
- a. Komunikasi yaitu kemampuan para aparat pelaksana untuk memahami dan menyampaikan semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada semua aparat pelaksana sampai ke tingkat bawah (satuan pendidikan). Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama dan koordinasi terhadap setiap langkah program yang dilaksanakan. Setiap aparat pelaksana harus mengintegrasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dengan pencapaian tujuan program, sehingga nantinya ditemukan adanya kesamaan persepsi dalam melaksanakan kebijakan program BOSDA.
- b. Sumberdaya yaitu ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas yang ditunjang dengan kemampuan dan spesialisasi keilmuan yang di perlukan untuk melaksanakan setiap

pekerjaan maupun tugas yang diberikan, sumber daya finansial dan dibarengi dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melancarkan tugas dan pekerjaan aparat pelaksana. Selain itu diberikan juga batas kewenangan yang dimiliki oleh aparat untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan dalam menjamin pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. Disposisi (kecenderungan/tingkah laku atau sikap pelaksana yaitu merupakan komitmen dari para aparat pelaksana untuk betul-betul dan konsisten melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. Aparat pelaksana yang direkrut adalah aparat yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya di lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan program. Sebagai konsekwensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemberian insentif atau tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen dari aparat pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan program BOSDA.
- d. Struktur birokrasi yaitu adanya dukungan dari aparatur pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai bidang pekerjaan dan disertai dengan penyediaan Standar Operating Procedure (SOP) yang dapat mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaannya tidak lepas dari SOP yang ada. Selain itu dalam struktur organisasi/ birokrasi terdapat fragmentasi yang merupakan penyebaran tanggung jawab suatu

kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Dengan adanya penyebaran tanggung jawab dalam hal ini dana yang diserahkan pada satuan pendidikan diperlukan koordinasi yang baik dalam melaksanakan program BOSDA.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Kerangka berfikir

D. Operasional Konsep

Penelitian ini mengambil lokus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan sekolah jenjang SMA yaitu SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan. Kedua sekolah ini ada perbedaan yang mendasarinya yaitu dari segi sarana prasarana, jumlah murid, jumlah guru, bangunan, prestasi sekolah dan lain sebagainya. Penelitian ini dibangun berdasarkan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya. Beberapa definisi yang telah dikemukakan yang memungkinkan

menimbulkan penafsiran yang berbeda dipilih untuk menyatukan pemahaman yang komprehensif dan ditambah dengan instrumen yang mendukung teori tersebut. Adapun Operasional konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik menurut Edward III dalam (Budi Winarno, 2016) merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan meliputi program, keputusan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat.
(Dikutip dari mana)
2. Penelitian ini menggunakan teori George C Edward III, yang menekankan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber-sumber, disposisi (kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi).
3. Komunikasi merupakan penyampaian atau transmisi informasi antar dua orang atau lebih. Komunikasi yang baik antar pembuat kebijakan dengan yang melaksanakan kebijakan akan berpengaruh baik dengan pelaksanaan implementasi kebijakan..
4. Sumber-Sumber daya merupakan pelaksana dalam implementasi kebijakan yang mencakup antara lain :
 - a. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugas, perintah maupun anjuran dari atasan atau pimpinan
 - b. Informasi yang relevan dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - c. Wewenang merupakan kewenangan yang bersifat formal agar mudah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

- d. Fasilitas yang berupa dana dan sarana prasana yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan.
5. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksana) merupakan adanya kesesuaian sikap atau kesesuaian persepsi dalam hal ini meliputi sikap dan komitmen antara pembuat kebijakan dan aparat pelaksana (implementor) yang melaksanakan kebijakan.
6. Struktur Birokrasi merupakan sistem dan prosedur operasional kerja yang tidak menyulitkan aparat pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam hal ini sistem birokrasi yang dibuat secara sederhana agar tercipta sistem mekanismen kerja yang efektif.
7. Program BOSDA merupakan bantuan operasional sekolah daerah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah serta membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Substansi dari bab ini meliputi desain penelitian, sumber informan, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, metode analisis.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam menacapai tujuan penelitian digunakan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologi.

Pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail, melihat fenomena, dan menggali pengalaman dari objek penelitian (Neuman, 1997). Demikian juga menurut Agger (2003) bahwa:

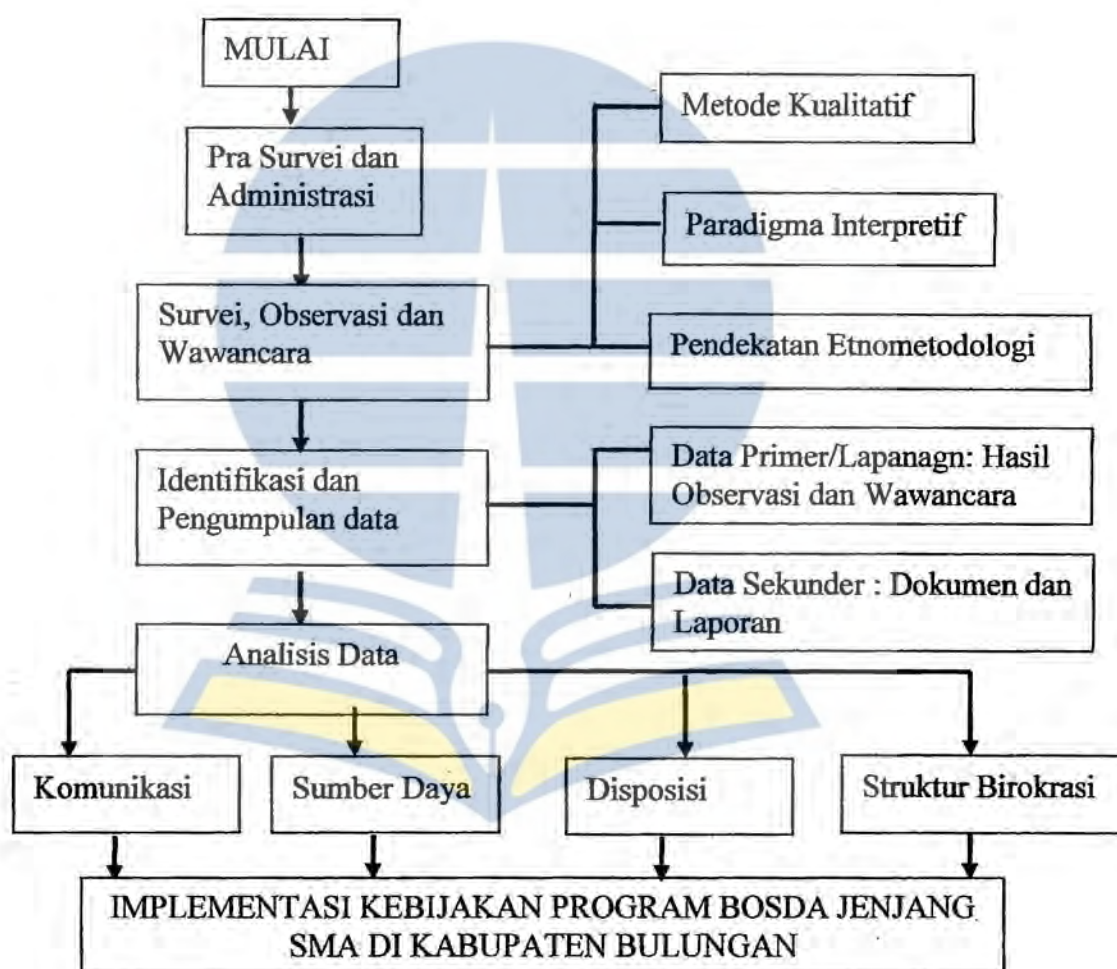
Paradigma interpretif mencoba memahami tindakan sosial individu pada level makna yang mengikat setiap manusia, ia tidak berusaha untuk memproduksi hukum sosial yang berlaku abadi, juga tidak bermaksud untuk melakukan mobilisasi aktivisme sosial dengan cara membangkitkan masyarakat agar bergerak bersama pada bidang kekuatan sosial yang kadang kala saling kontradiktif.

Paradigma interpretif digunakan mengeksplorasi makna yang terdapat dalam segala tindakan yang nampak maupun yang tersembunyi dari aktor pengelola dana BOSDA pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Bulungan.

Etnometodologi didasarkan pada ide bahwa kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial yang sifatnya rutin dan umum dilakukan melalui berbagai

bentuk keahlian (Mudjiyanto, 2009). Menurut Bogdan dan Biklen (1990) bahwa pengertian etnometodologi tidaklah mengacu pada suatu model atau teknik mengumpulkan data ketika seseorang sedang melakukan suatu penelitian, tetapi lebih memberikan arah mengenai masalah apa yang akan diteliti.

Adapun desain penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif dapat menangkap hasil signifikan dari berbagai fenomena yang terjadi karena rancangannya tidaklah terkunci oleh variabel dan hasil yang ditentukan sebelumnya sehingga umumnya metode ini lebih berorientasi pada eksplorasi, pengungkapan, dan logika induktif.

Pendekatan yang bersifat induktif dimaksudkan bahwa evaluator berupaya menyikapi dengan akal sehat suatu situasi tanpa mengedepankan harapan yang sudah diduga sebelumnya perihal latar belakang program. Penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai penelitian yang bersifat subjektif karena instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Subjektivitas dalam penelitian kualitatif menurut Patton (2006) diilustrasikan sebagai sebuah seni. Di dalam seni tidak ada patokan ideal dan penilaian yang tunggal. Keindahan adalah tergantung dari siapa yang melihatnya. Ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa interpretasi dari suatu objek atau fenomena sangat sarat dengan nuansa subjektivitas atau dengan kata lain sangat tergantung dari sudut pandang dari orang yang memberikan interpretasi. Atas dasar itulah, maka prinsip universalitas dari hasil temuan pada penelitian kualitatif sering kali dikesampingkan.

Metode kualitatif secara epistemologis merupakan turunan dari rasionalisme yang menekankan pada subjektivisme. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti: ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, individu dalam batasan yang sangat *holistic*. Sementara itu, Richie dalam Moleong (2004) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektif-perspektif di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang ditelitinya. Lebih lanjut, Moleong (2004) membatasi penelitian kualitatif sebagai penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada simpulannya, metode kualitatif merupakan serangkaian praktik interpretif dan tidak menggunkan satu metodologipun. Oleh sebab itu, pemilihan penelitian kualitatif dalam penelitian ini yang berfokus pada eksplorasi akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang sangat relevan sebagaimana menurut Denzim dan Lincoln, (2009) bahwa:

Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti yang semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah jenjang SMA di Kabupaten Bulungan merupakan ranah yang relevan untuk penelitian kualitatif. Dalam mengungkap fokus dari penelitian ini maka dibutuhkan eksplorasi, pengungkapan, dan logika induktif yang merupakan bagian instrumen dalam penelitian kualitatif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2016 – Maret 2017. Adapun tempat penelitian adalah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan dengan pemilihan 2 (dua) sekolah jenjang SMA yaitu SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor yang merupakan salah satu sekolah mengelola dana BOSDA.

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan Penelitian

Informan merupakan para aktor yang dianggap memahami informasi yang dibutuhkan, baik sebagai pelaku maupun orang lain yang memiliki kapasitas untuk memberikan data. Menurut Salim (2006) pada prinsipnya setiap anggota masyarakat (entitas atau organisasi) yang diteliti bisa menjadi informan. Hanya saja perlu menyadari bahwa tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik.

Guna memperoleh pemahaman yang memadai tentang implementasi kebijakan program dana BOS daerah digunakan Triangulasi. Menurut Flick (1992) dalam Denzin (2009) bahwa:

Triangulasi merupakan proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan dari suatu observasi ataupun interpretasi.... Teknik triangulasi dapat juga digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena.

Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi data-data yang diperoleh dari aktor dengan aktor lainnya, atau informan lainnya, atau dari informasi tertulis lainnya. Tujuannya agar data-data yang diperoleh tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipikirkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta teribat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program bantuan dana BOSDA pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan. Secara keseluruhan ada 11 informan yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu PPTK BOSDA SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, 2 orang Kepala Sekolah, 2 orang Guru, 2 orang Bendahara sekolah dan 2 orang Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua murid dari sekolah jenjang SMA di Kabupaten Bulungan.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian adalah wawancara ke satuan pendidikan jenjang SMA secara langsung yang ada di Kabupaten Bulungan. Untuk mempertajam hasil penelitian Peneliti langsung melakukan wawancara secara mendalam ke SMAN 1 Tanjung Selor, SMAN 2 Tanjung Selor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara, untuk menggali data / informasi, baik data primer maupun skunder yang mendasarkan pada aspek-aspek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Program bantuan dana BOSDA di Kabupaten Bulungan. Sebagai pendukung, peneliti melakukan penelitian dibantu dengan data-data (dokumentasi),

sedangkan untuk menggali informasi peneliti langsung mengadakan tanya jawab dibantu daftar pertanyaan untuk memudahkan dalam penggalan data dan informasi yang diperlukan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Secara operasional, penelitian ini terdiri beberapa tahap. Pertama, diawali dari prosedur formal yakni mengajukan permohonan penelitian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Kedua, melakukan observasi lapangan yang merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Ketiga, melakukan eksplorasi data secara internal kepada para aktor penyusun dana Bos Daerah. Ekplorasi data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada kepala dinas, tim penyusun dana BOS Daerah, dan pihak terkait dalam yang memiliki hubungan kuat dengan objek penelitian. Keempat, selain melakukan wawancara mendalam juga berinteraksi dengan aktor dalam kehidupan keseharian mereka, baik pada saat melaksanakan tugas maupun selepas jam kantor. Hal ini peneliti lakukan untuk memahami seluk-beluk aktor lalu memaknainya. Dalam menggali informasi terhadap informan kunci dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan berdialog langsung melalui informan. Tujuan wawancara pada dasarnya adalah mencatat pendapat (opini), perasaan, emosi, tindak-tanduk dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi.

Setelah itu, melakukan studi dokumentasi. Cara dokumentasi dalam pengumpulan data, peneliti lakukan untuk melengkapi data yang diperoleh

dari hasil wawancara. Dokumen dibutuhkan dalam rangka memperkuat analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan antara lain dokumen perencanaan anggaran pendidikan, penerimaan dana BOS Daerah, dokumen pengelolaan dana BOS Daerah, dan dokumen pertanggungjawabannya

F. Metode Analisis Data

Dalam menghasilkan *out put* penelitian, salah satu tahapan yang paling penting adalah analisis data. Tahapan ini merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan hal-hal lain untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain (Muhadjir, 2000).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kontinuitas yaitu dari saat memulai, sedang, dan saat selesainya proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (1992:20), teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, dan penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data dan merupakan proses pengumpulan data penelitian untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Seorang peneliti dapat melakukan dan menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode wawancara, observasi, dokumentasi, atau berbagai dokumen yang berhubungan

implementasi kebijakan program bosda, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya data tambahan bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam analisis data ini ini adalah dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui kegiatan penyajian data ini maka akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis atau simultan sehingga data yang akan diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti, dan dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

Penyajian data kualitatif yang dilakukan dalam analisis data ini dapat dilakukan melalui cuplikan kartu sikap yang berisi informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri sebagai satuan data dan akan ditampilkan dengan menggunakan kode yang menandai kategori data, cara pengumpulan, nomor narasumber dan intisari jawaban.

Dari uraian tersebut penyajian data dapat dilakukan dengan pemberian kode seperti KOM.W.01.04, berarti kategori data adalah Kom (Komunikasi), W (wawancara) sebagai cara pengumpulan data, 01 adalah nomor narasumber dan 04 adalah intisari jawaban dari pertanyaan nomor 4.

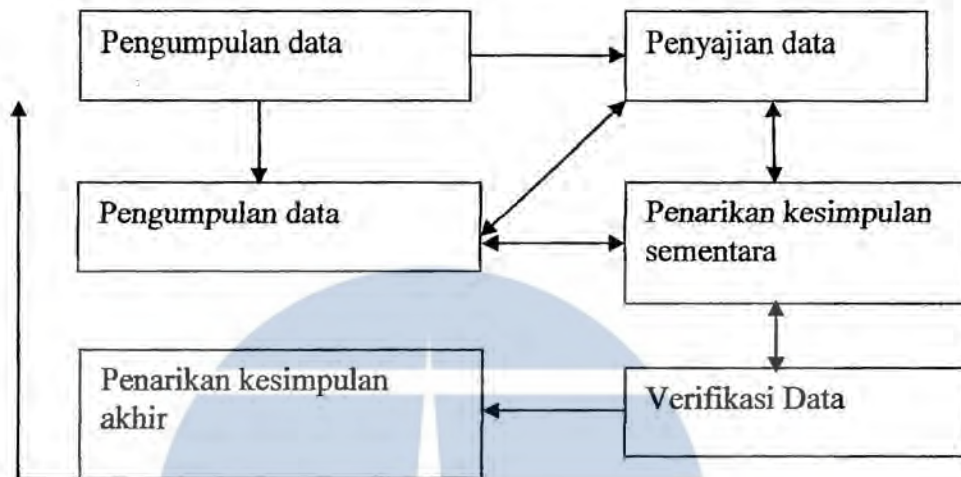
3. Verifikasi Data

Dengan selesainya penyajian data, langkah selanjutnya peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang peneliti sajikan dengan cara memverifikasikan kepada orang yang lebih ahli dan kompeten dalam hal penyajian data yaitu informan, dapat juga diverifikasi oleh dosen pembimbing dan teman-teman untuk saling melengkapi data yang pada akhirnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yang tepat dan akurat

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan verifikasi data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan yang dilakukan dari reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi data sehingga data dapat disimpulkan. Dalam penelitian ini peneliti masih dapat menerima masukan dari para ahli atau informan. Sehingga penarikan kesimpulan sementara yang diambil peneliti dapat masih diuji ulang dengan data di lapangan dengan merefleksi kembali data yang ada, melakukan sharing dengan teman maupun dosen pembimbing sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Dengan berkembangnya data di lapangan yang ditemukan akan semakin akurat penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan menggunakan Model Interaktif Miles dan Hubberman (1992:20) sebagai berikut :



Gambar 3.2. Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif Miles & Huberman

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pogram Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SMA di Kabupaten Bulungan, dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Deskripsi Penelitian

1. Objek Penelitian

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu Kabupaten di bagian utara pulau Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km² terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km².

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.

Dari data BPS Kabupaten Bulungan, dapat dilihat letak wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Letak Wilayah :

Lintang Utara : $2^{\circ} 09' 19'' - 3^{\circ} 34' 49''$

Bujur Timur : $116^{\circ} 04' 41'' - 117^{\circ} 57' 56''$

2. Batas Wilayah:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan

b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Berau

d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

2. Luas Wilayah : 13 181,92 km²

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan dari data BPS Kabupaten Bulungan untuk tahun 2014 tercatat sebesar 162.563 jiwa. Adapun pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, tercatat untuk kepadatannya adalah berkisar antara 1,56 jiwa/km² (Kecamatan Peso) sampai 73,69 jiwa/km² (Kec. Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 12,33 jiwa/km². Untuk Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, dan Sekatak merupakan Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata. Untuk komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 116,89 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki. Untuk data jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.1.

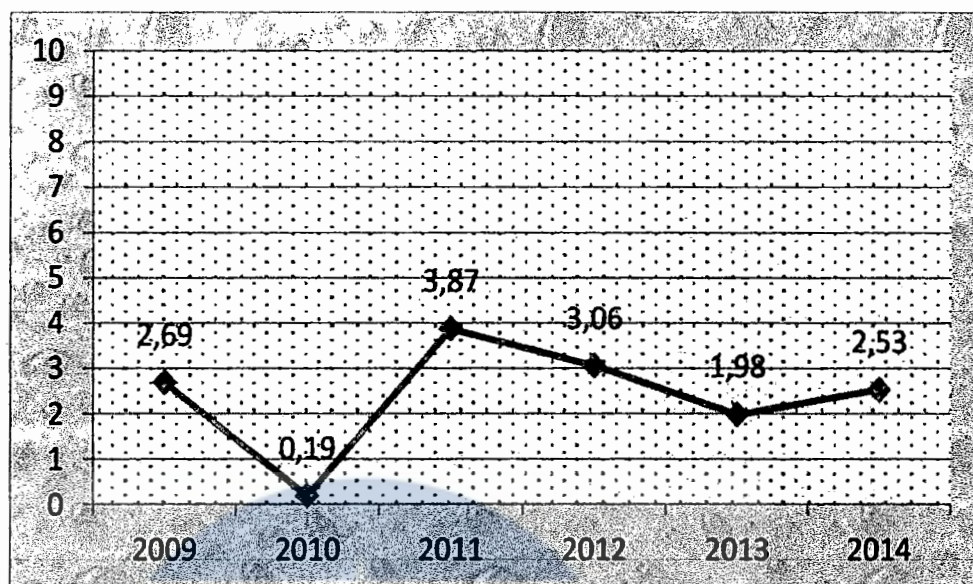
Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, kepadatan penduduk setiap Kecamatan tahun 2014.

N O	KECAMATAN	Luas Wilayah		Jumlah Desa	JUMLAH KK	Penduduk / JIWA	Kepadatan PDDK Jiwa/Km	Rata-Rata PDDK/ Keluarga
		Km	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peso	3 142,79	23,84	10	1 258	4 918	1,56	3,91
2	Peso Hilir	1 639,71	12,44	6	1 160	4 569	2,79	3,94
3	Tanjung Palas	1,755,74	13,32	9	4 743	18 199	10,37	3,84
4	Tanjung Palas Barat	1,064,51	8,08	5	2 079	8 031	7,54	3,86
5	Tanjung Palas Utara	806,34	6,12	6	3 407	12 118	15,03	3,56
6	Tanjung Palas Timur	677,77	5,14	8	3 933	16 035	23,66	4,08
7	Tanjung Selor	1,277,81	9,69	9	15 664	60 248	47,15	3,85
8	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74	3	3 252	11 895	19,03	3,66
9	Sekatak	1,993,98	15,13	22	2 945	11 963	5,99	4,05
10	Bunyu	198,32	1,50	3	3 959	14 614	73,69	3,69
	Jumlah	13,181,92	100,00	81	42 400	162 563	12,33	3,83

Sumber data : BPS Kabupaten Bulungan tahun 2014

Kabupaten Bulungan merupakan Kabupaten yang banyak memiliki keanekaragaman penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas migrasi. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada gambar 4.1

Kabupaten Bulungan semenjak menjadi wilayah Propinsi Kalimantan Utara pertambahan pendudukan cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tercatat untuk tahun 2013 berjumlah 122.985 Jiwa. Sedangkan tahun 2014 tercatat sebesar 126.096 Jiwa. Untuk perkembangan penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.2



Gambar 4.1 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2009 – 2014

Sumber data : BPS Kabupaten Bulungan

Tabel 4.2. Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 2012-2014

Jenis Kelamin	Tahun		
	2012	2013	2014
Laki-laki	64.529	65.579	67.312
Perempuan	56.071	57.406	58.784
Total	120.600	122.985	126.096

Sumber : BPS Kab. Bulungan

2. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bulungan

Program pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan bisa dilihat dari meningkatnya jumlah sekolah yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan. Untuk tingkat SD tahun ajaran 2014/2015 ada 129 buah sekolah dasar negeri dan 3 buah sekolah dasar swasta. Sedangkan pada tingkat SMP tahun 2015 terdapat 51 buah Sekolah negeri dan 4 buah Sekolah swasta. Pada tingkat SMU ada 9 buah sekolah

negeri dan 3 buah sekolah swasta. Untuk tingkat SMK terdapat 5 buah sekolah. Sedangkan pada tahun 2016/2017 mengalami peningkatan jumlah sekolah yaitu SD 137 Sekolah, SMP 59 sekolah, SMA terdapat 16 sekolah dan SMK terdapat 8 sekolah. Untuk lebih jelasnya jumlah sekolah berdasarkan kecamatan dan jenjang sekolah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah Berdasarkan Kecamatan dan Jenjang Sekolah Pada kabupaten Bulungan Tahun 2016

No	Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Tanjung Selor	30	6	8	5	2	3	3	
2	Tanjung Palas	18	1	6		1		1	
3	Tg. Palas Barat	9		4		1			
4	Tg. Palas Timur	13		7		1			1
5	Tg. Palas Tengah	13		5	1	1	1		1
6	Tg. Palas Utara	12		4	1	1		1	
7	Sekatak	12		4		1			
8	Bunyu	6		3		1		1	
9	Peso	11		7		1			
10	Peso Hilir	6		4					
JUMLAH		130	7	52	7	10	4	6	2

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Sementara itu untuk jumlah murid juga mengalami peningkatan. Jumlah murid pada tahun ajaran 2015/2016 tingkat SD 17.481, jenjang SMP 7.117 dan SMA/SMK 5.326. Sedangkan untuk tahun ajaran 2016/2017, jenjang SD 17.635, SMP 7.135 dan SMA/SMK 5.636. Untuk Jumlah murid tahun ajaran 2016/2017 setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Murid Setiap Kecamatan Persekolah di Kabupaten Bulungan Tahun Ajaran 2016/2017

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Tanjung Selor	5.886	2.643	1.546	1.769
2	Tanjung Palas	2.012	936	522	116
3	Tg. Pls Barat	807	398	180	
4	Tg. Pls Timur	2.081	667	100	144
5	Tg. Pls Tengah	1.441	457	86	12
6	Tg. Pls Utara	1.346	583	186	143
7	Sekatak	1.722	479	134	
8	Bunyu	1.269	470	476	83
9	Peso	586	269	139	
10	Peso Hilir	515	233		
JUMLAH		17.665	7.135	3.369	2.267

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Dengan bertambahnya sarana prasarana bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pendidikan sangat tinggi, karena hal ini semakin bertambahnya jumlah anak usia sekolah.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peran dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bulungan khususnya di bidang pendidikan masyarakat. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan. Dasar pembentukan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bulungan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 5 Nopember 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Rumah Tangga daerah dibidang pendidikan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan teknis Dinas Pendidikan dengan pengelolaan pembinaan umum, pemberian bimbingan sesuai kebijakan Bupati Bulungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan adalah “ terwujudnya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mendukung pembangunan daerah melalui Lembaga Pendidikan yang profesional.

Adapun misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang.
3. Meningkatkan Program Wajib Belajar.
4. Meningkatkan kualitas kelulusan pada semua jenjang pendidikan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan
 2. Meningkatnya tenaga pengelola pendidikan yang berkompentensi
 3. Meningkatnya daya tampung prasarana pendidikan
 4. Meningkatnya sarana dan bahan pembelajaran
 5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang tamat wajib belajar
 6. Meningkatnya SDM yang dicapai melalui pendidikan dan pelatihan serta menurunnya anak putus sekolah.
- 4. Dasar Pelaksanaan Program BOSDA**

Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Bulungan untuk satuan pendidikan ada BOS, BOSDA Provinsi, dan BOSDA Kabupaten Bulungan. Dalam penelitian ini akan mengulas kebijakan program BOSDA Propinsi dan Program BOSDA Kabupaten di Kabupaten Bulungan, yang digabung menjadi BOSDA. Program BOSDA merupakan turunan dari program pemerintah pusat yaitu BOS dan merupakan bentuk program yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bulungan untuk pelaksanaan operasional di bidang pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga untuk mencegah anak putus sekolah dan menekan pembiayaan pendidikan yang mahal. Sebagai dasar acuan pelaksanaan program BOSDA, khususnya yang terkait dengan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari produk-produk kebijakan berikut :

1. Kebijakan yang tertinggi adalah Undang Undang Dasar 1945 Amandemen. BAB XIII, PENDIDIKAN Pasal 31 mengamanatkan, bahwa :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, menyatakan bahwa :

Pertama, wajib belajar pendidikan dasar diarahkan agar diikuti oleh semua warga Negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Dasar dan berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat dan/atau setara.

Kedua, pembiayaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

3. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan operasional pendidikan yang di dalamnya juga mengatur tentang hal pembiayaan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (2) Pasal 11 pada Bagian Keempat tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”*
4. PP Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Ayat (1) Pasal 9 Bab VI tentang Penjaminan Wajib Belajar mengamanatkan bahwa *“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajara minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”*
5. Bersinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Gratis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan.

5. Ketentuan Pelaksanaan Program BOSDA

Dalam pelaksanaa program BOSDA, sekolah mengacu pada ketentuan-ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan dana biaya operasional sekolah daerah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan pelaksanaan program BOSDA yang diatur dalam petunjuk teknis

penggunaan dana BOSDA yang sekaligus merupakan indikator kesesuaian implementasi di sekolah.

a. Tahap Persiapan

Pelaksanaan program BOSDA yang diberikan pada satuan pendidikan mengedepankan aspek transparansi di tingkat sekolah. Sebelum program ini direalisasikan dan digunakan oleh sekolah, perlu merumuskan langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan. Tahap persiapan tersebut yang harus dilakukan adalah pembentukan tim pengelola pada Dinas Pendidikan dan tim pengelola pada satuan pendidikan.

Tim pengelola pada Dinas Pendidikan terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, 3 (empat) orang koordinator yang membidangi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, dan membidangi SMA/MA/SMK, dan tim verifikasi untuk masing-masing bidang. Dimana tim pengelola tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan.

Tim pengelola pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Meminta dan menerima data sekolah dan siswa
2. Menetapkan sekolah penerima dana BOSDA
3. Menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah
4. Melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana BOSDA
5. Menetapkan waktu penyaluran dana sekolah penerima dana yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah penerima dana BOSDA
7. Menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan oleh sekolah
8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Struktur tim manajemen pengelola BOSDA tingkat sekolah terdiri dari:

1. Penanggung jawab oleh Kepala Sekolah
2. Anggota, terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara Sekolah dan 1 (satu) orang pengurus Komite Sekolah yang bukan pegawai di sekolah.

Tim manajemen pengelola BOSDA pada tingkat sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada tertib administrasi dalam tahap persiapan yang harus dilakukan ditingkat sekolah, yaitu membuat SK Kepala Sekolah tentang Tim Manajemen BOSDA Tingkat Sekolah. Selain itu juga perlu diperhatikan adalah masuknya unsur masyarakat dalam hal ini yang masuk dalam susunan pengurus komite sekolah dalam susunan tim sekolah, yang bertujuan agar pelaksanaan program BOSDA dikelola lebih transparan.

Tugas dan tanggung jawab tim manajemen pengelola BOSDA di tingkat sekolah meliputi:

1. Memberikan data siswa yang valid dan akurat
2. Menyusun RAPBS/RKAS berdasarkan hasil rapat sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

3. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan tersebut ke Tim Pelaksana Penyedia BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan melalui bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
4. Menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan pada standarisasi harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan secara transparansi dan bertanggungjawab.
5. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan (RAPBS/RKAS) kepada seluruh komponen. Hal ini dilakukan dengan cara wajib menempel rekap RKAS di papan pengumuman sekolah.
6. Membuat laporan administrasi setiap bulan (BKU, buku inventaris, dan lain-lain) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan pertanggungjawaban dana bantuan pusat dan lainnya.
8. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
10. Melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan sesuai petunjuk dan tepat waktu.
11. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini diatur mengenai aturan tentang mekanisme alokasi, mekanisme penyaluran dana, dan penggunaan dana.

1. Mekanisme Alokasi Dana BOSDA

Mekanisme Alokasi Dana BOSDA diatur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bulungan memberikan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan pendidikan Kelompok Bermain (PAUD Non Formal), TK/ RA, SD/MI, SMP/MTs/SATAP, SMA/SMK/MA, dan SLB.
- (2) Biaya operasional yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada satuan pendidikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Rp. 20.000.000,- per lembaga/ tahun untuk Kelompok Bermain (PAUD Non Formal)
 - b. Rp. 500.000,- per siswa/tahun untuk TK/ RA (minimal siswa dihitung 50 orang)
 - c. Rp. 525.000,- per siswa/tahun untuk SD/SDLB/MI (minimal siswa dihitung 70 orang)
 - d. Rp. 550.000,- persiswa/tahun untuk SMP/MTs (minimal siswa dihitung 90 orang)
 - e. Rp.1.000.000,- persiswa/ tahun untuk SMA/ MA/ SMK.

f. Rp. 800.000,- persiswa/ tahun untuk SLB (minimal siswa dihitung 70 siswa)

2. Mekanisme Penyaluran Dana BOSDA

Mekanisme penyaluran dana BOSDA ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai berikut :

(1) Tahapan Penyaluran dana oleh Tim Pelaksana Penyediaan

BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan pada pasal 3 meliputi beberapa tahap yaitu :

- a. Pendataan siswa.
- b. Validasi data oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan.
- c. Perhitungan dana penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan.
- d. Pengajuan pencairan dana BOSDA ke BPKAD setelah RKAS/laporan penggunaan dana BOSDA diterima dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan.
- e. Penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah/satuan pendidikan secara langsung setelah SP2D masing-masing satuan pendidikan diterima dan diproses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

- f. Penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban satuan Pendidikan penerima BOSDA kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan sesuai jadwal.
- (2) Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sesuai dengan perundangan yang berlaku berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana setelah SP2D sekolah yang bersangkutan cair.
- (3) Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan swasta dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana setelah SP2D sekolah yang bersangkutan cair.
- (4) Untuk kasus atau keadaan khusus dimana Kepala Sekolah selaku penanggung jawab di satuan pendidikan yang menerima BOSDA berhalangan, maka pengambilan dana dapat dilakukan Bendahara sekolah/ Guru yang diberi mandat secara langsung sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku.
- (5) Pihak pemerintah Kabupaten Bulungan, Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan, Tim Pengelola Sekolah serta Pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA

yang diperuntukan bagi satuan Pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

3. Mekanisme Penggunaan Dana BOSDA

Untuk mekanisme penggunaan dana BOSDA dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS/ RKAS yang telah disusun
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk di biyai oleh lebih dari satu sumber pendanaan sehingga mengakibatkan double pembiayaan.
- (3) Sumber Pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana APBN, dana BOSDA Provinsi, dana BOSDA Kabupaten dan dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (4) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran untuk dipinjamkan kepada siswa.
 - b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan

tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan lainnya yang relevan).

c. Pengadaan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan

d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa misalnya pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR, dan sejenisnya (untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka mengikuti lomba yang tidak didanai oleh panitia lomba, dsb)

e. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan soal, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum (misalnya pengadaan bahan/ peralatan yang dibutuhkan, honor panitia ujian, honor mengoreksi soal, dan honor Guru dalam penyusunan rapor siswa)

f. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah

g. Biaya langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, perangko, materai, ongkos

kirim, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Khusus sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset / panel surya dan biaya operasionalnya

- h. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran
- i. Pembayaran honorarium bulanan meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/ laboran/ instruktur, dsb (yang diangkat sekolah dan belum dibiayai oleh lembaga tertentu), dan kelebihan mengajar bagi Guru PNS.
- j. Pengembangan profesi Guru meliputi KKG/MGMP, KKKS/MKKS, dan inhouse training,
- k. Pemberian bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, dan bantuan sosial lainnya.
- l. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan

silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang dibiayai adalah pengadaan bahan/peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi Penyusun/ Guru).

m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD/MI, dan 2 set untuk SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Komputer yang dibeli tersebut harus berada di sekolah untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

(5) Penggunaan dana BOSDA untuk operasional sekolah terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu ;

a. Sekolah Negeri (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/Satap, SLB, dan SMA/MA) :

Belanja Pegawai 30%, Belanja barang dan Jasa 50%, dan Belanja Modal 20%.

b. Sekolah Negeri (SMK) :

Belanja Pegawai 30%, Belanja barang dan Jasa 40%, dan Belanja Modal 30%.

c. Sekolah swasta (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/Satap, dan SMA/MA)

Belanja Pegawai maksimal 40% dari total Penerimaan BOSDA.

d. Lembaga Pendidikan PAUD Non Formal (Kelompok Bermain)

Menyesuaikan dengan pembelanjaan yang sudah dirancang oleh Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

- (6) Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus didasarkan pada keputusan bersama antara Tim Pengelola BOSDA, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus tertuang secara tertulis sebagai hasil keputusan rapat.
- (7) Seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana BOSDA wajib menggunakan standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
- (8) Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat 4, harus dikonsultasikan dengan Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan secara **tertulis** untuk dapat dipertimbangkan dan dipertanggung jawabkan.
- (9) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Pelaksanaan Implementasi Program BOSDA Pada Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan, dan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan.

Informasi yang diperoleh dari informan tentang implementasi program BOSDA pada SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, peneliti dalam melakukan penelitian adalah dengan cara wawancara mendalam yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhinya yaitu Komunikasi (Commuucation), Sumberdaya (reseuces), Sikap, (disposition atau (attitudes), dan Struktur Birokrasi, (bureucratic structure) berdasarkan dengan model implementasi kebijakan Edward III (Leo Agustino 2006; 150).

Data dan wawancara secara mendalam telah diambil dan dikumpulkan dari SMAN 1 Tanjung Selor, dan SMAN 2 Tanjung Selor melalui tim pengelola BOSDA pada sekolah tersebut. Selain itu data juga diambil dan dikumpulkan dari tim manajemen BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Setelah terkumpulnya data berikut ini disajikan gambaran deskripsi implementasi program BOSDA pada SMA tersebut dan kemudian dari hasil penelitian ini juga akan dibahas bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA pada sekolah tersebut yang sesuai dengan teori Edward III yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BOSDA pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan dari aspek komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan kecenderungan-kecenderungan (disposisi).

Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan yang sesuai dengan empat variabel tersebut diatas dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelibatan informan yang peneliti anggap lebih mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang diteliti dalam hal ini terkait dengan BOSDA. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari: PPTK BOSDA SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, guru, yang menerima dampak keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dari setiap informan tersebut dilakukan identifikasi untuk mengenal lebih dekat masing-masing informan untuk memahami setiap karakteristik informan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal sesuai dengan tingkat kebutuhan peneliti. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan pertanyaan tentang sejauhmana implementasi kebijakan program BOSDA ini terdapat kendala dalam hal penyaluran dana ke satuan pendidikan jenjang SMA, yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini pelaksanaan program BOSDA ini yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah harus memang jeli dan teliti dalam penyaluran dana BOSDA ke sekolah apakah sesuai penggunaannya atau tidak. Terlebih lagi SPJ-nya yang dikirim ke Dinas Pendidikan lebih cepat, cepatlah kita salurkan dananya ke Sekolah. (wawancara tanggal, 16 Januari 2017 - SD.W.02.01)

Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, seperti yang dikatakan informan yaitu bapak Amar Mulia, S.Pd adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya semua stake holder yang terkait dengan program BOSDA tidak mengalami kendala atau hambatan dalam penyaluran dananya..toh dana disalurkan melalui rekening sekolah. Karena kita dari Tim Manajemen BOSDA telah melakukan sosialisasi dengan mengundang sekolah SMA negeri dan swasta yang kita kumpulkan jadi satu. (wawancara tanggal, 17 Januari 2017 – KOM.W.03.05).

Dari hari wawancara tersebut diatas, bahwa implementasi program BOSDA jenjang SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tidak menemui kendala dalam hal penyaluran dana BOSDA. Apabila penggunaan dana yang dikelola oleh satuan pendidikan sudah memenuhi dan sesuai petunjuk teknis yang ada maka penyaluran dana BOSDA pun akan segera disalurkan ke satuan pendidikan melalui

rekening sekolah yang diberikan. Dengan adanya kerjasama yang baik dari tim manajemen BOSDA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dengan setiap sekolah jenjang SMA akan memudahkan pelaksanaan program BOSDA dan kesesuaian penggunaan dananya.

Akan tetapi, guna mendukung pelaksanaan program BOSDA ini dibutuhkan kesiapan dan komitmen satuan pendidikan dalam pengelolaan dananya dengan tidak ada melakukan pungutan yang memberatkan siswa dalam hal ini masyarakat.

Seperti dikutip oleh Winarno (2002), bahwa implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Program Bosda jenjang SMA di Kabupaten Bulungan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan apakah berjalan efektif dan efisien bila ditinjau dari segi sikap dan kemauan dari satuan pendidikan jenjang SMA terutama yang menjadi lokus penelitian adalah SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor. Seperti yang diucapkan oleh Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd menyatakan bahwa :

Menurut saya sudah sesuai dan sangat membantu biaya operasional sekolah dalam hal pembiayaan kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh Dinas Pendidikan, seperti OSN, O2SN dan kegiatan lainnya. Walaupun sekarang ini anggaran yang sedikit menurun akan tetapi program BOSDA dapat tetap diberikan dengan cara

mengurangi jumlah siswa yang siswanya banyak disekolah tersebut. (Wawancara, tanggal 16 Januari 2017-D.W.02.02).

Selanjutnya menurut Kabid Pendidikan Menengah, Bapak Amar Mulia, S.Pd memaparkan, sebagai berikut :

Program ini sudah sangat memenuhi harapan kita semua dan orang tua sangat terbantu karena tidak ada lagi pembiayaan yang dibebankan ke orang tua. Orang tua hanya memikirkan bagaimana anaknya bisa lulus dan berprestasi. Akan tetapi orang tua juga tidak lepas tangan dalam pendidikan anaknya. Jangan mentang-mentang gratis sudah lepas tangan dengan pendidikan anaknya. Orang tua juga membiayai seragam anaknya saja dan sepatu. Jangan semuanya dibebankan ke Pemerintah (Wawancara tanggal, 17 Januari 2017 – SD.W.03.02).

Begitu pula yang disampaikan oleh perwakilan dari orang tua murid, yaitu Komite Sekolah dari SMAN 1 Tanjung Selor mengenai tujuan dari penggunaan dana BOSDA (Bapak H. Sukardin, S.Pd) :

Program BOSDA sudah sangat membantu kegiatan sekolah hal ini terlihat dengan tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh masyarakat, walaupun ada sekolah rapatkan bersama para orang tua, hanya saja penggunaanya perlu dievaluasi (Wawancara tanggal, 26 Januari 2017– SD.W.10.02).

Pada saat penelitian ini dilakukan ada perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang pendidikan yaitu bahwa pendidikan Menengah yaitu SMA/SMK diambil kewenangannya oleh Pemerintahan Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi karena pada tahun berjalan 2016, peneliti sudah mengumpulkan data dari beberapa narasumber seperti pada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang BOSDA dan BOSPROP.

Dengan adanya perubahan kewenangan ini yang berlaku Januari 2017, Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak lagi mengalokasikan Anggaran BOSDA pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK Kabupaten Bulungan, sehingga Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK hanya menerima dana BOS, dan BOS Propinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi karena sudah mengumpulkan data dari bulan Desember 2016, data BOSDA dan BOSDA Provinsi peneliti sajikan untuk perbandingan data penerimaan dana BOSDA tahun 2017.

Mekanisme penyaluran dana BOSDA dan BOSDA Provinsi Kalimantan Utara semuanya melalui kas daerah Kabupaten Bulungan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan adanya perubahan kewenangan ini dana BOSDA Provinsi Kalimantan Utara untuk Kabupaten Bulungan langsung ditransfer ke Rekening Sekolah jenjang SMA.

Pada situasi yang ada, peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.Pd tentang Kabupaten Bulungan tidak lagi mengalokasikan anggaran BOSDA kabupaten Bulungan dan beliau menanggapi sebagai berikut :

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memang tidak lagi mengalokasikan anggaran BOSDA Kab, dan sekolah hanya menerima BOS Propinsi itupun tidak melalui kita lagi, melainkan langsung dari Propinsi. Sebenarnya hal ini meringankan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, akan tetapi bagaimana ditingkat sekolah, tapi kita akan melaksanakan peraturan ya harus kita jalankan. Dengan diambilnya SLTA ke provinsi mudahkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan lebih maju (Wawancara tanggal, 16 Januari 2017 – SB.W.02.01).

Pada kesempatan lain, peneliti juga melakukan wawancara pada Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor, Bapak Budi Nirwana, S.Pd yang menyatakan sebagai berikut :

Dana BOS, BOSDA, BOSPROP yang semula diterima oleh sekolah apabila ditotal 3.400.000, sekarang kita hanya terima 2.400.000 persiswa. Hal ini sangat menyulitkan kami untuk membiayai kegiatan baik itu untuk belanja pegawai, modal dan ATK. Untung saja Dinas Provinsi menyanggupi untuk membayar gaji guru kontrak. Tapi hal ini sangat menyulitkan untuk pembiayaan kegiatan sekolah dan banyak kegiatan yang biayanya dikurangi (Wawancara tanggal 23 Januari 2017 – SD.W.05.01).

Senada yang dikomentari oleh Kepala SMAN 1 Tanjung Selor, Bapak Sunjono, S.Pd, yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya perubahan kewenangan, dana yang kami terima sangat kurang, karena banyak untuk membiayai belanja pegawai. Otomatis banyak biaya yang kami kurangi untuk menutupi kegiatan yang lain. Lagian banyak kegiatan yang tidak dibiayai maka harus kami siasati bagaimana kegiatan dapat berjalan. Kita mau melakukan rapat orang tua untuk ada sumbangan takut dibilang pungli. Serbasalah jadinya (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – SD.W.04.01).

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya perubahan tersebut sekolah jenjang SMA yang semula mendapat pembiayaan sekolah ada 3 sumber menjadi 2 sumber jelas sekolah kebingungan dalam hal pengelolaan dana yang ada sangat terbatas dan tidak dapat berbuat banyak dalam pembiayaan operasional sekolah.

Dengan melihat keadaan tersebut, peneliti akan menganalisa bagaimana implementasi program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat program BOSDA dengan menggunakan teori Edwars III

yang ada beberapa indikator antara lain komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan kecenderungan-kecenderungan (disposisi).

2. Tahap Persiapan BOSDA

Pelaksanaan implementasi program BOSDA, ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh pada tim manajemen tingkat kabupaten maupun tingkat sekolah. Persiapan ini terdiri dari pembentukan tim manajemen dan melaksanakan sosialisasi program BOSDA. Pembentukan tim manajemen sekolah meliputi antara lain susunan tim dan unsurnya dan mekanisme pembentukan tim. Sedangkan diskripsi tentang sosialisasi akan digambarkan dengan bagaimana pelaksanaan, waktu, materi, dan sasaran sosialisasi pada tingkat kabupaten, komisariat, dan sekolah.

a. Tim manajemen BOSDA

Langkah pertama dalam pengelolaan dana BOSDA sekolah terlebih dahulu dapat membentuk Tim BOSDA dengan susunan tim personil sesuai dengan petunjuk teknis. Susunan tim yang terdiri dari penanggung jawab, dan bendahara merupakan tim inti. Tim inti tersebut biasanya dibantu oleh Tenaga tata usaha yang bisa mengoperasikan komputer. Operator ini tugasnya adalah untuk menginput jumlah siswa. Data di lapangan ditemukan bahwa tenaga tata usaha tersebut merupakan tenaga honorer yang membantu bendahara. Bendahara yang masuk dalam tim BOSDA juga bukan dari pegawai tata usaha yang PNS melainkan seorang Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOSDA.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan bendahara BOSDA SMAN 1 Tanjung Selor, tentang sumber daya dalam pengelolaan BOSDA yang menyatakan sebagai berikut :

Saya merupakan guru BP yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOSDA. Jujur mba, sebenarnya kami sangat kekurangan tenaga karena banyaknya kegiatan sekolah. Jadi tidak ada satu orang pertugas khusus yang mengelola BOSDA. Saya dibantu dengan operator untuk menginfut data selain itu operator tersebut juga diberikan tugas lain, sehingga tidak fokus. Itupun operator tersebut bukan dari pegawai TU yang PNS melainkan tenaga honor yang diangkat oleh Kepala Sekolah. Saya sebenarnya ingin mengundurkan diri jadi bendahara mengingat tugas saya sebagai guru BP dan mengerjakan laporan BOSDA saya dituntut cepat penyelesaiannya. Jadi saya sangat kewalahan. Tapi Kepala Sekolah menginginkan saya jadi Bendahara ya harus dijalani. Ini sudah tahun ketiga saya sebagai bendahara (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – SD.W.06.01).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa susunan Tim Bosda di sekolah dari tahun ke tahun sama hal ini dikarenakan unsur kepercayaan dari Kepala Sekolah terhadap seorang guru. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa sekolah juga masih kekeurangan sumber daya dalam pengelolaan dana BOSDA selain itu tidak ada regenerasi tim sehingga yang melakukan orangnya selalu itu saja.

Sejalan dengan tim dari sekolah yang lain yaitu SMAN 2 Tanjung Selor yang merupakan bendahara tim BOSDA yang menyatakan bahwa :

Saya selalu dibantu oleh pertugas operator untuk mengentry data. Sehingga apabila ada pertemuan tehknis operator selalu dibawa untuk mengetahui bagaimana sistem pendataan dan pengelolaan dana BOSDA. Yang menjadi kendala kami adalah operator kami merupakan tenaga honorer sehingga apabila berhenti selalu berganti orang. Kami memang tidak bisa membayar honor mereka sesuai UMR di karenakan adanya

aturan dalam pembayaran belanja pegawai dalam anggaran BOSDA (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 – SD.W.07.01).

Dari wawancara di atas juga dapat keterangan sistem pembayaran honor operator yang masih dibawah UMR sehingga menyebabkan operator tidak bertahan lama di sekolah dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru.

Tim manajemen BOSDA seharusnya melibatkan komite sekolah, akan tetapi fakta di lapangan setelah melihat SK tim susunan anggota tidak terdapat unsur komite sekolah. Tujuan untuk mencantumkan komite sekolah dalam tim adalah agar pengelolaan BOSDA lebih transparan penggunaannya. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Selor, menyatakan bahwa :

Kami tidak memasukkan komite sekolah ke dalam tim manajemen BOSDA sebagai perwakilan dari unsur orang tua. Dalam susunan tim tidak banyak melibatkan orang karena semakin banyak orang akan mempersulit urusan. Selain itu dari tim Kabupaten pengurus tim di sekolah diserahkan kepada kepala sekolah. Orang yang terlibat tidak susah dan fleksibel saja. Komite sekolah tidak kami libatkan akan tetapi dia berperan pada tahap perencanaan yaitu penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – SB.W.04.01).

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Komite Sekolah tidak dimasukkan dalam tim BOSDA akan tetapi dalam penyusunan perencanaan program kerja dan penyusunan anggaran sekolah (RKAS) komite mengetahuinya.

Dari penjelasan tentang tim manajemen BOSDA, tim BOSDA rata-rata belum memiliki kompetensi yang memadai sebagai

pengelola BOSDA. Ada hal menarik lain yang terkait dengan tim manajemen BOS sekolah, yaitu mengenai kompetensi personal tim. Pada umumnya ditemukan bahwa warga sekolah belum memiliki kompetensi yang memadai. Akan tetapi dalam mengelola dana BOSDA tim mengaku sambil berjalan dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.

Dalam pengelolaan dana BOSDA, kesulitan yang dihadapi adalah masalah membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam pembuatan laporan sering terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan kesalahan tersebut diketahui setelah ada monitoring dari tim manajemen BOSDA Kabupaten dan tim manajemen BOSDA dari Propinsi maupun dari tim insfektorat atau lembaga pemeriksa keuangan yang berwenang.

Usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pemilihan tim yang dipercaya oleh kepala sekolah dan dianggap mampu untuk mengelola dana BOSDA. Karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab program BOSDA, maka dia berhak untuk menunjuk seseorang yang dipandang mampu sebagai bendahara BOSDA.

Penunjukan bendahara BOSDA yang dilakukan oleh satuan pendidikan diambil dari tenaga Tata Usaha (TU) baik yang PNS maupun Non PNS dan ada yang mengambil dari guru mata pelajaran sebagai bendahara. Hal ini dilakukan karena kurangnya personil di sekolah.

Pada waktu peneliti melakukan penelitian ke sekolah, SMAN 1 Tanjung Selor mengangkat guru BP sebagai Bendahara sedangkan SMAN 2 Tanjung selor mengangkat Guru Geografi sebagai bendahara.

Dari wawancara yang telah dilakukan dan bendaharanya merupakan guru BP sebenarnya pertama kali sebagai bendahara BOSDA belum pernah mengurus masalah keuangan, akan tetapi seiring berjalannya waktu sambil berjalan untuk belajar meningkatkan kemampuan dan kompetensinya mengelola BOSDA. Tuposinya sebagai seorang guru tetap dapat dijalankan dengan baik.

Kemudian dari keterangan Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor, memang seharusnya yang menjadi bendahara adalah pegawai tata usaha PNS. Tetapi sekolah kami tidak berdaya dengan aturan tersebut sehingga kami menunjuk guru untuk ditugaskan menjadi bendahara BOSDA. Adapun untuk gambaran yang ditunjuk sebagai bendahara BOSDA untuk setiap satuan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Gambaran Tim Personil Bendahara BOSDA

NO	Sekolah	Bendahara BOSDA	Keterangan
1	SMAN 1 Tanjung Selor	Guru BP	Kurang tenaga TU
2	SMAN 2 Tanjung Selor	Guru Geografi	Kurang tenaga TU

Sumber : Data Sekolah

Tim BOSDA yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah harus diterbitkan Surat Keputusan (SK) kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk melegalkan tugas tambahan yang diluar tugas pokok pegawai di sekolah. Begitu juga tim BOSDA yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di terbitkan SK kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dari data yang di dapat tim BOSDA di Kabupaten Bulungan terdiri dari :

1. Pembina
2. Penanggung Jawab
3. Koordinator Tim BOSDA
4. Bendahara
5. Tim Verifikasi PAUD
6. Tim Verifikasi Pendidikan Dasar
7. Tim Verifikasi Pendidikan Menengah.

Adapun tim manajemen BOSDA ditingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk wilayah Kabupaten Bulungan terdiri :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua tim pelaksana
4. Bendahara
5. Penanggung BOSDA Dikdas
6. Penganggung Jawab Data BOSDA SMA
7. Penganggung Jawab Data BOSDA SMK
8. Tim Dapodikdasmen

9. Tim Monev
10. Unit Publikasi/Humas
11. Unit verifikasi Laporan

Pada saat penelitian ini dilakukan semua semua sekolah telah menerbitkan SK tim BOSDA yang namanya tercantum dalam SK harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah paham dan menerapkan peraturan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis BOSDA.

b. Koordinasi tim manajemen

Koordinasi antar pengelola BOSDA di Kabupaten Bulungan dengan satuan pendidikan perlu dilakukan dan merupakan hal yang sangat penting. Pada saat Dana BOSDA dikucurkan melalui anggaran Kabupaten hal ini tidak menjadi hal yang sulit karena dapat dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Akan tetapi setelah terjadi perubahan kewenangan langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga rentang kendalanya sangat panjang. Koordinasi antara satuan pendidikan langsung pada tim manajemen dari Dinas Pendidikan Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Hal ini terlihat dari keadaan geografis sekolah yang berjauhan.

Sebenarnya sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan sangat beruntung karena langsung berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Jadi untuk permasalahan komunikasi tidak ada masalah.

Mendapatkan keterangan dari Kepala Sekolah SMAN 2

Tanjung Selor, yang mengatakan bahwa :

Untuk masalah komunikasi kami tidak ada masalah begitupun waktu kami masih sama Kabupaten. Kami cepat mendapatkan informasi dan kami pun kalau ada masalah kami langsung ke kantornya untuk menyelesaikan permasalahan dan cepat memperbaikinya. Dan apabila saya deluan mendapat informasi sayapun segera menginformasikan keteman-teman sekolah yang lain (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 – KOM.W.05.01).

Dari keterangan tersebut untuk masalah komunikasi dan transformasi informasi sangat cepat didapat oleh satuan pendidikan.

Begitu juga keterangan yang diperoleh dari Kabid Pendidikan

Menengah yang menyatakan :

Sebenarnya sesuatu itu jangan dipersulit bagi orang yang mempermudah urusannya dan jangan terkungkung dengan jarak. Apabila ada masalah dan bagi yang sekolahnya jauh kan ada dana BOSDA, itukan bisa dipakai untuk konsultasi ke kantor, apakah itu untuk menyampaikan laporan dan pembuatan RKA bagi yang belum paham, apalagi kan ada HP (Wawancara tanggal, 17 Januari 2017 – KOM.W.03.02).

Senada yang diungkapkan oleh PPTK BOSDA Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang menyatakan bahwa :

Untuk komunikasi tidak ada masalah. Informasi dengan segera kami sampaikan melalui telepon dan kami kirimkan melalui email. Sebenarnya yang menjadi masalah ada penggunaan dana BOSDA itu sendiri oleh sekolah, sesuai atau tidak penggunaannya”. (Wawancara tanggal, 13 Januari 2017 – KOM.W.01.01).

Selanjutnya keterangan dari narasumber bendahara SMAN 1

Tanjung Selor, yang berpendapat bahwa :

Seharusnya ada kegiatan rutinitas sekali atau pertiga bulanlah, untuk mengevaluasi apa yang telah kami laporkan, supaya ada

persamaan persepsi antar sekolah mengenai pembuatan laporan untuk mengimplementasikan program BOSDA (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – KOM.W.06.01).

Dari pernyataan para informan tersebut, untuk mengimplementasikan program BOSDA, perlu dilakukan pertemuan selain melalui komunikasi lewat jalur telepon, tetapi perlu juga pertemuan untuk melakukan komunikasi intensif dalam rangka mengevaluasi kinerja sekolah dalam rangka membuat laporan dana BOSDA.

c. Sosialisasi Program BOSDA

Tahapan penting dalam persiapan program BOSDA adalah melakukan sosialisasi yang terkait dengan program BOSDA. Sosialisasi ini merupakan langkah awal untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan juknis dan aturan program BOSDA. Sosialisasi juga merupakan awal dari sarana komunikasi bagi sistem birokrasi untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan.

Sosialisasi BOSDA pada tingkat Kabupaten hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Hal ini karena terkait dana yang disediakan oleh Kabupaten memang minim. Ditingkat Provinsi juga melakukan sosialisasi dimana yang dipanggil adalah Tim manajemen BOSDA kabupaten, Bendahara Bosda dan kepala Sekolah. Setelah tim manajemen Kabupaten mendapatkan informasi terkait dana BOSDA selanjutnya melakukan sosialisasi ke sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan.

Sosialisai pada tingkat Kabupaten ini bertujuan untuk menyiapkan data persekolah melaksanakan Program BOSDA. Dimana tim propinsi mengalokasikan dana untuk Kabupaten. Sehingga Tim Kabupaten yang mengelola dana untuk ditransfer ke sekolah. Setelah terjadi perubahan kewenangan Kabupaten tidak lagi mengelola pendidikan menengah sehingga kewenangan program BOSDA ini langsung ditangani oleh propinsi.

Adapun untuk materi sosialisasi pada tingkat Kabupaten lebih bersifat teknis seperti halnya tentang sistem perpajakan, pembukuan dan sistem pelaporan serta menyampaikah informasi yang tidak ada dalam juknis.

Pernyataan seorang informan, yaitu bendahara BOSDA dari SMAN 2 Tanjung Selor mengatakan bahwa :

Sosialisasi dari Kabupaten awal tahun memang sudah dilakukan dan hanya sekali saja. Katanya sih karena dana yang terbatas, dan tim Kabupaten hanya menanggung konsumsi saja. Sehingga sekolah menanggung biaya transportasi dan uang penginapan bagi sekolah yang jauh. Akan tetapi setelah pendidikan menengah diambil oleh propinsi, sosialisasi dilaksanakan di Tarakan yang semuanya kami ditanggung oleh provinsi". (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 – KOM.W.07.02).

Senada yang dinyatakan oleh bendahara SMAN 1 Tanjung Selor yaitu:

karena waktu sosialisasi yang cukup singkat, materi yang diberikan sebatas contoh-contoh RKA, contoh laporan dan cara membuat SPJ yang benar dan kami harap ada komunikasi selanjutnya diluar sosialisasi (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – KOM.W.06.02).

Dari pernyataan di atas, sosialisasi yang dilakukan ditingkat Kabupaten masih belum cukup karena hanya dilakukan satu kali saja selama setahun. Sehingga seperti pernyataan sebelumnya pengelola

BOSDA dalam mengelola dana tersebut sambil jalan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya.

Mendapat informasi dari tim manajemen BOSDA kabupaten yang menerangkan Bapak Amar Mulia, S.Pd (Kabid Pendidikan Menengah):

Memang kita hanya melaksanakan sosialisasi hanya sekali tapi kita tidak menutup kemungkinan bagi sekolah yang ingin bertanya tentang BOSDA. Kami melayani apabila mereka datang ke kantor dan lewat telponpun kita layani, untuk struktur birokrasi yang ada sudah berjalan dengan efektif (Wawancara tanggal, 17 Januari 2017 – SB.W.03.01).

Dari pernyataan tersebut juga menerangkan dan pernyataan di atas sebelumnya bahwa komunikasi pada tim manajemen kabupaten sangat nyaman dan informasi yang diberikan juga sangat cepat diterima oleh sekolah.

Sekolah juga wajib melakukan sosialisasi internal di sekolah yang ditujukan kepada masyarakat (orang tua) dan para guru yang dilakukan pada saat rapat komite sekolah. Adapun hal yang perlu disampaikan adalah tentang sumber dana pembiayaan di sekolah dan besarnya dana BOSDA yang diterima di sekolah serta rencana penggunaan dana. Tetapi hal ini ditekankan kepada masyarakat jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa semuanya bisa dibiayai dengan dana BOSDA. Karena hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan adanya dana BOSDA berarti biaya sekolah gratis sehingga bebas dari biaya pungutan lainnya.

BOSDA yang menjadi sumber pendapatan sekolah. Selain itu juga menginformasikan kepada para guru alokasi pembiayaan sekolah mulai dari ATK, pembiayaan honor guru PTT dan Staf operator maupun TU non PNS, belanja modal untuk keperluan sekolah serta membiayai kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber yaitu seorang guru SMAN 1 Tanjung Selor, bahwa :

Sosialisasi dilakukan pada saat ada rapat guru yang diampaikan oleh kepala sekolah tentang dana BOSDA. Hal ini disampaikan agar para guru tau bahwa kita tidak melakukan pungutan kepada siswa. Toh walaupun itu dilakukan dan tidak ada dana untuk kegiatan tersebut kita rapatkan pada komite sekolah berserta para orang tua (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – KOM.W.08.01).

Seperti juga disampaikan oleh guru SMAN 2 Tanjung Selor yaitu :

Rapat para guru tentang dana BOSDA dilakukan pertriwulan. Para guru harus tau tentang dana BOSDA karena masyarakat beranggapan dengan adanya sekolah gratis mereka sangat kritis apabila ada pungutan. Jadi kami harus dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua tentang kebutuhan yang tidak bisa dibiayai dengan dana BOSDA, sehingga para masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan sekolah, seperti halnya menghadapi ujian misalnya ada penambahan jam belajar, biaya perpindahan yang memerlukan tambahan dana. Sehingga kami pihak sekolah perlu mengundang orang tua untuk musyawarah sekolah terkait hal tersebut (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 – KOM.W.09.01).

3. Tahap Pelaksanaan BOSDA

Pada tahap pelaksanaan dana BOSDA meliputi kegiatan pengajuan, penggunaan dana dan pelaporan.

a. Pengajuan dan penyaluran dana BOS

Dalam pengajuan dana BOSDA, terlebih dahulu sekolah melakukan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa yang disampaikan kepada Tim Manajemn BOSDA Kabupaten. Karena alokasi dana yang dikucurkan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada maka tim manajemen Kabupaten mengurangi jumlah siswa yang siswanya banyak sehingga alokasi dana BOSDA cukup.

Adapun untuk alokasi dana BOSDA dari Kabupaten pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.766.000.000 sedangkan BOSDA dari Provinsi Kalimantan Utara untuk Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 5.632.500.000. Adapun alokasi dana BOSDA persekolah dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Alokasi dana BOSDA setiap sekolah bantuan keuangan Kabupaten Bulungan dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

NO	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah BOSDA Diterima Keuangan Kabupaten	Jumlah Siswa	Jumlah BOSDA diterima Dari Keuangan Provinsi
1.	SMAN 1 Tg. Selor	656	656.000.000	649	649.000.000
2.	SMAN 2 Tg. Selor	104	104.000.000	125	125.000.000
3	MAN Tg. Selor	203	203.000.000	195	195.000.000
4	SMAN 1 Tg. Palas	525	525.000.000	478	478.000.000
5	SMAN 1 Tg. Pls. Timur	97	97.000.000	100	100.000.000
6	SMAN 1 Tg. Pls Barat	146	146.000.000	120	120.000.000
7	SMAN 1 Tg. Plas Utara	168	168.000.000	148	148.000.000
8	SMAN 1 Sekatak	125	125.000.000	110	110.000.000
9	SMAN 1 Peso	140	140.000.000	115	115.000.000
10	SMAN 1 Bunyu	434	434.000.000	423	423.000.000
11	SMKN 1 Tg. Selor	669	669.000.000	650	975.000.000
12	SMKN 2 Tg. Selor	641	641.000.000	626	939.000.000
13	SMKN 3 Tg. Selor	490	490.000.000	480	720.000.000
14	SMKN 1 Tg. Palas	107	107.000.000	107	160.000.000
15	SMKN 1 Tg. Palas Utara	161	161.000.000	160	240.000.000
16	SMKN 1 Bunyu	100	100.000.000	90	135.000.000
	TOTAL JUMLAH	4.766	4.766.000.000	4.576	5.632.500.000

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Dari data tersebut di atas jelas terdapat perbedaan jumlah siswa Persekolah dan besaran alokasi dananya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencukupi alokasi dana yang tersedia Tim Manajemen Kabupaten mengecilkan jumlah siswa yang ada persekolah. Dalam menentukan jumlah siswa yang sesuai dengan lokasi dana disepakati dan disosialisasikan terlebih dahulu ke sekolah dalam rapat sosialisasi tingkat Kabupaten. Adapun untuk jumlah siswa per sekolah dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Data Jumlah Siswa SMA Persekolah se-Kabupaten Bulungan Tahun 2016

NO	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1.	SMAN 1 Tg. Selor	703
2.	SMAN 2 Tg. Selor	165
3	MAN Tg. Selor	235
4	SMAN 1 Tg. Palas	530
5	SMAN 1 Tg. Pls. Timur	100
6	SMAN 1 Tg. Pls Barat	180
7	SMAN 1 Tg. Plas Utara	186
8	SMAN 1 Sekatak	134
9	SMAN 1 Peso	140
10	SMAN 1 Bunyu	455
11	SMKN 1 Tg. Selor	675
12	SMKN 2 Tg. Selor	651
13	SMKN 3 Tg. Selor	490
14	SMKN 1 Tg. Palas	116
15	SMKN 1 Tg. Palas Utara	161
16	SMKN 1 Bunyu	100
	TOTAL JUMLAH	4.766

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Dari data di atas memang ada pengurangan jumlah siswa untuk alokasi dana BOSDA. Pengurangan jumlah siswa ini merupakan kebijakan dari Dinas Pendidikan karena sebagai pengelola dana

BOSDA. Dari data juga terlihat dana BOSDA bantuan keuangan dari Provinsi alokasi yang besar, karena terdapat jumlah besaran persiswa untuk SMK. Dimana untuk SMK jumlah persiswa dari BOSDA Kabupaten sebesar 1.000.000, sedangkan bantuan keuangan provinsi untuk SMK persiswa adalah 1.500.000. Data ini merupakan tampilan secara global. Tetapi untuk penelitian ini hanya mengambil dua sekolah yaitu SMAN 1 Tanjung dan SMAN 2 Tanjung Selor karena sekolah ini terdapat perbedaan dari jumlah siswa, kondisi sekolahnya yang berbeda, letak geografis yang mudah sehingga cukup mudah dan relatif dekat dan diharapkan komunikasi dapat berjalan dengan baik dan implementasi program BOSDA menjadi lebih efektif. Selain itu sekolah negeri secara kedinasan langsung dibawah pembinaan Dinas Pendidikan. Berkaitan dengan masalah pendataan yang dikirim oleh sekolah, tim bos Kabupaten melakukan verifikasi kesekolah dan mengecek dapodik sekolah. Setelah data diterima oleh tim dan RKA sekolah juga sudah diserahkan tim Kabupaten melakukan verifikasi RKA apakah sudah sesuai dengan petunjuk tehnis. Apabila sudah sesuai Tim Bosda membuat kwitansi untuk pencairan dan dibuatkan SP2D-nya. Yang selanjutnya dana BOSDA ditransfer langsung kerekening sekolah.

Pencairan Dana BOSDA melalui keuangan Kabupaten dicairkan persemester sedangkan pencairan dana BOSDA melalui keuangan Provinsi Kalimantan Utara untuk Kabupaten Bulungan pertriwulan. Dimana untuk setiap pencairan tahap berikutnya laporan dana BOSDA semester pertama dan triwulan pertama harus

diserahkan ke tim Kabupaten. Jadi apabila sekolah terlambat dalam membuat laporan maka dana yang diterima oleh sekolahpun lambat juga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tertib administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara SMAN 1 Tanjung Selor, terkait dengan pencairan dana tersebut adalah :

Hal ini merupakan kebijakan dari dinas pendidikan, jadi harus kita lakukan. Kamipun dari sekolah paham kenapa ini diberlakukan, karena untuk meringankan tugas sekolah, dan apabila laporan itu tidak dibuat persemester dan pertriwulan akan menumpuk laporan yang kami buat. Apabila kami tidak buat laporan dana kami untuk selanjutnya tidak keluar, kalau itu terjadi bagaimana kami membiayai operasional sekolah (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – SB.W.06.01).

Dari keterangan informan di atas, dapat dikatakan bahwa tim Kabupaten memaksa untuk membuat laporan secepatnya sehingga tidak ada penumpukan pekerjaan.

Seperti yang dikatakan oleh Tim Kabupaten yang diwakili oleh Kabid pendidikan Menengah, Bapak Amar Mulia sebagai berikut :

Menurut saya sekolah sangat lambat dalam menyerahkan laporannya, dan apabila sekolah lambat menyerahkan laporannya kami dari tim mengejar bola untuk menagih spj mereka. Bisa melalui telepon ataupun kami datang langsung ke sekolah untuk menyakan apa yang menjadi masalah mereka (Wawancara tanggal, 17 Januari 2017 – D.W.03.01).

Hal ini jelas terlihat, bahwa tim kabupaten cukup proaktif dalam melakukan dan menagih laporan setiap sekolah dan melakukan penegasan kepada sekolah.

b. Penggunaan Dana BOSDA

Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis dengan mengeluarkan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan. Dengan adanya kebijakan tersebut dikeluarkan program BOSDA untuk biaya operasional sekolah. Program BOSDA ini menjadi salah satu sumber dana pembiayaan di sekolah yang harus mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Adapun dana BOSDA ini berdasarkan petunjuk teknis dipergunakan untuk :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor

koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).

11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
12. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

Persentase penggunaan dana BOSDA baik keuangan daerah maupun keuangan provinsi adalah untuk belanja pegawai sebesar 30%, Belanja barang dan jasa 50% dan belanja modal 20%.

Karena banyaknya tenaga honor disekolah, setiap sekolah kebingungan dalam membayar tenaga honor dengan persentase hanya sebesar 30%. Tim menyarankan untuk mengambil sebagian dari BOSDA keuangan Daerah kabupaten dan sebagiannya lagi dari BOSDA keuangan Propinsi.

Adapun untuk alokasi dana BOSDA dari keuangan daerah dan keuangan propinsi dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Alokasi penggunaan dana BOSDA Tahun 2016

No	Sekolah	Belanja pegawai	Belanja barang jasa	Belanja Modal	Jumlah dana	Sumber dana
1	SMAN 1 Tg. Selor	196.800.000	328.000.000	131.200.000	656.000.000	BOSDA Keuangan Daerah
2	SMAN 1 Tg. Selor	194.700.000	324.500.000	129.800.000	649.000.000	BOSDA Keuangan Provinsi
3	SMAN 2 Tg. Selor	31.200.000	52.000.000	20.800.000	104.000.000	BOSDA Keuangan Daerah
	SMAN 2 Tg. Selor	37.500.000	62.500.000	25.000.000	125.000.000	BOSDA Keuangan Provinsi

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Dari alokasi tersebut jelas terlihat bahwa belanja pegawai yang dikeluarkan lebih besar dari belanja jasa maupun modal. Hal ini karena sekolah masih banyak kekurangan guru. Apabila menunggu penerimaan guru PNS sangat tidak memungkinkan, sehingga sekolah mengangkat guru honorer maupun TU sekolah.

Program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada sekolah untuk membatasi adanya pungutan walaupun bahasanya untuk penambahan operasional sekolah. Jadi bisa dikatakan bahwa Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah tidak mencukupi, sehingga sekolah harus pintar dalam mengatur dana BOSDA.

Pencairan dana BOSDA keuangan daerah yang dilakukan persemester apabila dilakukan rehab ringan tidak dapat terpenuhi, maka usaha yang dilakukan oleh sekolah adalah secara bertahap sesuai kemampuan dana. Seperti keterangan dari

Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor yang menyatakan bahwa :

Memang kita lakukan secara bertahap, semisalnya melakukan semenisasi lapangan memang tidak dapat selesai, maka kita usahakan secara bertahap juga. Semester pertama ketersediaan dana sekian yang dikerjakan sesuai adanya uang, kita tunggu lagi dana semester berikutnya kemudian lanjut dikerjakan. Begitu juga dana BOSDA dari keuangan propinsi yang pencairannya empat kali maka empat kali juga kita tunggu dana untuk menyelesaikan pekerjaan (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – D.W.04.01).

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan menggunakan dana BOSDA disesuaikan dengan persentasi biaya yang dicairkan setiap semester atau pertriwulan.

c. Pelaporan dana BOSDA

Pelaporan dana BOSDA baik itu dana keuangan Kabupaten maupun keuangan provinsi Kalimantan utara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tim manajemen yang seharusnya ada masuk unsur perwakilan orang tua dalam pengelolaan dana BOSDA yaitu dari komite sekolah, akan tetapi unsur tersebut tidak terlibat lebih lagi dalam hal penggunaan dananya.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa komite sekolah terlibat pada waktu sekolah akan menyusun RKAS. Dimana RKAS sekolah merinci kebutuhan dan kegiatan sekolah selama setahun dan merinci jumlah sumber dana yang akan diperoleh. Penyusunan RKAS ini ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Ketua Komite. Dengan

pelibatan komite sekolah tersebut, seorang informan yaitu bendahara SMAN 1 Tanjung Selor mengungkapkan :

Dalam pembuatan RKA, selalu kita ajukan terlebih dahulu rancangannya. Karena sekolah hanya mempunyai dana BOSDA dari Kabupaten dan Propinsi maka kami susun rancangan untuk diketahui oleh Komite sekolah. RKA itu kami buat setelah penerimaan siswa baru, jadi kita bisa prediksi jumlah siswa yang ada (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 – SB.W.06.02)

Dari penjelasan tersebut keterlibatan Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOSDA hanya sebatas pada pembuatan RKAS saja. Orang tua tidak terlibat karena sudah diwakilkan oleh Komite Sekolah dan Komite sekolah juga tidak maksimal dalam pengusulan dana serta pencairan dananya.

Selain itu mengenai ketepatan waktu dalam pelaporan dana BOSDA sangat sulit dilakukan oleh sekolah, hal ini seperti dikatakan oleh Bendahara SMAN 2 Tanjung Selor :

Kami selalu terlambat dalam pembuatan laporan dikarenakan kesibukan kami juga sebagai guru, sehingga kami kewalahan dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi harus kami kerjakan, walaupun terlambat yg penting dana berikutnya kami keluar walaupun terlambat juga kami terima (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 – D.W.06.02)

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program BOSDA

Tahapan yang paling penting dari kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang menentukan

dalam implementasi kebijakan program BOSDA di Kabupaten Bulungan antara lain terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Faktor-faktor implementasi kebijakan dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Untuk mengetahui apakah program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sudah terkomunikasikan, atau belum dapat dilihat dibawa ini, yang dikutip dari pendapat informan. Dalam hal ini juga hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan H. Jamaluddin Saleh, S.Pd mengatakan bahwa :

Kami dari Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan standar operasional pelaksanaan, akan tetapi pada saat penyaluran dana bantuan, biasanya dari sekolah terkadang tidak ada atau lambat penyampaian atau laporan secara tertulis, dari sekolah penerima bantuan, seharusnya memberikan konfirmasi kepada kami, sehingga proses penyaluran berjalan dengan semestinya (Wawancara tanggal, 16 Januari 2017 Jam 09.30 wita – KOM.W.02.01).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah dan komite sekolah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOSDA juga menjadi unsur implementor program Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini dari segi komunikasi belum maksimal. Dengan adanya peran kepala sekolah yang begitu penting. Peran kepala sekolah tersebut diantaranya mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah pembiayaan

dimana pembiayaan ini dapat disebut sebagai fungsi penganggaran. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan keuangan untuk rencana kegiatan atas sepengetahuan dan keterlibatan komite sekolah sebagai wujud keterbukaan. Dalam hal ini juga hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dengan bapak Amar Mulia, S.Pd pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa:

Kalau bicara masalah penyaluran dana BOSDA di kalangan SMA Negeri 1 dan SMAN 2 , kami dari Bidang Menengah sudah semaksimal mungkin mengenai penyaluran Bantuan Dana sekolah, akan tetapi biasanya kami juga mengalami kendala masalah administrasi sebagai laporan per/semester mestinya ada di bidang dikmen, tapi kenyataannya tidak seperti itu. itu artinya komunikasi yang tidak jalan (Wawancara tanggal, 17 Januari 2017 Jam 11.15 – KOM.W.03.03).

Hal ini juga dibenarkan oleh perwakilan orang tua dalam hal ini adalah Komite Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor Bapak H. Sukardin ketika ditanya tentang dana sosialisasi dana bantuan operasional sekolah yang menyatakan :

Penyaluran Program dana bantuan sekolah disekolah kami sudah terlaksana, akan tetapi biasanya kami juga kurangnya informasi atau komunikasi mengenai besaran jumlah bantuan yang diterima pada kami, kami juga sudah memasukan rincian apa-apa yang akan di bantu dalam sekolah kami maupun anak sekolah didik kami yang kurang mampu tetapi berprestasi dalam pendidikan. Akan tetapi biasa kami menemukan kendala keterlambatan distribusi saja dalam penyaluran (Wawancara tanggal, 26 Januari 2017 Jam 09.00 wita – KOM.W.10.01).

Dari pernyataan tersebut bahwa peran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah dan komite sekolah dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOSDA juga menjadi unsur implementor

program Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini dari segi komunikasi tidak maksimal. Dengan adanya peran kepala sekolah yang begitu penting. Peran kepala sekolah tersebut diantaranya mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah pembiayaan dimana pembiayaan ini dapat disebut sebagai fungsi penganggaran. Kepala sekolah harus melakukan perencanaan keuangan untuk rencana kegiatan atas sepengetahuan dan keterlibatan komite sekolah sebagai wujud keterbukaan pelayanan pendidikan tetapi ini tidak dilakukan.

b. Sumberdaya

Untuk mengetahui Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA Negeri 1 dan SMAN 2 Tanjung Selor dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dari aspek sumberdaya dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari informan yang bernama Ibu Yuliaty yaitu bendahara SMA Negeri 1 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang menyatakan :

Penyaluran dana bantuan oprasional sekolah tersebut masih dihadapkan pada sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia (staf) yang profesional belum memadai, sehingga berakibat banyaknya keluhan dan pengaduan dari dari pihak sekolah maupun dari komite sekolah yang menerima bantuan dana sekolah, yang terkesan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyaluran dana bantuan sekolah, persyaratan yang tidak transparan, yang membuat para pemohon bantuan dana sekolah harus kerja ekstra untuk menunggu kapan bantuan tersebut diberikan kepada pemohon sekolah yang

menerima bantuan sekolah (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017– SD.W.06.03).

Adapun hasil wawancara orang tua penerima bantuan yang mewakili orang tua siswa dengan Bapak H.Sukardin sebagai Komite Sekolah yang mengatakan bahwa:

Kalau ditanya mengenai sumber daya pada SMA Negeri 1 Tanjung Selor, sy kurang tau mengenai itu, dikarenakan yang saya tau mereka pasti paham mengenai dana BOSDA tersebut, dikarenakan mereka punya pekerjaan mengurus hal tersebut, kalau kami sebagai orang tua siswa, Cuma menerima bantuan dari pemerintah agar tidak membedakan anatar siswa yang satu dengn yang lainnya itu terbukti karna di SMA Negeri 1 Tanjung Selor tidak ada lgi pungutan dana dalam bentuk apapun. (Wawancara tanggal, 26 Januari 2017– SD.W.10.01).

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dari Komite sekolah dengan ibu Mikfatuh Jannah, S.Pd selaku komite SMAN 2 Tanjung Selor yang mengatakan bahwa :

Para guru dan pengelola dana BOSDA SMA negeri 2 Tanjung Selor yang mengelola dana bantuan operasional sekolah cukup propesional dalam hal mengelolah dana bantuan operasional sekolah baik dan berkualitas karena tugas masing-masing bidang jelas dan tepat dalam pemamfaatan dana operasional sekolah (Wawancara tanggal, 27 Januari 2017– SD.W.11.01).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Sumber daya yang tersedia, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya materil dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan dana sekolah, belum memenuhi keadaan yang semestinya dan ideal. Tuntutan peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja di lingkungan pemerintah

Kabupaten Bulungan. Sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan sampai pada tahun 2016 Dinas Pendidikan kabupaten Bulungan terkesan terburu-buru untuk membuat laporan pertanggung jawaban.

c. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan/Sikap Pelaksana)

Untuk mengetahui Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dari aspek disposisi/sikap pelaksana dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari hal tersebut dapat dicermati hasil wawancara dari Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor, yaitu Bapak Budi Nirwana, S.Pd yang mengatakan bahwa:

“kalau ditanyakan masalah pelayanan dan sikap, Dinas pendidikan pelayanannya kepada kami dari pihak sekolah sangat menerima kami dengan tangan terbuka. Malah mereka mengejar kami apa bila kami lambat dalam hal peng-spj-an (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017– D.W.04.01).

Begitu juga hasil wawancara dengan Bendahara SMAN 2 Tanjung Selor penerima bantuan BOSDA dengan Ibu Nurul yang mengatakan bahwa:

“kalau dilihat dari tanggungjawab yang kami berikan sudah sangat cepat karena kami pun ingin segera dana cair untuk percepatan kegiatan akan tetapi selalu saja ada kesalahan yang dibuat apakah itu dari segi belanja modal, belanja pegawai jadi kami selalu bolak-balik ke dinas pendidikan untuk melakukan pembetulan. Kan berat diongkos.” (Wawancara tanggal, 23 Januari 2017 Jam 09.30 wita – D.W.06.02).

Sedangkan hasil wawancara dengan Komite Sekolah SMAN

2 Tanjung selor Ibu Mikfatuh Jannah, S.Pd yang mengatakan bahwa :

Kalau di tanya tentang sikap dan pelayanan dalam pemamfaatan dana BOSDA tersebut masih ada keluhan dari guru, meyampaikan kepada ketua komite bahwa pada saat mengajukan ke Bendahara SMA Negeri 2 Tanjung Selor tentang rencama kegiatan maupun kepada salah satu staf yang mengurus tentang bantuan tersebut, terkesan lambat dalam hal pengeluaran dananya padahal dana tersebutkan untuk pelaksanaan kegiatan para guru dalam pembelajaran (Wawancara tanggal, 27 Januari 2017– D. W.11.01).

Hasil wawancara dengan PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, menyatakan :

Staf di Dinas Pendidikan karena jumlah personil yang masih terbatas tetapi para staf sangat cekatan melaksanakan program BOSDA ini. Tapi karena staf yang terbatas jadi agak kewalahan dalam melayani apabila banyak sekolah yang datang berurusan untuk konsultasi (Wawancara tanggal, 13 januari 2017 2017 Jam 09.30 wita – D.W.01.01).

Berdasarkan wawancara diatas seharusnya di era desentralisasi ini pemerintah tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat otonom, melainkan juga perlu diikuti dengan pembenahan sikap pegawai sebagai pelaksana kebijakan untuk mempunyai inovasi, kreatifitas dan profesionalitas dalam bekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi dan reformasi pegawai dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai visi misi bapak bupati Kabupaten Bulungan.

Hal ini menunjukkan bahwa staf selaku pelaksana institusi pemerintah, khususnya satuan pendidikan SMA Negeri 1 dan SMAN 2 Tanjung Selor belum maksimal, maka dalam hal ini dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan masyarakat yang merasakan dampak langsung adanya bantuan pemerintah, dimana para pegawai harus bersikap adil, dan tidak diskriminatif, misalnya tidak pandang suku, agama, kedaerahan atau ras serta status sosial, akan tetapi impersonal dan objektif dalam memberikan pelayanan. Perilaku birokrasi yang transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan suatu bentuk perilaku dari aparat/pegawai agar bertindak tidak diskriminatif sehingga berpengaruh terhadap pemberian kualitas pelayanan dan sekaligus menciptakan *equilibrium* antara hak dan kewajiban para warga dengan pihak pemberi layanan. Perilaku birokrasi ini dapat ditemukan melalui pembaharuan dan pembentukan birokrasi yang efektif dan efisien.

Seperti yang dikemukakan oleh Weber (dalam Keban, 2008:244), bahwa berkembang semakin kompleks maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu birokrasi. Dalam birokrasi ini diatur perilaku yang tidak saja produktif tetapi juga loyal terhadap pimpinan dan organisasi. Perilaku yang impersonal dan saklek harus diterapkan. Hubungan kekeluargaan, kelompok sosial tidak mendapat tempat untuk dipertimbangkan dalam birokrasi. Oleh karena itu, para anggota organisasi harus

ditempatkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, dikembangkan dan dituntun dengan peraturan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi tersebut kemudian diperkenalkan di Indonesia pada masa orde baru namun dalam perkembangan selanjutnya konsep tersebut dimanipulasi secara politis untuk mempertahankan kekuasaan dimana birokrasi diposisikan sebagai suatu kerajaan pejabat yang rajanya adalah pejabat itu sendiri. dan hubungan primordial sangat kental mempengaruhi sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa sikap para pelaksana/implementor belum bisa berubah dari kebiasaan yang sentralistik dengan budaya mohon petunjuk. dari atasan

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Bapak H. Jamaluddin Saleh, S.P yang mengatakan:

Mengenai kejelasan dan keterangan organisasi merupakan hal yang penting dan tepat agar memiliki keterpaduan yang jelas dalam setiap organisasi, Mengenai standar operating prosedur dalam penyaluran dana BOSDA itu tidak ada karena dana tersebut membantu pertumbuhan pendidikan agar anak-anak semua dapat belajar minimal tamat SMA. Dan Rentang kendali antar pucuk pimpinan dengan bawahan dalam struktur organisasi pelaksanaan dana BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor, itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dan ini sama-sama jalan dalam mengatur jalannya penggunaan dana BOSDA, karena ini dana merupakan amanah pemerintah Daerah dalam hal ini melalui anggaran Pemerintah kabupaten Bulungan. (Wawancara tanggal, 16 Januari 2017 Jam 09.30 wita – SB.W.02.02).

Hal ini juga disampaikan oleh PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa :

Untuk urusan birokrasi dari sekolah ke Dinas sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi kendala ini adalah letak geografis yang berjauhan dan menyulitkan satuan pendidikan untuk berurusan. Kami sangat berharap dengan adanya perubahan kewenangan ini dan mempermudah urusan sekolah ada UPTD atau disetiap Kabupaten/Kota. Sehingga sekolah tidak harus ke dinas (Wawancara tanggal, 13 Januari 2017 Jam 09.30 wita – SB.W.01.02).

Hal ini sejalan dengan teori Hasibuan (2005:34) mengemukakan bahwa struktur organisasi (birokrasi) adalah suatu gambaran tentang tipe organisasi, departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi, sehingga dapat dinyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama. Struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur itu, untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi, sehingga usaha-usaha itu terkordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif dan sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi karena

organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-asas organisasi terdiri dari rumusan tujuan dengan jelas, pembagian pekerjaan, pelimpahan wewenang, koordinasi, rentang kendali dan kesatuan komando. Struktur organisasi adalah suatu sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dikatakan bahwa perhatian sebuah organisasi terhadap struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, kualitas organisasi, mengintegrasikan dan memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, membawa organisasi ke arah yang tentunya lebih baik

Selanjutnya Chung & Megginson (dalam Keban, 2008:135) mengemukakan bahwa Desain organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaimana aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur, dengan tujuan untuk membantu manajer dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hal yang dikembangkan dalam desain organisasi adalah hirarki dari tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Bapak Sunjono, M.Pd mengatakan bahwa:

Kalau di tanya mengenai struktur organisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Selor kepala sekolah di bantu oleh para wakasek dan guru-guru dalam mengelola proses belajar mengajar dengan berpedoman pada visi Misi sekolah dalam hal mencerdaskan kehidupan anak- anak bangsa dan alhamdulillah dengan adanya bantuan pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah Daerah pihak tidak lagi membebankan biaya kepada orangtua siswa cuma memang yang menjadi kendala sering terlambat dalam pencairannya karena butuh proses kali ya...dari kas daerah kabupaten baru masuk ke sekolah secara administrasi (Wawancara tanggal, 24 Januari 2017 Jam 09.30 wita – SB.W.04.03).

Berdasarkan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa struktur organisasi, tujuan, visi dan misi organisasi yang dibantu oleh dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Selor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan belum dipahami oleh seluruh implementor atau pelaksana kebijakan. Organisasi modern sekarang ini tidak lagi menempatkan struktur organisasi secara kaku dalam mengatur dan menempatkan orang dalam organisasi. Karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat tidak memungkinkan struktur menjadikan anggota organisasi menjadi terkungkung. Oleh karena itu perlu di desain suatu struktur organisasi yang ramping dan terbuka layaknya sebagai suatu sistem organisme sehingga lebih fleksibel dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dalam konteks tersebut, maka implementasi kebijakan penyaluran Dana Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA) perlu dipertimbangkan dengan suatu desain

struktur organisasi yang fleksibel, efisien dan efektif dalam mengimplementasi suatu kebijakan untuk mewujudkan adanya suatu pelayanan yang berkualitas.

5. Model Strategi Implementasi Pelaksanaan Program BOSDA di Kabupaten Bulungan

Model Strategi yang dapat digunakan agar implementasi pelaksanaan program BOSDA dapat dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

- a. **Komunikasi**, bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan program BOSDA harus mempunyai kejelasan pencapaian tujuan yaitu penajaman program atau reorientasi pada program, rencana aksi, anggaran, sumber daya manusia dan organisasi/Lembaga yang mempunyai Otoritas khusus yang menangani program dimaksud. Adapun yang dapat dilakukan adalah penyusunan bersama sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pada alur penyampaian informasi terkait implementasi program BOSDA ini terutama pada aspek intensitas dan frekuensi komunikasi, pola pelaporan dan komunikasi serta sosialisasi kebijakan program BOSDA. Penyampaian informasi ke masyarakat dalam hal ini ke sekolah yang merasakan dampak langsung kebijakan program ini. Penyampaian informasi ke satuan pendidikan di butuhkan dukungan dan kerjasama dua arah yang intens minimal 1 (satu) bulan sekali diadakan pelatihan, sosialisasi,

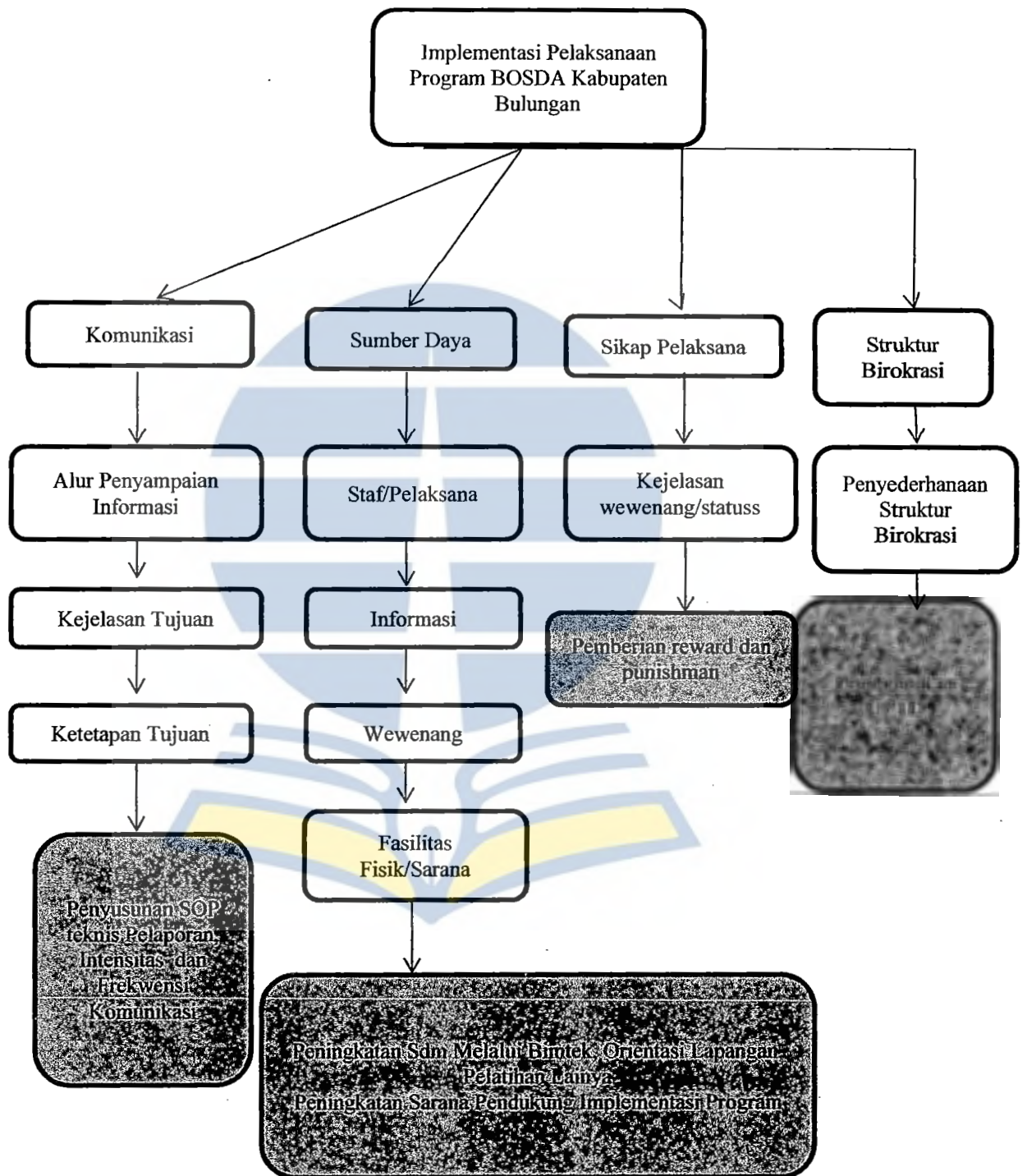
yang terkait dengan program BOSDA kiranya intens melakukan pertemuan untuk mengatur perencanaan, penganggaran, mengevaluasi pelaksanaan implementasi program BOSDA, menyaring aspirasi masyarakat dan harapan-harapan pihak terkait yang terlibat dalam pendidikan investor untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi program BOSDA di kabupaten bulungan untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- b. *Sumber Daya*, hal ini penting sekali guna mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Sumber Daya yang terkait pelaksana yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yang terdiri dari Pejabat Instansi Pemerintah yang terkait dengan program BOSDA, Satuan pendidikan dan masyarakat yang merupakan orang tua siswa (Komite Sekolah). Ketiganya harus saling bersinergi, berkoordinasi, konsisten, berkerjasama guna melaksanakan program BOSDA ini. Ketiganya harus saling memberikan informasi yang terkait dengan BOSDA. Kewenangan harus berjalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Stake holder agar masyarakat yang dalam hal ini orang tua tahu akan tujuan program BOSDA dan untuk apa dana tersebut sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan sekolah yang tepat sasaran dan bermanfaat terkait fasilitas fisik dan sarana dan prasarana sehingga

diperlukan intensitas pengawasan di lapangan bagi SKPD terkait, pola-pola peningkatan SDM juga perlu dilakukan terutama peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang pengelolaan program BOSDA untuk peningkatan dan kemajuan sekolah.

- c. **Sikap Pelaksana**, sikap, kemampuan dan kemauan yang teguh dari pelaksana baik itu SKPD, pihak sekolah dan masyarakat (komite sekolah) dalam pelaksanaan program BOSDA, sehingga diharapkan adanya ketegasan, dukungan dan perhatian dari pemerintah selalu fokus dengan program BOSDA ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan. Adapun dukungan yang dapat dilakukan dengan pemberian reward dan punishment. Misalnya pemberian penghargaan kepada sekolah dengan mengadakan lomba pembuatan pertanggung jawaban dana BOSDA yang baik dan benar, sehingga pengelolanya semangat dalam mengelola dana BOSDA.
- d. **Struktur Birokrasi**, perlu di bentuknya suatu organisasi atau UPTD yang gunanya untuk membantu pihak sekolah dalam pembuatan laporan dana BOSDA, membuat Alur Kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), membentuk tim yang terkait dengan evaluasi pengelolaan program BOSDA, sehingga memberikan manfaat dan masukan pada satuan pendidikan sehingga program ini dapat terus diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara.



Gambar 4.2 : Model Strategi Implementasi Pengelolaan Program BOSDA

Keterangan :

 : Rencana Aksi

C. Pembahasan

Setelah mendapatkan data-data di lapangan dari hasil wawancara setiap informan, maka selanjutnya akan dibahas tentang inti dari hasil penelitian dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini yang didukung oleh data-data yang ditampilkan pada bab sebelumnya dan diperoleh dari berbagai sumber dan diolah dalam bentuk grafik, peta, tabel, maupun gambar. Penyajian data ini akan didiskripsikan untuk mudah dipahami sehingga menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Berdasarkan data di lapangan apabila dikaitkan dengan teori manajemen yaitu dari fungsi perencanaannya (*Planning*) telah disusun dengan baik oleh Dinas Pendidikan terkait maupun penyusunan RKA oleh satuan pendidikan dalam merencanakan anggaran pengelolaan sekolah telah dibuat dengan baik. Dalam perencanaan anggaran berdasarkan data jumlah siswa yang diberikan oleh satuan pendidikan. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan berdasarkan data jumlah siswa tidak sesuai dan ada pengurangan data jumlah siswa dikarenakan dana yang disediakan oleh Pemerintah masih kurang.

Untuk fungsi pengorganisasian (*Organizing*) yang terkait dengan penempatan sumber daya belum sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOSDA. Yaitu tim manajemen yang mengelola dana BOSDA yaitu diambil dari guru yang mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola dana BOSDA yang sudah mendapatkan SK dari Kepala Sekolah. Sumber daya yang berupa dana yang diberikan ke sekolah berdasarkan data di lapangan sangat membantu masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan mengurangi beban masyarakat.

Fungsi Penggerakan (*Actuating*) yang merupakan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengatur pengelolaan dana BOSDA masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kinerja tim yang masih sering terlambat dalam hal pembuatan laporan dana BOSDA.

Fungsi pengendalian (*Controlling*) dalam hal pengawasan penggunaan dana BOSDA masih belum maksimal. Sehingga hal ini perlu ada evaluasi ke arah yang lebih baik dalam hal penggunaan dana. Selain itu untuk lebih mengontrol kesesuaian dana yang dikelola berdasarkan petunjuk teknis.

Berdasarkan Program Pemerintah untuk mendukung program nasional yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan wacana wajib belajar 12 tahun, maka pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Gratis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan.

Peran Pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan program BOSDA ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan pendapat dari Pejabat Pemerintah/SKPD yang terkait implementasi kebijakan program BOSDA tentang Kondisi Realisasi Empirik di Lapangan, ada beberapa variabel yaitu :

a. Komunikasi

1. KOM.W.03.05 : Tidak ada masalah dan hambatan, karena sudah dilakukan sosialisasi.
2. KOM.W.05.01 : Sesuai dan tidak ada masalah

3. KOM.W.03.02 : Masalahnya komunikasi jangan dipersulit, gunakan HP bila ada kendala
4. KOM.W.01.01 : Tidak ada masalah, dan sudah maksimal
5. KOM.W.07.02 : Belum maksimal, perlu ada komunikasi berupa sosialisasi yang masih kurang.
6. KOM.W.06.02 : Masih kurang maksimal, dan masih perlu adanya sosialisasi lagi.
7. KOM.W.08.01 : Sudah sesuai dan dirapatkan pada dewan guru
8. KOM.W.09.01 : Sudah maksimal dan sesuai aturan
9. KOM.W.02.01 : Sudah berjalan maksimal
10. KOM.W.03.03 : Belum maksimal
11. KOM.W.10.01 : Belum maksimal dan masih kurang adanya informasi.

Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan dikomunikasikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai pelaksana implementasi kebijakan program BOSDA. Akan tetapi komunikasi yang sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk sosialisasi dan tidak hanya satu kali saja. Hal ini dilakukan untuk lebih baik dalam melakukan pengadministrasian program BOSDA sehingga tujuan dari kebijakan program BOSDA terwujud. Selain itu karena kondisi geografis yang cukup sulit juga menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi. Sehingga adanya upaya dari pemerintah untuk membentuk UPTD di setiap Kabupaten/Kota dalam mendukung dan mempermudah urusan setiap satuan pendidikan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh George Edward III bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan program adalah komunikasi yang merupakan suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan dan pengalamannya kepada orang lain dan orang lain mendengarkan ataupun memberikan tanggapan. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya implementasi kebijakan program BOSDA memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan yang terkait dengan pengelolaan program BOSDA.

b. Sumber Daya

1. SD.W.03.02 : Sudah sesuai harapan masyarakat, dan butuh dukungan dari masyarakat
2. SD.W.02.01 : Sudah memenuhi harapan masyarakat dan harus lebih teliti.
3. SD.W.10.02 : Sudah memenuhi harapan masyarakat
4. SD.W.05.01 : Masih kurang, sebelumnya sesuai dan mencukupi
5. SD.W.04.01 : Masih kurang, karena ada pelimpahan kewenangan dan perlu dipertimbangkan lagi besaran dananya sebelum adanya pelimpahan kewenangan.
6. SD.W.06.01 : Belum sesuai dan sumber daya yang ada terbatas

7. SD.W.07.01 : Belum sesuai harapan, karena dibantu oleh operator yang tenaga honorer.
8. SD.W.06.03 : sangat kurang, dan tenaga yang ada belum mumpuni untuk menjalankan program BOSDA
9. SD.W.10.01 : Belum mengetahui
10. SD.W.11.01 : Cukup profesional dalam mengelola program BOSDA

Dari data yang telah diperoleh, sumber daya dalam hal sumber dana belum mencukupi karena adanya perubahan kewenangan. Dalam hal hal sumber daya manusianya yaitu staf atau pegawai yang mengelola program BOSDA masih kurang dan tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Mengenai dari tujuan diberikan dana BOSDA, dari hasil wawancara mendapatkan hasil bahwa pemberian dana BOSDA sudah tepat sasaran dan tidak membebankan masyarakat dan perlu adanya evaluasi dari pemerintah.

George Edward III menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya mempunyai peranan penting karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga atau staf yang mengelola

program BOSDA tidak sesuai dengan petunjuk teknis yaitu dari seorang guru sehingga masih perlu adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung implementasi kebijakan program BOSDA. Selain dari sumber daya manusia, sumber dana yang ada mengalami penurunan sebelum adanya pelimpahan kewenangan. Harapan dari penerima dana BOSDA yaitu satuan pendidikan adalah setidaknya sama sebelum adanya pelimpahan kewenangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan ini.

c. Disposisi (Kecenderungan-Kecenderungan/Sikap Pelaksana)

1. D.W.01.01 : Sudah maksimal dalam melaksanakan program BOSDA
2. D.W.03.01 : Belum maksimal dan lambat dalam membuat SPJ
3. D.W.04.01 : Dilaksanakan secara bertahap
4. D.W.06.02 : Belum maksimal
5. D.W.04.01 : sangat baik pelayanannya
6. D.W.06.01 : sangat antusias tapi masih ada kesalahan yang dibuat dalam pembuatan laporan
7. D. W.11.01 : Belum maksimal, perlu ditingkatkan supaya tidak ada keluhan dari masyarakat.
8. D.W.10.01 : Sangat maksimal

Dari data di atas menunjukkan bahwa sikap pelaksana para staf atau pegawai sangat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan dalam menjalankan kebijakan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan semua stakeholder yang terkait dengan kebijakan program BOSDA ini yang saling bekerjasama diharapkan implementasi kebijakan program ini dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang dinyatakan oleh George Edward III bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Disposisi (sikap pelaksana) dimana jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

1. SB.W.02.01 : Sudah sesuai dan efektif, tetapi adanya pelimpahan kewenangan ini harus dilaksanakan sesuai aturan
2. SB.W.03.01 : belum sesuai, karena tidak melibatkan Komite sekolah
3. SB.W.06.01 : Sudah maksimal dalam memberikan pelayanan yang terkait program BOSDA.
4. SB.W.02.02 : Sudah sesuai dan sangat penting
5. SB.W.06.02 : Sudah sesuai dalam pengajuan RKA yang mengetahui Komite Sekolah

6. SB.W.01.02 : Belum efektif
7. SB.W.04.03 : Sudah efektif, tapi belum maksimal

Dari data di atas, terlihat bahwa struktur birokrasi yang ada telah cukup baik, namun masih belum maksimal keterlibatan stakeholder yang ada, yaitu keterlibatan Komite Sekolah yang kurang maksimal yaitu hanya dalam usulan RKA saja. Hal ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang kinerja Komite Sekolah. Harapan dari Komite Sekolah mereka terlibat dan mengetahui untuk apa saja dana BOSDA itu digunakan, sehingga bisa dapat mengusulkan kegiatan apa saja yang bisa diakomodir dari dana BOSDA.

Seperti yang dinyatakan oleh George Edward III bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplemntasikan kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya dan berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun paparan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan program BOSDA pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan masih ada hambatan dalam hal pengelolaan manajemen BOSDA baik itu dari segi perencanaan belum terlaksana dengan baik dan masih belum maksimal. Untuk pengorganisasian juga masih belum maksimal hal ini bisa dilihat dari penempatan sumberdaya (*resources*) untuk mengelola dana BOSDA belum sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) atau Standar Operasional prosedur (SOP).
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan program BOSDA pada jenjang SMA di Kabupaten Bulungan berdasarkan teori George Edward III ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhinya, yaitu :
 - a. Komunikasi yang belum efektif dan belum maksimal dilakukan
 - b. Sumber daya pegawai atau staf yang masih kurang dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, jumlah dana yang dialokasikan masih

kurang karena adanya perubahan kewenangan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masih kurang.

- c. Disposisi (sikap pelaksana) menunjukkan kemauan yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan namun masih kurang antusias, dimana hal ini terlihat sering terlambat dalam pembuatan laporan.
- d. Struktur Birokrasi yang ada cukup baik, namun masih belum efektif yaitu tidak melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan program BOSDA, selain itu juga kondisi geografis yang cukup sulit dalam memberikan pelayanan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan BOSDA.

b. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, dalam hal berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOSDA Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOSDA Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk sosialisasi pada satuan pendidikan bisa pertriwulan atau persemester dalam setahun.
2. Mengenai Sumber Daya, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau staf/pegawai dalam hal pengelolaan program BOSDA seperti adanya pelatihan-pelatihan paling tidak dilakukan dua kali dalam setahun sehingga pembuatan administrasi dalam bentuk laporan cepat diselesaikan.

3. Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, perlu membentuk UPTD untuk Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara, sehingga mempermudah urusan setiap satuan pendidikan untuk menjalankan kebijakan pengelolaan program BOSDA.
4. Perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program BOSDA jenjang SMA dimasa yang akan datang sehingga lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agger, Ben. (2003). *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Kreasi Yogyakarta: Wacana*.
- Anderson, James E, (2006). *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arfah, St. Rahmawati. (2012). "Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Diambil 10 Februari 2017, dari situs World Wide Web: <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/12541347281107>
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif "Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y.S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. London, New Delhi: Sage.
- D,Meilina, I, Suntoro, S, Sowiyah. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMAN 1 Kasui Way Kanan. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press
- eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (3): 1217-1228 ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisif-unmul.ac.id
- Gede, A.S.B, Iyus, A.H, Made, A (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, vol: 4 No: 1
- George.C.Edward, (1980). *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Hasibuan, Malayu. (2005). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Islamy, M.Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van dan Carl, Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Miles, BM dan Huberman, MA. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- NWP Asih, IM Yudana, IGKA Sunu (2014). Efektifitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar. *Jurnal Penelitian Pascasarjana UNDIKSHA*. Vol 5, No 1.
- Newman, W. L. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches in Social Works*. New York: Columbia University.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton, Michel Quinn. (2006). *Quantitative Research and Evaluation Methods*. USA: Sage Publication Inc.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin Abdul Jabar, (2008), *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset, YPAPI .

Winardi. (1986). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Buku Kita.

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Era Globalisasi. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Jakarta: PT. Buku Seru.



Lampiran 1

**PPTK BOSDA Dinas
Pendidikan dan
kebudayaan, Pemuda
Dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Utara**

**PANDUAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

Tanda Tangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Bagaimana pendapat anda, tentang implementasi kebijakan Program BOSDA apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja staf bidang pendidikan menengah dan yang ada pada satuan pendidikan ?
2. Bagaimana pendapat anda, Seberapa jauh konsistensi Anggaran program bantuan operasional sekolah daerah setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan pendidikan gratis ?

3. Bagaimana pendapat anda, apakah staf yang ada yang telah ditetapkan dalam tim manajemen bosda, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan), dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim manajemen bosda ?
4. Bagaimanakah pendapat anda, bahwa pengelolaan dana bosda sudah sesuai dengan petunjuk teknis?
5. Bagaimana pendapat anda, apakah stakeholder yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?
6. Bagaimana pendapat anda, apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim manajemen bosda hingga pada level pelaksana dilapangan yaitu satuan pendidikan? Apakah kewenangan masing-masing satuan pendidikan tersebut saling sinergis dan konsisten?
7. Bagaimana pendapat anda, apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan kebijakan program bosda?
8. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan program bosda, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur manajemen bosda, sarana dan fasilitas pendukung ?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan & penerima kebijakan dalam mengimplementasikan program bosda ?

2. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tentang Pedoman pengelolaan dana BOSDA, yang menjadi acuan para penerima program bosda ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan program BOSDA, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola program bosda ?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada di satuan pendidikan telah sesuai dalam menjalankan program dan mempertanggungjawabkan program BOSDA?

C. KOMUNIKASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim manajemen bosda sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan atau setiap satuan pendidikan ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Program BOSDA di Lihat dari segi Komunikasi dan penerimaan transformasi informasi
3. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan program bosda sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim manajemen bosda, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim manajemen BOSDA dengan pengawas SMA yang berada pada Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA?
5. Bagaimanakah pencairan dana BOSDA ada kendala atau tidak. Apakah hal ini tersosialisasikan

6. Bagaimana seharusnya komunikasi yang baik yang dapat menjalankan program BOSDA ini ?
7. Bagaimanakah pendapat anda tentang pengelolaan dana BOSDA pada satuan pendidikan di jenjang SMA ?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimanakah sikap dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan program BOSDA ini ?
2. Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan pengantian kepala sekolah dll terhadap perubahan sikap pelaku para tim dalam kebijakan pendidikan?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah Implementasi kebijakan program bosda dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan satuan pendidikan jenjang SMA?
4. Bagaimanakah pendapat anda tentang sikap kepala sekolah jenjang SMA yang tidak tetap waktu dan pengelolaan dana BOSDA yang tidak sesuai aturan yang ada?



Lampiran 1

**Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten
Bulungan**

**PANDUAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

Tanda Tangan Narasumber : (.....

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Bagaimanakah pandangan bapak tentang kaitannya pencairan dana BOSDA, apakah sudah sesuai pengelolaannya ?
2. Apakah program ini berjalan efektif ditinjau dari anggaran dana yang tersedia
3. Bagaimana pendapat anda, tentang implementasi kebijakan Program BOSDA apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja stakeholder yang ada pada satuan pendidikan ?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah staf yang ada yang telah ditetapkan dalam tim manajemen bosda, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan),

- dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim manajemen bosda ?
5. Bagaimana pendapat anda, Seberapa jauh konsistensi Anggaran program bantuan operasional sekolah daerah setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan pendidikan gratis ?
 6. Bagaimana pendapat anda, apakah stakeholder yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?
 7. Bagaimana pendapat anda, apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim manajemen bosda hingga pada level pelaksana dilapangan yaitu satuan pendidikan? Apakah kewenangan masing-masing satuan pendidikan tersebut saling sinergis dan konsisten?
 8. Bagaimana pendapat anda, apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan kebijakan program bosda?
 9. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan program bosda, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur manajemen bosda, sarana dan fasilitas pendukung ?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara ?

2. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan & penerima kebijakan dalam mengimplementasikan program bosda ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tentang Pedoman pengelolaan Food estate, yang menjadi acuan para penerima program bosda ?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan program BOSDA, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola program bosda ?

C. KOMUNIKASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan program bosda sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim manajemen bosda, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan?
2. Bagaimana pendapat anda, apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim manajemen bosda sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan atau setiap satuan pendidikan ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim manajemen BOSDA dengan pengawas SMA yang berada pada Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimana pendapat anda, tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para kepala sekolah sebagai pelaksana dan penerima kebijakan program BOSDA dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis ?

2. Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala sekolah dll terhadap perubahan sikap pelaku para tim dalam kebijakan pendidikan?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah Implementasi kebijakan program bosda dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan satuan pendidikan jenjang SMA?



Lampiran 1

**Kepala Bidang
Pendidikan Kabupaten
Bulungan**

**PANDUAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

Tanda Tangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

B. SUMBER DAYA

1. Bagaimana pendapat anda, tentang implementasi kebijakan Program BOSDA apakah menemui kendala, terutama efektifnya kinerja staf bidang pendidikan menengah dan yang ada pada satuan pendidikan ?
2. Bagaimana pendapat anda, Seberapa jauh konsistensi Anggaran program bantuan operasional sekolah daerah setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan pendidikan gratis ?

3. Bagaimana pendapat anda, apakah staf yang ada yang telah ditetapkan dalam tim manajemen bosda, perlu dilakukan modifikasi (penambahan atau pengurangan), dengan pertimbangan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja tim manajemen bosda?
4. Bagaimanakah pendapat anda, bahwa pengelolaan dana bosda sudah sesuai dengan petunjuk teknis?
5. Bagaimana pendapat anda, apakah stakeholder yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing ?
6. Bagaimana pendapat anda, apakah kewenangan telah berjalan sesuai dengan kebijakan tim manajemen bosda hingga pada level pelaksana dilapangan yaitu satuan pendidikan? Apakah kewenangan masing-masing satuan pendidikan tersebut saling sinergis dan konsisten?
7. Bagaimana pendapat anda, apakah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan telah memberikan pelayanan dalam mengimplementasikan kebijakan program bosda?
8. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada rancangan evaluasi terhadap kebijakan program bosda, menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya dilihat dari struktur manajemen bosda, sarana dan fasilitas pendukung ?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan & penerima kebijakan dalam mengimplementasikan program bosda ?

2. Bagaimana pendapat anda, apakah sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) atau tentang Pedoman pengelolaan dana BOSDA, yang menjadi acuan para penerima program bosda ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu di bentuk suatu badan atau minimal UPT dalam penanganan program BOSDA, agar lebih fokus dan memiliki kewenangan penuh mengelola program bosda ?
4. Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada di satuan pendidikan telah sesuai dalam menjalankan program dan mempertanggungjawabkan program BOSDA?

C. KOMUNIKASI

1. Bagaimana pendapat anda, apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim manajemen BOSDA dengan pengawas SMA yang berada pada Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA ?
2. Bagaimana pendapat anda, apakah hasil-hasil kebijakan yang dirumuskan bersama dalam tim manajemen bosda sudah tersosialisasi hingga ke tingkat lapangan atau setiap satuan pendidikan ?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan program bosda sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim manajemen bosda, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan?
4. Bagaimana implementasi kebijakan Program BOSDA di Lihat dari segi Komunikasi dan penerimaan transformasi informasi
5. Bagaimanakah pencairan dana BOSDA ada kendala atau tidak. Apakah hal ini tersosialisasikan

6. Bagaimana seharusnya komunikasi yang baik yang dapat menjalankan program BOSDA ini ?
7. Bagaimanakah pendapat anda tentang pengelolaan dana BOSDA pada satuan pendidikan di jenjang SMA ?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimana pendapat anda, tentang sikap, kemampuan (skill) dan kemauan (internal support) dari para kepala sekolah sebagai pelaksana dan penerima kebijakan program BOSDA dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis ?
2. Apakah ada peranan faktor politis seperti perubahan kepemimpinan kepala daerah dan , pengantian kepala sekolah dll terhadap perubahan sikap pelaku para tim dalam kebijakan pendidikan?
3. Bagaimana pendapat anda, apakah Implementasi kebijakan program bosda dilaksanakan selama ini sudah sesuai dan memenuhi harapan (efektif dan efisien) ? baik dilihat dari sikap dan kemauan satuan pendidikan jenjang SMA?
4. Bagaimanakah pendapat anda tentang sikap kepala sekolah jenjang SMA yang tidak tetap waktu dan pengelolaan dana BOSDA yang tidak sesuai aturan yang ada?

Lampiran 1

Kepala Sekolah

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

TandaTangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Apakah sumber dana bapak terima sudah mencukupi untuk belanja operasiaonal sekolah ?
2. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi tim di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA ?
3. Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam melaksanakan program bosda ?
4. Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi tim bosda di sekolah dalam membuat spj bosda ?

5. Apakah pengawas dan tim manajemen bosda dinas pendidikan intens dalam melakukan/memberikan arahan tentang cara pengolahan dan pengelolaan program bosda, kalau ada berapa kali dalam sebulan ?
6. Bagaimanakah cara merancang program disekolah dengan dana bosda?
7. Bagaimanakah Tingkat kemajuan prestasi siswa dengan adanya program bosda?
8. Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi dalam mengelola program bosda?
9. Apakah Sarana dan Prasarana sekolah yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai?
10. Apakah dana yang diberikan melalui program BOSDA mencukupi untuk operasioanl sekolah
11. Apakah Dinas Pendidikan Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke sekolah?
12. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan Kab. Bulungan dalam meningkatkan kualitas pendidikan?

B. STRUKTUR BIROKRASI

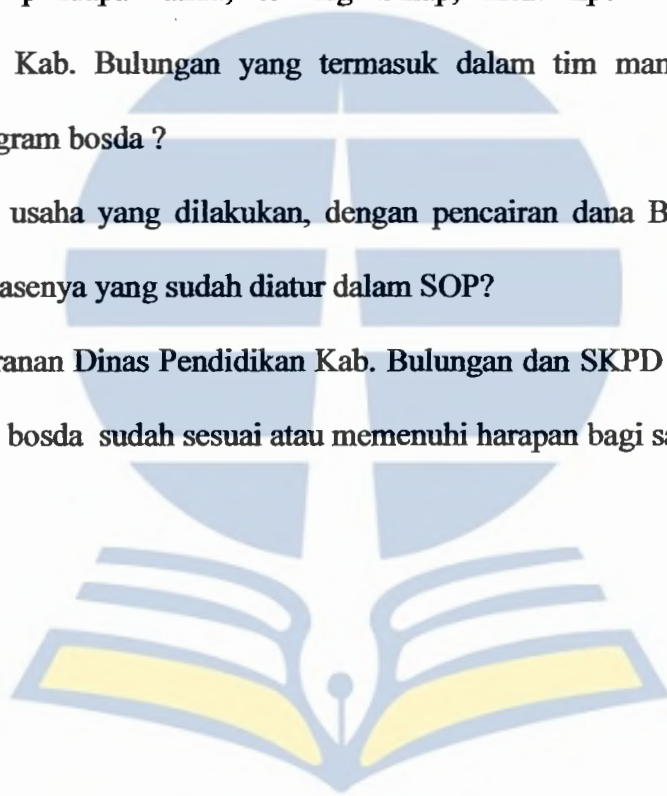
1. Bagaimana peran komite sekolah dalam program ini
2. Apakah sudah efektif kerjasama antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan, pengawas dan manajemen bosda di sekolah ?
3. Bagaimanakah sistem birokrasi di sekolah dalam menjalankan program BOSDA ?
4. Bagaimanakah Kinerja tim manajemen bosda dalam implementasi kebijakan program bosda ?

C. KOMUNIKASI

1. Menurut anda, Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yaitu kebijakan program BOSDA telah tersosialisasi dengan baik ke sekolah ?
2. Menurut anda bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan ?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan yang termasuk dalam tim manajemen bosda tentang adanya program bosda ?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan, dengan pencairan dana BOSDA yang terlambat dan persentasenya yang sudah diatur dalam SOP?
3. Apakah peranan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi satuan pendidikan ?



Lampiran 1

Bendahara Sekolah

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

TandaTangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi tim di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA ?
2. Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam melaksanakan program bosda ?
3. Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi dalam mengelola program bosda?
4. Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi tim bosda di sekolah dalam membuat spj bosda ?

5. Apakah pengawas dan tim manajemen bosda dinas pendidikan intens dalam melakukan/memberikan arahan tentang cara pengolahan dan pengelolaan program bosda, kalau ada berapa kali dalam sebulan ?
6. Bagaimanakah pengelolaan SPJ bosda ?
7. Apakah pengelolaan BOSDA sesuai dengan juknis yang ada ?
8. Apakah Sarana dan Prasarana sekolah yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai?
9. Apakah Dinas Pendidikan Kab. Bulungan sudah efektif dalam memberikan pelayanan, bantuan dan pendampingan ke sekolah?
10. Apakah pengelolaan BOSDA transparan, tepat waktu dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini komite sekolah?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Apakah sudah efektif kerjasama antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan, pengawas dan manajemen bosda di sekolah ?
2. Bagaimanakah pelibatan komite sekolah dalam pengelolaan BOSDA
3. Bagaimanakah Kinerja tim manajemen bosda dalam implementasi kebijakan program bosda ?

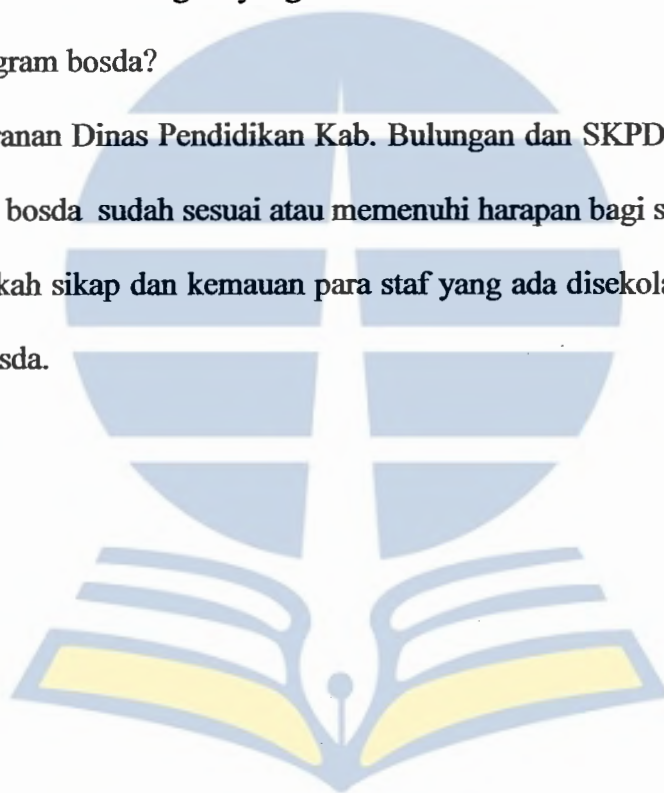
C. KOMUNIKASI

1. Menurut anda, Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yaitu kebijakan program BOSDA telah tersosialisasi dengan baik ke sekolah ?
2. Menurut anda bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan ?

3. Bagaimanakah komunikasi antar kepala sekolah dan bendahara yang ada pada tim sekolah ?

D. DISPOSISI (SIKAP)?

1. Bagaimana kemauan tim BOSDA sekolah dalam hal pembuatan laporan dana BOSDA ?
2. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan yang termasuk dalam tim manajemen bosda tentang adanya program bosda?
3. Apakah peranan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi satuan pendidikan ?
4. Bagaimanakah sikap dan kemauan para staf yang ada disekolah dalam melaksanakan program bosda.



Lampiran 1

Guru

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

TandaTangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Apakah yang menjadi kendala dalam mengelola dana BOSDA yang terkait dengan sumber daya yang ada ?
2. Apakah para guru dalam satuan pendidikan mengetahui apakah pengelolaan Bosda sesuai dengan petunjuk yang ada ?
3. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi guru di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA ?
4. Apa saja Fasilitas yang di gunakan guru dalam melaksanakan program bosda ?

5. Bagaimanakah program bosda dalam meningkatkan prestasi siswa?
6. Apakah program bosda mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran?
7. Apakah guru terlibat dalam pengelolaan dana bosda?
8. Apakah Sarana dan Prasarana sekolah yang telah disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah Kab. Bulungan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau memadai ?
9. Apakah program bosda yang diberikan meningkatkan kinerja guru disekolah?
10. Apakah pengelolaan BOSDA transparan, tepat waktu dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini guru?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimanakah SOP yang mengatur tentang pencairan dana BOSDA ?
2. Apakah sudah efektif kerjasama antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan, pengawas dan manajemen bosda di sekolah ?
3. Bagaimanakah Kinerja tim manajemen bosda dalam implementasi kebijakan program bosda ?
4. Apakah struktur birokrasi yang ada dalam pemberian program bosda mempengaruhi kinerja guru di sekolah ?

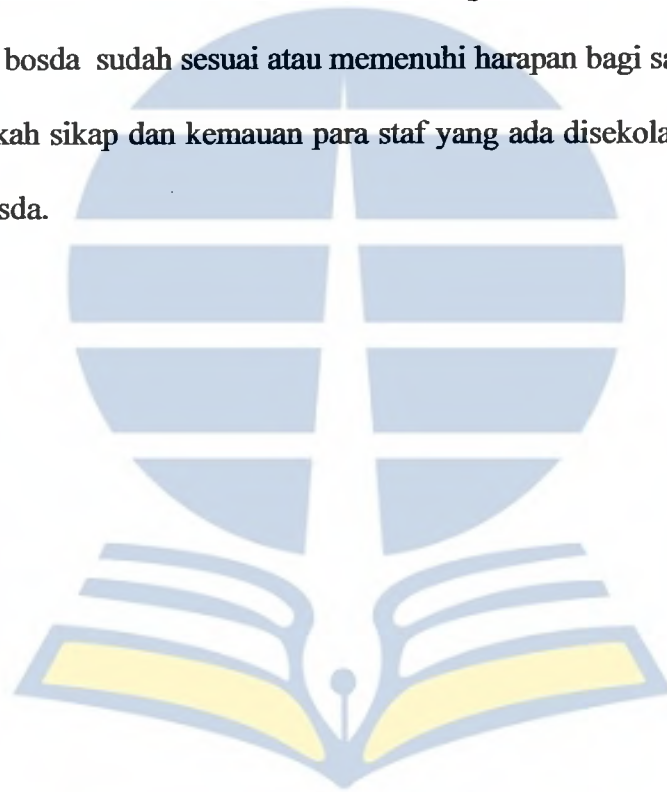
C. KOMUNIKASI

1. Bagaimanakah komunikasi antar kepala sekolah dan bendahara yang ada pada tim sekolah ?
2. Menurut anda, Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yaitu kebijakan program BOSDA telah tersosialisasi dengan baik ke sekolah ?
3. Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA kabupaten dan Provinsi

4. Menurut anda bagaimanakah komunikasi yang seharusnya dilakukan antara tim manajemen bosda Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan ?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan yang termasuk dalam tim manajemen bosda tentang adanya program bosda ?
2. Apakah peranan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan SKPD yang terkait dalam tim manajemen bosda sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi satuan pendidikan ?
3. Bagaimanakah sikap dan kemauan para staf yang ada disekolah dalam melaksanakan program bosda.



Lampiran 1

Komite Sekolah

**PEDOMAN
WAWANCARA MENDALAM
(*In-depth Interview*)**

Jabatan Narasumber :

Tgl/bln/thn Wawancara :

Nama Narasumber :

No. HP :

TandaTangan Narasumber : (.....)

Waktu

Hari :

Tanggal :

Mulai : (WITA)

Selesai : (WITA)

A. SUMBER DAYA

1. Bagaimana pengetahuan sumber daya di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BOSDA sudah tepat sasaran.
3. Berapa orang yang termasuk dalam susunan pengurus komite sekolah ? Jelaskan ?
4. Apakah Komite sekolah yang ada memiliki Struktur Organisasi dan Program Kerjanya apa saja ?

5. Apakah pengurus yang masuk dalam komite sekolah pekerjaan lain, jelaskan ?
6. Jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh komite sekolah dalam peningkatan pendidikan?
7. Apakah komite sekolah mengetahui adanya kebijakan program BOSDA ?
8. Bagaimana peran komite sekolah dalam kebijakan program bosda ?
9. Apa saja hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Komite Sekolah dalam peran sertanya untuk implementasi program bosda ?
10. Bagaimana cara komite sekolah dalam peran sertanya untuk kemajuan pendidikan?
11. Bagaimanakah Tingkat Pendidikan yang masuk dalam susunan komite sekolah?

B. STRUKTUR BIROKRASI

1. Apakah sudah efektif kerjasama antara Dinas Pendidikan, Kepala sekolah yang ada di Satuan pendidikan ?
2. Bagaimanakah Kinerja Dinas Pendidikan dalam implementasi kebijakan program bosda?

C. KOMUNIKASI

1. Bagaimanakah komunikasi yang terjadi antara tim bosda sekolah, Dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten ?
2. Apakah Dinas Pendidikan dan Tim manajemen BOSDA rutin melaksanakan Pelatihan / Sosialisasi dalam pengelolaan program bosda, apakah komite sekolah terlibat?
3. Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dan mudah di pahami oleh satuan pendidikan?
4. Menurut anda berapa kali dalam sebulan Dinas Pendidikan atau Tim manajemen BOSDA harus melakukan Sosialisasi tentang program Bosda?

D. DISPOSISI (SIKAP)

1. Bagaimanakah sikap dan kemauan tim pelaksana BOSDA pada sekolah anda ?
2. Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap seharusnya Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan tim manajemen bosda dalam melakukan pendampingan ke sekolah ?
3. Apakah peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan dan tim manajemen bosda sudah sesuai atau memenuhi harapan bagi sekolah dalam melaksanakan program bosda?



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Dedy Arifaini T
 Kode : 01
 Jabatan : PPTK BOSDA SMA
 Hari / Tanggal : Jum'at / 13 Januari 2017
 Tempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemuda Olah Raga
 Provinsi Kalimantan Utara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program BOSDA di Kabupaten Bulungan	Kita sudah melaksanakan program BOSDA ini semenjak terbentuk Kalimantan Utara untuk membantu biaya pendidikan masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan
2	Apakah pelaksanaan Program BOSDA ini tepat sasaran	Program BOSDA ini dikururkan bukan ke siswanya akan tetapi dana ini diberikan ke sekolah untuk pembiayaan operasional sekolah, apakah itu untuk rehab ringan, bayar honor guru dan lain-lainnya
3	Bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.	Hal ini harus kita laksanakan demi melaksanakan undang-undang. Memang hal ini memang akan sulit awalnya akan tetapi harus dijalankan. Program BOSDA tetap kita berikan langsung ke sekolah, akan tetapi setahu saya sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan tidak akan mendapatkan BOSDA dari Kabupaten Bulungan
4	Menurut Bapak, apakah dana ini akan mencukupi kebutuhan operasional sekolah	Nah itu dia permasalahannya. Masalah cukup atau tidak cukup hal ini harus menjadi perhatian sekolah. Sekolah harus menggunakan dana ini dengan skala prioritas. Dengan kekurangan dana yang diberikan jangan jadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
5	Bagaimana pelaksanaan implementasi pelaksanaan BOSDA yang terkait dengan sumber daya yang ada	Sebenarnya di Provinsi yang masih baru masih sangat kekurangan staf, tapi akan tetap kita jalankan program ini walaupun sangat kerepotan. Kita Harapkan nanti apabila ada perekrutan

		ASN bisa mengisi kekurangan staf.
6	Bagaimana pendapat anda, apakah perlu adanya komunikasi intensif antara tim manajemen BOSDA dengan pengawas SMA yang berada pada Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA	untuk komunikasi tidak ada masalah. Informasi dengan segera kami sampaikan melalui telepon dan kami kirimkan melalui email. Sebenarnya yang menjadi masalah ada penggunaan dana BOSDA itu sendiri oleh sekolah, sesuai atau tidak penggunaannya
6	Dilihat dari kemauan para staf yang ada, bagaimanakah mereka menjalankan program ini	Staf di Dinas Pendidikan karena jumlah personil yang masih terbatas tetapi para staf sangat cekatan melaksanakan program BOSDA ini. Tapi karena staf yang terbatas jadi agak kewalahan dalam melayani apabila banyak sekolah yang datang berurusan untuk konsultasi
7	Bagaimana pelaksanaan implementasi dari struktur birokrasi yang ada	Untuk urusan birokrasi dari sekolah ke Dinas sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi kendala ini adalah letak geografis yang berjauhan dan menyulitkan satuan pendidikan untuk berurusan. Kami sangat berharap dengan adanya perubahan kewenangan ini dan mempermudah urusan sekolah ada UPTD atau disetiap Kabupaten/Kota. Sehingga sekolah tidak harus ke dinas
8	Bagaimanakah sikap dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan program BOSDA ini	Staf di Dinas Pendidikan karena jumlah personil yang masih terbatas tetapi para staf sangat cekatan melaksanakan program BOSDA ini. Tapi karena staf yang terbatas jadi agak kewalahan dalam melayani apabila banyak sekolah yang datang berurusan untuk konsultasi”
9	Terimakasih bapak atas waktunya	Sama-sama.

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
 Kode : 02
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
 Hari / Tanggal : Senin / 16 Januari 2017
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimanakah pandangan bapak tentang kaitannya pencairan dana BOSDA, apakah sudah sesuai pengelolaannya	Dalam hal ini pelaksanaan program BOSDA ini yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah harus memang jeli dan teliti dalam penyaluran dana BOSDA ke sekolah apakah sesuai penggunaannya atau tidak. Terlebih lagi SPJ-nya yang dikirim ke Dinas Pendidikan lebih cepat, cepatlah kita salurkan dananya ke Sekolah.
2	Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program BOSDA di Kabupaten Bulungan	Kebijakan ini sangat membantu biaya operasional sekolah khususnya untuk SMA, karena kita menjalankan kebijakan pendidikan gratis untuk Kabupaten Bulungan, sehingga semua masyarakat harus mendukung program ini.
3	Apakah pelaksanaan Program BOSDA ini tepat sasaran	Menurut saya sudah tepat untuk diberikan ke sekolah, jadi tinggal sekolah yang mengatur kebutuhannya dan menggunakan dana BOSDA ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
4	Bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memang tidak lagi mengalokasikan anggaran BOSDA Kab, dan sekolah hanya menerima BOS Propinsi itupun tidak melalui kita lagi, melainkan langsung dari Propinsi. Sebenarnya hal ini meringankan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, akan tetapi bagaimana ditingkat sekolah, tapi kitakan melaksanakan peraturan ya harus kita jalankan. Dengan diambilnya SLTA ke provinsi mudah-mudahan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan lebih maju

5	Menurut Bapak, apakah dana ini akan mencukupi kebutuhan operasional sekolah	Kita berikan kewenangan tersebut ke sekolah karena dia langsung menggunakan dananya. Jadi penggunaan dana harus sehemat mungkin dan efektif. Gunakan dana sesuai persentasenya, berapa untuk modal, berapa untuk honor dan berapa untuk belanja ATK.
6	Menurut bapak bagaimana pelaksanaan Implementasi kebijakan Program BOSDA yang terkait dengan penyaluran dananya	Dalam hal ini pelaksanaan program BOSDA ini yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional sekolah harus memang jeli dan teliti dalam penyaluran dana BOSDA ke sekolah apakah sesuai penggunaannya atau tidak. Terlebih lagi SPJ-nya yang dikirim ke Dinas Pendidikan lebih cepat, cepatlah kita salurkan dananya ke Sekolah.
7	Bagaimana pelaksanaan implementasi pelaksanaan BOSDA yang terkait dengan sumber daya yang ada	Di Dinas Pendidikan Kabupaten staf yang ada sangat mendukung dalam menjalankan program BOSDA ini sehingga tidak ada kesulitan untuk menjadi tim manajemen. Waktu kita masih mengurus SMA program ini dijalan dengan baik. Staf yang masuk tim selalu berkoordinas dengan saya apabila ada masalah dalam pelaksanaannya.
8	Masalahnya itu seperti apa ya Pak	Ya seperti sekolah yang lambat dalam memberikan laporan, jadi mereka harus mengejar sekolah untuk segera membuat laporan. Karena kalo tidak masuk laporan dana mereka tidak akan dicairkan triwulan berikutnya maupun semester berikutnya
9	Apakah ada SOP yang jelas untuk mengatur penggunaan dana BOSDA	Ya jelas adalah. Hal ini kita buat agar sekolah tidak asal-asalan dalam penggunaan dananya.
10	Apakah menurut bapak SOP ini cukup fleksibel untuk mengatur penggunaan dana BOSDA	Kalau menurut saya SOP ini sudah memenuhi kebutuhan sekolah. Karena waktu sekolah mendapatkan dana 3 sumber keuangan provinsi dan Kabupaten serta Pusat, sehingga sekolah sangat mudah dalam mengalokasikan dananya. Setelah nanti sekolah hanya mendapat 2 sumber dana SOP ini harus dapat diperhatikan oleh Provinsi sehingga tidak memberatkan sekolah dalam membiayai pendidikan.
11	Apakah program ini berjalan efektif ditinjau dari anggaran dana yang tersedia	Menurut saya sudah sesuai dan sangat membantu biaya operasional sekolah dalam hal pembiayaan kegiatan sekolah yang

		tidak dibiayai oleh Dinas Pendidikan, seperti OSN, O2SN dan kegiatan lainnya. Walaupun sekarang ini anggaran yang sedikit menurun akan tetapi program BOSDA dapat tetap diberikan dengan cara mengurangi jumlah siswa yang siswanya banyak disekolah tersebut.
12	Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan program bosda sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim manajemen bosda, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan	Kami dari Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan standar operasional pelaksanaan, akan tetapi pada saat penyaluran dana bantuan, biasanya dari sekolah terkadang tidak ada atau lambat penyampaian atau laporan secara tertulis, dari sekolah penerima bantuan, seharusnya memberikan konfirmasi kepada kami, sehingga proses penyaluran berjalan dengan semestinya.
13	Bagaimana pelaksanaan implementasi dari struktur birokrasi yang ada	Mengenai kejelasan dan keterangan organisasi merupakan hal yang penting dan tepat agar memiliki keterpaduan yang jelas dalam setiap organisasi, Mengenai standar operating prosedur dalam penyaluran dana BOSDA itu tidak ada karena dana tersebut membantu pertumbuhan pendidikan agar anak-anak semua dapat belajar minimal tamat SMA. Dan Rentang kendali antar pucuk pimpinan dengan bawahan dalam struktur organisasi pelaksanaan dana BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor, itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dan ini sama-sama jalan dalam mengatur jalannya penggunaan dana BOSDA, karena ini dana merupakan amanah pemerintah Daerah dalam hal ini melalui anggaran Pemerintah kabupaten Bulungan.
14	Terimakasih bapak atas waktunya dan bila ada yang masih kurang saya akan kembali ya pak.	Iya sama-sama, kita juga siap membantu.

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Amar Mulia, S.Pd
 Kode : 03
 Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah
 Hari / Tanggal : Senin / 16 Januari 2017
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan program BOSDA di Kabupaten Bulungan	Program BOSDA ini sangat membantu dalam operasional sekolah untuk jenjang SMA. Baik itu untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya.
2	Bagaimana pendapat anda, Seberapa jauh konsistensi Anggaran program bantuan operasional sekolah daerah setiap tahunnya guna mendukung ini kegiatan tersebut baik untuk kebutuhan sosialisasi, fisik dan bantuan operasional lainnya guna mewujudkan kebijakan pendidikan gratis	Menurut saya program ini sangat membantu masyarakat karena tidak ada biaya yang dibebankan ke orang tua/masyarakat. Tapi kita sebagai masyarakat harus paham pendidikan gratis yang diberikan orang tua tidak serta merta lepas tangan. Kita harus pahami bahwa anggaran yang diberikan tidak semuanya terakomodir
3	Bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.	Kita berharap pemerataan pendidikan dapat dijangkau oleh Pemerintah Provinsi. Yang jelas sekolah sudah tidak mendapat bantuan dana lagi dari Kabupaten Bulungan.
4	Menurut Bapak, apakah dana ini akan mencukupi kebutuhan operasional sekolah	Yang jelas sekolah akan kesulitan dalam menyusun RKA sesuai persentase penggunaan dananya yang sebelum ada 3 sumber keuangan menjadi 2 sumber bantuan dana.
5	Bagaimanakah pencairan dana BOSDA ada kendala atau tidak. Apakah hal ini tersosialisasikan	"pada dasarnya semua stake holder yang terkait dengan program BOSDA tidak mengalami kendala atau hambatan dalam penyaluran dananya..toh dana disalurkan melalui rekening sekolah. Karena kita dari Tim Manajemen BOSDA telah

		melakukan sosialisasi dengan mengundang sekolah SMA negeri dan swasta yang kita kumpulkan jadi satu
6	Bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program BOSDA ini	memang kita hanya melaksanakan sosialisasi hanya sekali tapi kita tidak menutup kemungkinan bagi sekolah yang ingin bertanya tentang BOSDA. Kami melayani apabila mereka datang ke kantor dan lewat telponpun kita layani
7	Bagaimana implementasi kebijakan Program BOSDA di Lihat dari segi Komunikasi dan penerimaan transformasi informasi	Sebenarnya sesuatu itu jangan dipersulit bagi orang yang mempermudah urusannya dan jangan terkungkung dengan jarak. Apabila ada masalah dan bagi yang sekolahnya jauh kan ada dana BOSDA, itukan bisa dipakai untuk konsultasi ke kantor, apakah itu untuk menyampaikan laporan dan pembuatan RKA bagi yang belum paham, apalagi kan ada HP.”
8	Bila dilihat dari kemauan dan sikap para pelaksana di sekolah apakah sering terlambat dalam pembuatan laporan	menurut saya sekolah sangat lambat dalam menyerahkan laporannya apabila sekolah lambat menyerahkan laporannya kami dari tim mengejar bola untuk menagih spj mereka. Bisa melalui telepon ataupun kami datangi langsung ke sekolah untuk menyakan apa yang menjadi masalah mereka
9	Bagaimana pendapat anda, apakah dalam pelaksanaan kebijakan program bosda sudah terjadi komunikasi yang efektif antara tim manajemen bosda, baik dalam program kerja dan penganggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan	Kalau bicara masalah penyaluran dana BOSDA di kalangan SMA Negeri 1 dan SMAN 2 , kami dari Bidang Menengah sudah semaksimal mungkin mengenai penyaluran Bantuan Dana sekolah, akan tetapi biasanya kami juga mengalami kendala masalah administrasi sebagai laporan per/semester mestinya ada di bidang dikmen, tapi kenyataanya tidak seperti itu.itu artinya komunikasi yang tidak jalan”
10	Bagaimana pendapat anda, apakah struktur birokrasi yang ada telah efektif bagi pembuat kebijakan & penerima kebijakan dalam mengimplementasikan program bosda	“memang kita hanya melaksanakan sosialisasi hanya sekali tapi kita tidak menutup kemungkinan bagi sekolah yang ingin bertanya tentang BOSDA. Kami melayani apabila mereka datang ke kantor dan lewat telponpun kita layani, untuk struktur birokrasi yang

		ada sudah berjalan dengan efektif
11	Terimakasih ya pak atas wawancaranya	Iya Bu henny



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Sunjono, S.Pd
 Kode : 04
 Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017
 Tempat : SMAN 1 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah sumber dana bapak terima sudah mencukupi untuk belanja operasional sekolah	Dengan adanya perubahan kewenangan, dana yang kami terima sangat kurang, karena banyak untuk membiayai belanja pegawai. Otomatis banyak biaya yang kami kurangi untuk menutupi kegiatan yang lain. Lagian banyak kegiatan yang tidak dibiayai maka harus kami siasati bagaimana kegiatan dapat berjalan. Kita mau melakukan rapat orang tua untuk ada sumbangan takut dibilang pungli. Serbasalah jadinya
2	Bagaimanakah bapak melaksanakan program BOSDA ini	Kami dari pihak sekolah akan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan
3	Apakah pelaksanaan Program BOSDA ini tepat sasaran	Sangat mba henny. Walaupun kita tidak memberikan langsung ke siswa akan tetapi kami ada alokasi untuk pemberian beasiswa yang berprestasi
4	Bagaimana pelaksanaan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.	Dengan adanya perubahan kewenangan, dana yang kami terima sangat kurang, karena banyak untuk membiayai belanja pegawai. Otomatis banyak biaya yang kami kurangi untuk menutupi kegiatan yang lain. Lagian banyak kegiatan yang tidak dibiayai maka harus kami siasati bagaimana kegiatan dapat berjalan. Kita mau melakukan rapat orang tua untuk ada sumbangan takut dibilang pungli. Serbasalah jadinya
5	Menurut Bapak, apakah dana ini akan mencukupi kebutuhan operasional sekolah	Yang jelas kuranglah.

6	<p>Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi tim di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA</p>	<p>Tugasnya merencanakan program kerja dan rencana pembiayaan yang anggarannya bersumber dari BOSDA, disesuaikan dengan besaran anggaran yang ada</p>
7	<p>Apa saja Fasilitas yang di gunakan dalam melaksanakan program bosda</p>	<p>Sarana dan prasarana yang ada di sekolah</p>
8	<p>Apakah ada SOP atau Sistem Alur Kerja bagi tim bosda di sekolah dalam membuat spj bosda</p>	<p>SPJ dibuat berdasarkan program yang sdh dilaksanakan dengan melibatkan penanggung jawab program dan tim bosda dengan alur kerja : Penanggung jawab program-bendahara-kepala sekolah-komite sekolah</p>
9	<p>Apakah pengawas dan tim manajemen bosda dinas pendidikan intens dalam melakukan/memberikan arahan tentang cara pengolahan dan pengelolaan program bosda, kalau ada berapa kali dalam sebulan</p>	<p>Tim Manajemen BOSDA dan pengawas turut berperan dalam pengelolaan program dan pelaporan berdasarkan koordinasi tim bosda yang ada di sekolah dengan waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tim bosda di sekolah</p>
10	<p>Bagaimana peran komite sekolah dalam program ini</p>	<p>kami tidak memasukkan komite sekolah ke dalam tim manajemen BOSDA sebagai perwakilan dari unsur orang tua. Dalam susunan tim tidak banyak melibatkan orang karena semakin banyak orang akan mempersulit urusan. Selain itu dari tim Kabupaten pengurus tim di sekolah diserahkan kepada kepala sekolah. Orang yang terlibat tidak susah dan fleksibel saja. Komite sekolah tidak kami libatkan akan tetapi dia berperan pada tahap perencanaan yaitu penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)".</p>
11	<p>Bagaimana usaha yang dilakukan, dengan pencairan dana BOSDA yang terlambat dan persentasenya yang sudah diatur dalam SOP</p>	<p>memang kita lakukan secara bertahap, semisalnya melakukan semenisasi lapangan memang tidak dapat selesai, maka kita usahakan secara bertahap juga. Semester pertama ketersediaan dana sekian yang dikerjakan sesuai adanya uang, kita tunggu lagi dana semester berikutnya kemudian lanjut dikerjakan. Begitu juga dana BOSDA dari keuangan propinsi yang pencairannya empat kali maka empat</p>

		kali juga kita tunggu dana untuk menyelesaikan pekerjaan
12	Bagaimana struktur birokrasi dalam menjalankan program ini	Kalau di tanya mengenai struktur organisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Selor kepala sekolah di bantu oleh para wakasek dan guru-guru dalam mengelola proses belajar mengajar dengan berpedoman pada visi Misi sekolah dalam hal mencerdaskan kehidupan anak- anak bangsa dan alhamdulillah dengan adanya bantuan pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah Daerah pihak tidak lagi membebankan biaya kepada orangtua siswa cuma memang yang menjadi kendala sering terlambat dalam pencairannya karena butuh proses kali ya...dari kas daerah kabupaten baru masuk ke sekolah secara administrasi'



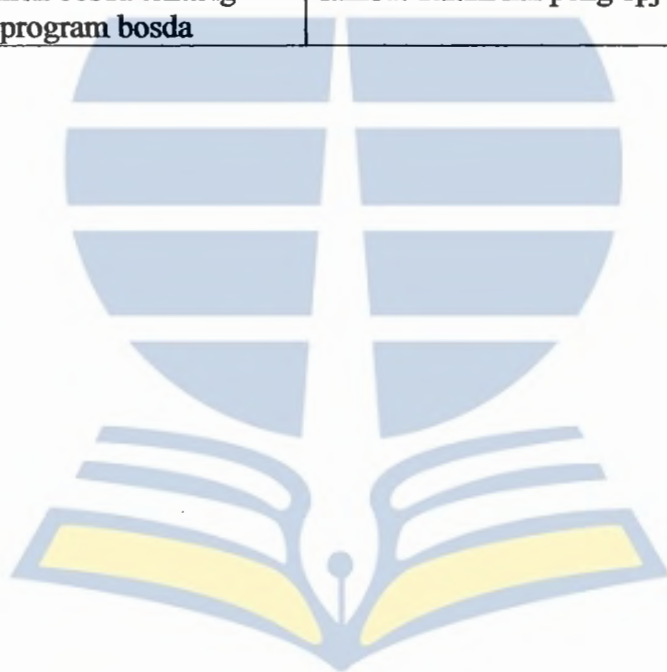
Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Budi Nirwana, S.Pd
 Kode : 05
 Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Senin / 23 Januari 2017
 Tempat : SMAN 2 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah sumber dana bapak terima sudah mencukupi untuk belanja operasiaonal sekolah	Dana BOS, BOSDA, BOSPROP yang semula diterima oleh sekolah apabila ditotal 3.400.000, sekarang kita hanya terima 2.400.000 persiswa. Hal ini sangat menyulitkan kami untuk membiayai kegiatan baik itu untuk belanja pegawai, modal dan ATK. Untung saja Dinas Provinsi menyanggupi untuk membayar gaji guru kontrak. Tapi hal ini sangat menyulitkan untuk pembiayaan kegiatan sekolah dan banyak kegiatan yang biayanya dikurangi
1	Bagaimanakah komunikasi yang terjadi antara tim bosda sekolah, Dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten	untuk masalah komunikasi kami tidak ada masalah begitupun waktu kami masih sama Kabupaten. Kami cepat mendapatkan informasi dan kamipun kalau ada masalah kami langsung kekantornya untuk menyelesaikan permasalahan dan cepat memperbaikinya. Dan apabila saya deluan mendapat informasi sayapun segera menginformasikan keteman-teman sekolah yang lain”.
2	Apakah pelaksanaan Program BOSDA ini tepat sasaran	Menurut saya sudah tepat untuk diberikan ke sekolah, jadi tinggal sekolah yang mengatur kebutuhannya dan menggunakan dana BOSDA ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk tekhnis yang ada.
3	Bagaimana pelaksanan implementasi program BOSDA Semenjak peralihan kewenangan jenjang SMA langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan memang tidak lagi mengalokasikan anggaran BOSDA Kab, dan sekolah hanya menerima BOS Propinsi itupun tidak melalui kita lagi, melainkan langsung dari Propinsi. Sebenarnya hal ini meringankan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, akan tetapi bagaimana ditingkat sekolah, tapi kitakan melaksanakan

		peraturan ya harus kita jalankan. Dengan diambilnya SLTA ke provinsi mudah-mudahan kualitas pendidikan di Kabupaten Bulungan lebih maju
4	Menurut Bapak, apakah dana ini akan mencukupi kebutuhan operasional sekolah	Kita berikan kewenangan tersebut ke sekolah karena dia langsung menggunakan dananya. Jadi penggunaan dana harus sehemat mungkin dan efektif. Gunakan dana sesuai persentasenya, berapa untuk modal, berapa untuk honor dan berapa untuk belanja ATK.
5	Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan yang termasuk dalam tim manajemen bosda tentang adanya program bosda	kalau ditanyakan masalah pelayanan dan sikap, Dinas pendidikan pelayanannya kepada kami dari pihak sekolah sangat menerima kami dengan tangan terbuka. Malah mereka mengejar kami apa bila kami lambat dalam hal peng-spj-an



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Yuli, SE
 Kode : 06
 Jabatan : Bendahara BOSDA
 Hari / Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017
 Tempat : SMAN 1 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah yang menjadi kendala dalam mengelola dana BOSDA yang terkait dengan sumber daya yang ada	saya merupakan guru BP yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOSDA. Jujur mba, sebenarnya kami sangat kekurangan tenaga karena banyaknya kegiatan sekolah. Jadi tidak ada satu orang pertugas khusus yang mengelola BOSDA. Saya dibantu dengan operator untuk menginfut data selain itu operator tersebut juga diberikan tugas lain, sehingga tidak fokus. Itupun operator tersebut bukan dari pegawai TU yang PNS melainkan tenaga honor yang diangkat oleh Kepala Sekolah. Saya sebenarnya ingin mengundurkan diri jadi bendahara mengingat tugas saya sebagai guru BP dan mengerjakan laporan BOSDA saya dituntut cepat penyelesaiannya. Jadi saya sangat kewalahan. Tapi Kepala Sekolah menginginkan saya jadi Bendahara ya harus dijalani. Ini sudah tahun ketiga saya sebagai bendahara”.
2	Menurut anda, Apakah Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yaitu kebijakan program BOSDA telah tersosialisasi dengan baik ke sekolah	Seharusnya ada kegiatan rutinitas sekali atau pertiga bulanlah, untuk mengevaluasi apa yang telah kami laporkan, supaya ada persamaan persepsi antar sekolah mengenai pembuatan laporan untuk mengimplementasikan program BOSDA.
3	Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA kabupaten dan Provinsi	karena waktu sosialisasi yang cukup singkat, materi yang diberikan sebatas contoh-contoh RKA, contoh laporan dan cara membuat SPJ yang benar

		dan kami harap ada komunikasi selajutnya diluar sosialisasi”.
4	Bagaimanakah pelibatan komite sekolah dalam pengelolaan BOSDA	Dalam pembuatan RKA, selalu kita ajukan terlebih dahulu rancangannya. Karena sekolah hanya mempunyai dana BOSDA dari Kabupaten dan Propinsi maka kami susun rancangan untuk diketahui oleh Komite sekolah. RKA itu kami buat setelah penerimaan siswa baru, jadi kita bisa prediksi jumlah siswa yang ada”
5	Apakah hambatan atau kendala yang di hadapi dalam mengelola program bosda	penyaluran dana bantuan oprasional sekolah tersebut masih dihadapkan pada sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia (staf) yang profesional belum memadai, sehingga berakibat banyaknya keluhan dan pengaduan dari dari pihak sekolah maupun dari komite sekolah yang menerima bantuan dana sekolah, yang terkesan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyaluran dana bantuan sekolah, persyaratan yang tidak transparan, yang membuat para pemohon bantuan dana sekolah harus kerja ekstra untuk menunggu kapan bantuan tersebut diberikan kepada pemohon sekolah yang menerima bantuan sekolah

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Nurul Hidayah, S.Pd
 Kode : 07
 Jabatan : Bendahara BOSDA
 Hari / Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017
 Tempat : SMAN 2 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Apakah yang menjadi kendala dalam mengelola dana BOSDA yang terkait dengan sumber daya yang ada	saya selalu dibantu oleh petugas operator untuk mengentry data. Sehingga apabila ada pertemuan tekhnis operator selalu dibawa untuk mengetahui bagaimana sistem pendataan dan pengelolaan dana BOSDA. Yang menjadi kendala kami adalah operator kami merupakan tenaga honorer sehingga apabila berhenti selalu berganti orang. Kami memang tidak bisa membayar honor mereka sesuai UMR di karenakan adanya aturan dalam pembayaran belanja pegawai dalam anggaran BOSDA”
2	Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA kabupaten dan Provinsi	Sosialisasi dari Kabupaten awal tahun memang sudah dilakukan dan hanya sekali saja. Katanya sih karena dana yang terbatas, dan tim Kabupaten hanya menanggung konsumsi saja. Sehingga sekolah menanggung biaya transportasi dan uang penginapan bagi sekolah yang jauh. Akan tetapi setelah pendidikan menengah diambil oleh propinsi, sosialisasi dilaksanakan di Tarakan yang semuanya kami ditanggung oleh provinsi”.
3	Bagaimana kemauan tim BOSDA sekolah dalam hal pembuatan laporan dana BOSDA	kami selalu terlambat dalam pembuatan laporan dikarenakan kesibukan kami juga sebagai guru, sehingga kami kewalahan dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi harus kami kerjakan, walaupun terlambat yg penting dana berikutnya kami keluar walaupun terlambat juga

		kami terima
4	Bagaimana pendapat anda, tentang Sikap, Kemampuan dan Kemauan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan yang termasuk dalam tim manajemen bosda tentang adanya program bosda	kalau dilihat dari tanggungjawab yang kami berikan sudah sangat cepat karena kami pun ingin segera dana cair untuk percepatan kegiatan akan tetapi selalu saja ada kesalahan yang dibuat apakah itu dari segi belanja modal, belanja pegawai jadi kami selalu bolak-balik ke dinas pendidikan untuk melakukan pembetulan. Kan berat diongkos.



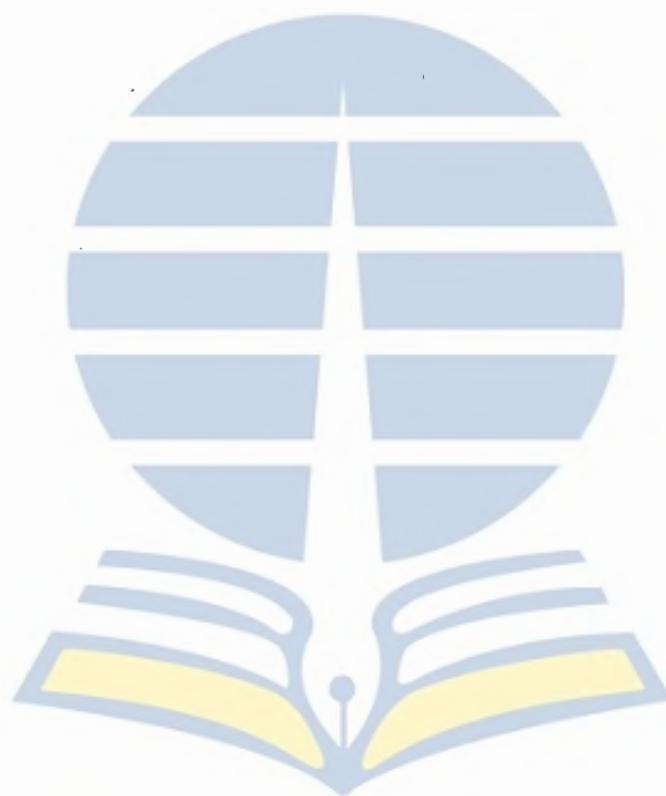
Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Drs. Sudarman
 Kode : 08
 Jabatan : Guru SMAN 1 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Selasa / 24 Januari 2017
 Tempat : SMAN 1 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimanakah komunikasi antar kepala sekolah dan bendahara yang ada pada tim sekolah	sosialisasi dilakukan pada saat ada rapat guru yang diampaikan oleh kepala sekolah tentang dana BOSDA. Hal ini disampaikan agar para guru tau bahwa kita tidak melakukan pungutan kepada siswa. Toh walaupun itu dilakukan dan tidak ada dana untuk kegiatan tersebut kita rapatkan pada komite sekolah berserta para orang tua
2	Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA kabupaten dan Provinsi	Sosialisasi dari Kabupaten awal tahun memang sudah dilakukan dan hanya sekali saja. Katanya sih karena dana yang terbatas, dan tim Kabupaten hanya menanggung konsumsi saja. Sehingga sekolah menanggung biaya transportasi dan uang penginapan bagi sekolah yang jauh. Akan tetapi setelah pendidikan menengah diambil oleh propinsi, sosialisasi dilaksanakan di Tarakan yang semuanya kami ditanggung oleh provinsi”.
3	Bagaimanakah SOP yang mengatur tentang pencairan dana BOSDA ?	Hal ini merupakan kebijakan dari dinas pendidikan, jadi harus kita lakukan. Kamipun dari sekolah paham kenapa ini diberlakukan, karena untuk meringankan tugas sekolah, dan apabila laporan itu tidak dibuat persemester dan pertriwulan akan menumpuk laporan yang kami buat. Apabila kami tidak buat laporan dana kami untuk selanjutnya tidak keluar, kalau itu terjadi bagaimana kami membiayai operasional sekolah”

4	Bagaimanakah bapak melaksanakan program BOSDA ini	Kami dari pihak sekolah akan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan
5	Apakah pelaksanaan Program BOSDA ini tepat sasaran	Sangat mba henny. Walaupun kita tidak memberikan langsung ke siswa akan tetapi kami ada alokasi untuk pemberian beasiswa yang berprestasi



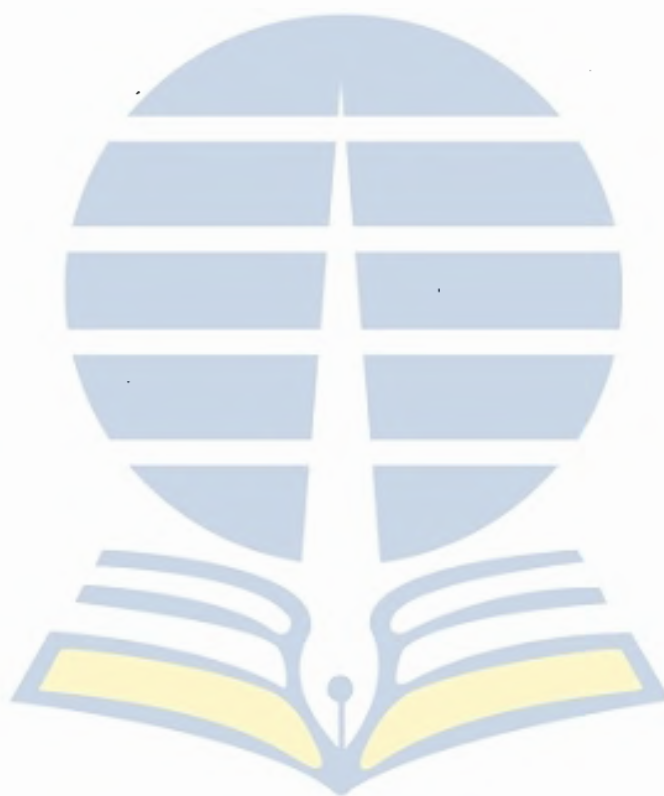
Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Saridah, S.Sos
 Kode : 09
 Jabatan : Guru SMAN 2 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Selasa / 23 Januari 2017
 Tempat : SMAN 2 Tanjung Selor

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimanakah komunikasi antar kepala sekolah dan bendahara yang ada pada tim sekolah	<p>rapat para guru tentang dana BOSDA dilakukan pertriwulan. Para guru harus tau tentang dana BOSDA karena masyarakat beranggapan dengan adanya sekolah gratis mereka sangat kritis apabila ada pungutan. Jadi kami harus dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua tentang kebutuhan yang tidak bisa dibiayai dengan dana BOSDA, sehingga para masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan sekolah, seperti halnya menghadapi ujian misalnya ada penambahan jam belajar, biaya perpindahan yang memerlukan tambahan dana. Sehingga kami pihak sekolah perlu mengundang orang tua untuk musyawarah sekolah terkait hal tersebut</p>
2	Bagaimanakah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA kabupaten dan Provinsi	<p>Sosialisasi dari Kabupaten awal tahun memang sudah dilakukan dan hanya sekali saja. Katanya sih karena dana yang terbatas, dan tim Kabupaten hanya menanggung konsumsi saja. Sehingga sekolah menanggung biaya transportasi dan uang penginapan bagi sekolah yang jauh. Akan tetapi setelah pendidikan menengah diambil oleh propinsi, sosialisasi dilaksanakan di Tarakan yang semuanya kami ditanggung oleh provinsi”.</p>
3	Apakah para guru dalam satuan pendidikan mengetahui apakah	Kami mengetahui dengan adanya dana BOSDA, tapi kami tidak

	pengelolaan Bosda sesuai dengan petunjuk yang ada	mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak karena kami tidak mengelola dana
4	Apakah program bosda mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran	Sangat mendukung mba. Karena kami dapat melakukan praktek langsung dan guru diminta untuk mengajukan usulan dana.
5	Apakah pengelolaan BOSDA transparan, tepat waktu dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini guru	Kalo masalah transparan sudah diinfokan ke kita para guru,



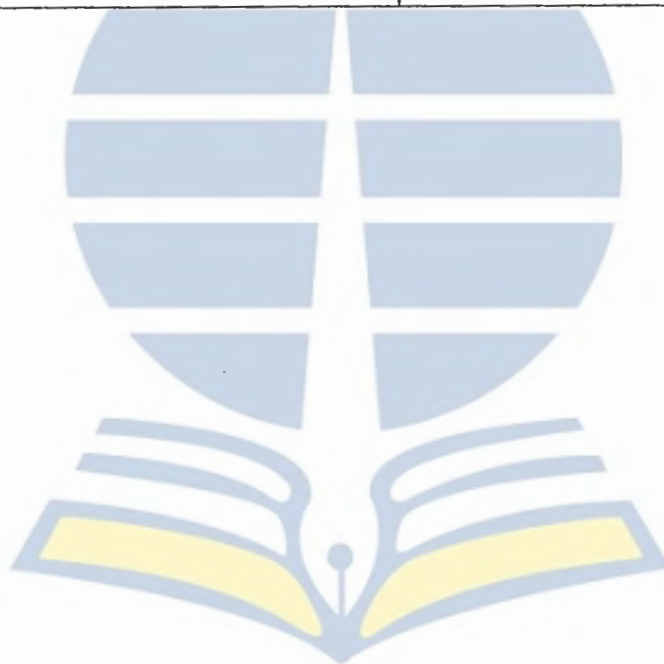
Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : H. Sukardin
 Kode : 10
 Jabatan : Komite Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Kamis / 26 Januari 2017
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimanakah komunikasi yang terjadi antara tim bosda sekolah, Dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten	Penyaluran Program dana bantuan sekolah disekolah kami sudah terlaksana, akan tetapi biasanya kami juga kurangnya informasi atau komunikasi mengenai besaran jumlah bantuan yang diterima pada kami, kami juga sudah memasukan rincian apa-apa yang akan di bantu dalam sekolah kami maupun anak sekolah didik kami yang kurang mampu tetapi berprestasi dalam pendidikan. Akan tetapi biasa kami menemukan kendala keterlambatan distribusi saja dalam penyaluran
2	Menurut Bapak/Ibu, apakah dana BOSDA sudah tepat sasaran	"Program BOSDA sudah sangat membantu kegiatan sekolah hal ini terlihat dengan tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh masyarakat, walaupun ada sekolah rapatkan bersama para orang tua, hanya saja penggunaanya perlu dievaluasi"
3	Bagaimana pengetahuan sumber daya di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA	"kalau ditanya mengenai sumber daya pada SMA Negeri 1 Tanjung Selor, sy kurang tau mengenai itu, dikarenakan yang saya tau mereka pasti paham mengenai dana BOSDA tersebut, dikarenakan mereka punya pekerjaan mengurus hal tersebut, kalau kami sebagai orang tua siswa, Cuma menerima bantuan dari pemerintah agar tidak membeda-bedakan anatar siswa yang satu dengn yang lainnya itu terbukti karna di SMA Negeri 1 Tanjung Selor tidak

		ada lgi pungutan dana dalam bentuk apapun
4	Apakah komite sekolah mengetahui adanya kebijakan program BOSDA	Sangat mengetahui
5	Bagaimana peran komite sekolah dalam kebijakan program bosda	Tidak terlalu terlibat dalam pengusulannya hanya sekedar mengetahui saja
6	Apa saja hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Komite Sekolah dalam peran sertanya untuk implementasi program bosda	Karena ketidak tahuan kami apa yang menjadi petunjuk tekhnis penggunaan dana. Dan kurang ada informasi kepada kami
7	Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dan mudah di pahami oleh satuan pendidikan	Kurang paham. Karena kami tidak pernah hadir dan terlibat pada dinas kab dan provinsi mengadakan sosialisasi



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mikfatuh Jannah, S.Pd
 Kode : 11
 Jabatan : Komite Sekolah SMAN 2 Tanjung Selor
 Hari / Tanggal : Jumat / 27 Januari 2017
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimanakah komunikasi yang terjadi antara tim bosda sekolah, Dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten	Saya sebagai komite sekolah kurang paham dengan adanya komunikasi yang diterima oleh sekolah
2	Bagaimana pengetahuan sumber daya di sekolah dalam melaksanakan program BOSDA	Para guru dan pengelola dana BOSDA SMA negeri 2 Tanjung Selor yang mengelola dana bantuan operasional sekolah cukup profesional dalam hal mengelolah dana bantuan operasional sekolah baik dan berkualitas karena tugas masing-masing bidang jelas dan tepat dalam pemamfaatan dana operasional sekolah
3	Bagaimanakah sikap dan kemauan tim pelaksana BOSDA pada sekolah anda	kalau di tanya tentang sikap dan pelayanan dalam pemamfaatan dana BOSDA tersebut masih ada keluhan dari guru, meyampaikan kepada ketua komite bahwa pada saat mengajukan ke Bendahara SMA Negeri 2 Tanjung Selor tentang rencama kegiatan maupun kepada salah satu staf yang mengurus tentang bantuan tersebut, terkesan lambat dalam hal pengeluaran dananya padahal dana tersebutkan untuk pelaksanaan kegiatan para guru dalam pembelajaran
3	Apakah komite sekolah mengetahui adanya kebijakan program BOSDA	Iya
4	Bagaimana peran komite sekolah dalam kebijakan program bosda	Jarang dilibatkan kalo tidak ada yang pent[ing]
5	Apa saja hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Komite Sekolah dalam peran sertanya untuk implementasi program bosda	Karena kurang terlibat jadi tidak mengerti masalag yang dihadapi. Yang jelas sepertinya kurang ada komunikasi

6	Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dan mudah di pahami oleh satuan pendidikan	Kali tentang SOP pengelolaannya, berapa persen untuk pembiayaan yang lain, berapa untuk kegiatan ekstrakurikuler
7	Bagaimanakah Kinerja Dinas Pendidikan dalam implementasi kebijakan program bosda	Setau saya, dinas sudah memanggil sekolah untuk melaksanakan sosialisasi, tapi komite sekolah tidak pernah di undang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kalo bisa kitapun dipanggil dan diundang sebagai perwakilan masyarakat



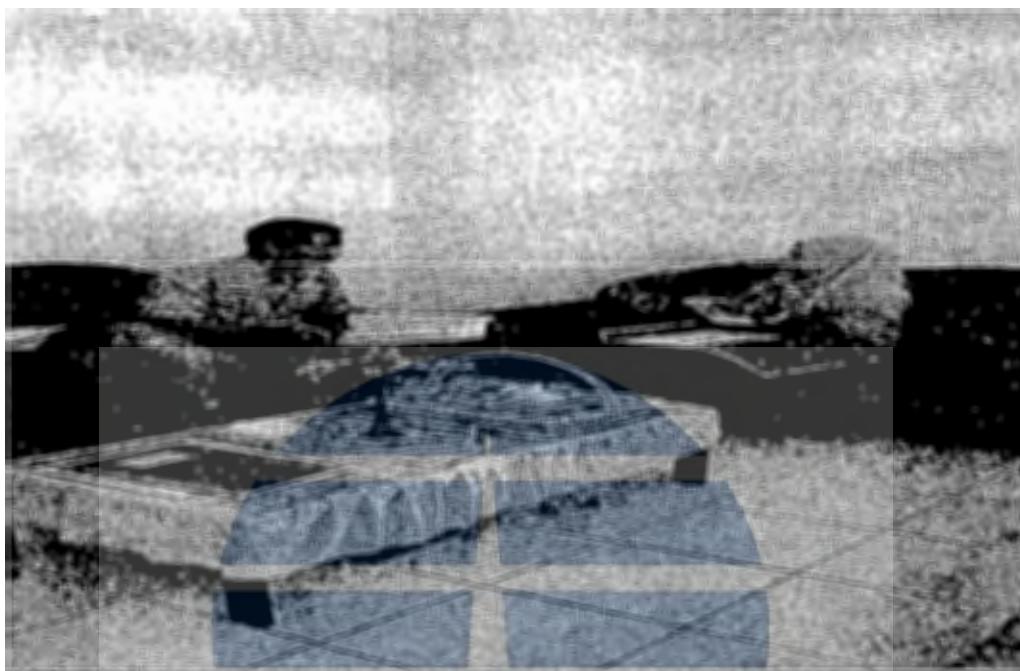
Lampiran 3

Wawancara mendalam dengan PPTK BOSDA SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Utara



Lampiran 3

Dokumentasi wawancara mendalam di SMAN 1 Tanjung Selor



Wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor

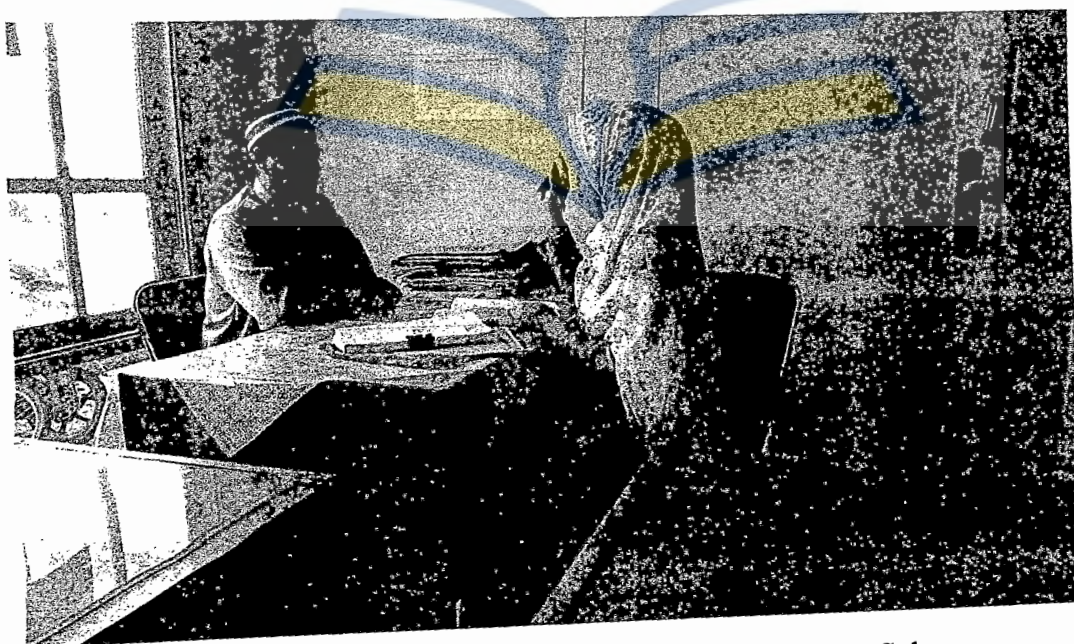


Lampiran 3

Wawancara mendalam dengan Bendahara BOSDA SMAN 1 Tanjung Selor



Wawancara mendalam dengan Guru SMAN 1 Tanjung Selor



Wawancara mendalam dengan Komite Sekolah SMAN 1 Tanjung Selor